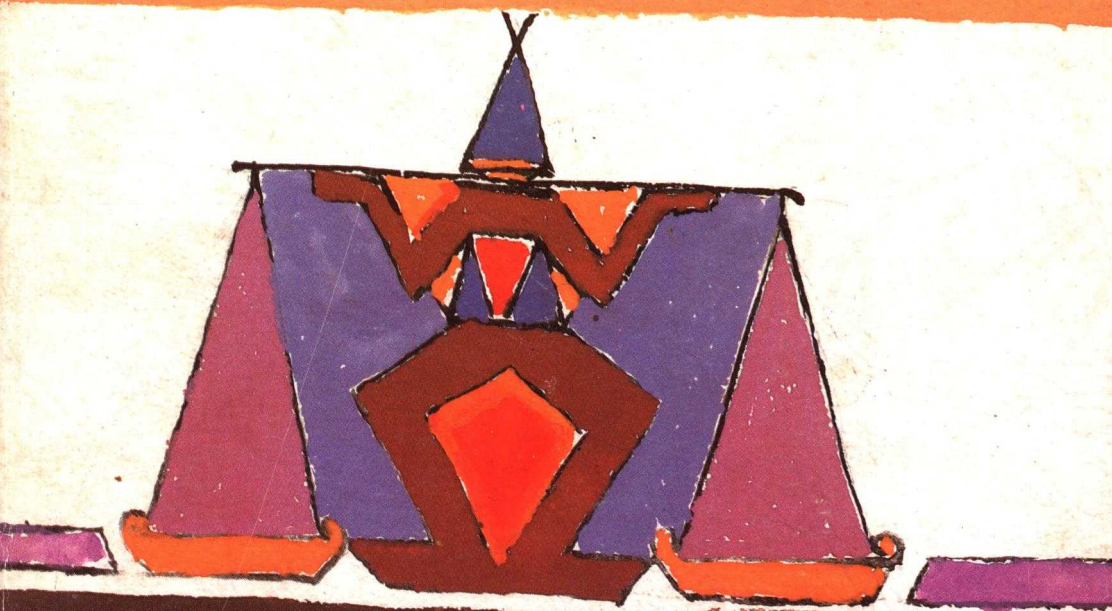




**SISTEM KEPEMIMPINAN
DALAM MASYARAKAT PEDESAAN
DAERAH SULAWESI TENGGARA**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SISTEM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

Peneliti/Penulis :

1. Drs. A. Djohan Mekuo
2. Drs. Mardhan
3. H.M. Djafar Mekoa, BA.
4. Drs. Sumardin Abbas
5. Mislan Pamada, BA.

Penyempurna/Editor :

Dra. Fajria Novart Manan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1986**

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah Kebudayaan Daerah di antaranya ialah naskah Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 1983/1984.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Tenaga ahli perorangan, dan para peneliti/penulis.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Agustus 1986
Pemimpin Proyek,



(Drs. H. Ahmad Yunus)
NIP. 130.146.112

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1983/1984 telah berhasil menyusun naskah Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sulawesi Tenggara.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Agustus 1986
Direktur Jenderal Kebudayaan,



(Prof. Dr. Haryati Soebadio)
NIP. 130.119.123

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Masalah	2
B. Tujuan	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Prosedur Penelitian dan Pertanggungjawaban Ilmiah	8
BAB II IDENTIFIKASI	13
A. Lokasi	13
B. Penduduk	22
C. Sejarah Pemerintahan Desa	28
D. Latar Belakang Sosial Budaya	37
BAB III GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN SULAWESI TENGGARA	50
A. Organisasi Pemerintahan Desa	51
B. Sistem Kepemimpinan	66
BAB IV POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL	80
A. Organisasi Dalam Kegiatan Sosial	93
B. Sistem Kepemimpinan Di Bidang Sosial	97
C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Sosial Dalam Masyarakat	103
BAB V POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI	106
A. Organisasi Dalam Kegiatan Ekonomi	106
B. Sistem Kepemimpinan Di Bidang Ekonomi ..	119

	C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Ekonomi dalam Masyarakat	
BAB VI	POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARA- KAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA	123
	A. Organisasi Dalam Kegiatan Agama	122
	B. Sistem Kepemimpinan Di Bidang Agama	133
	C. Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Agama Dalam Masyarakat	140
BAB VII	POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARA- KAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN ..	143
	A. Organisasi Dalam Kegiatan Pendidikan	144
	B. Sistem Kepemimpinan Di Bidang Pendidikan .	155
	C. Pengaruh Fungsi Kepemimpinan Bidang Pen- didikan Dalam Masyarakat	162
BAB VIII	BEBERAPA ANALISA	
	A. Pengaruh Kebudayaan Terhadap Sistem Ke- pemimpinan Di Pedesaan	166
	B. Sistem Kepemimpinan Di Pedesaan Dalam Hubungannya Dengan Sistem Administrasi Politik Nasional	168
	C. Sistem Kepemimpinan Di Pedesaan Dalam Hubungannya Dengan Pembangunan Nasional	171
BAB IX	P E N U T U P	
	A. Kesimpulan	174
	B. Saran-saran	175
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	I. Peta Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara	176
	II. Peta Wilayah Kecamatan Wawotobi	177
	III. Bibliografi	178
	IV. Informan	180
	V. I n d e k s	187

BAB I PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan Maha Pencipta sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai unsur sosial. Sebagai seorang individu, manusia dengan akal budinya dapat terus menerus mengembangkan dirinya, namun karena keterbatasan dalam dirinya manusia membutuhkan adanya orang lain. Saling ketergantungan (interpendensi) antara individu adalah merupakan naluri manusia yang dikodratkan Tuhan sebagai makhluk sosial. Hidup berkelompok dan berkerabat adalah salah satu peradaban manusia dan merupakan gejala permulaan terbentuknya suatu masyarakat.

Kepemimpinan muncul bersama-sama adanya peradaban manusia; yaitu sejak nenek moyang manusia itu berkumpul dan bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya menantang kebuasan binatang dan keganasan alam sekitarnya. Dalam kondisi masyarakat yang masih bersahaja, sendi-sendi kemasyarakatannya terjalin atas dasar hubungan kekerabatan/kekeluargaan, karena tinggal berdekatan atau karena kepentingan bersama. Di dalam proses kerja sama secara tertib untuk mencapai suatu tujuan yang menjadi cita-cita bersama, dibutuhkan seorang pemimpin yang oleh kelompoknya dipandang lebih disegala aspek kepribadiannya. Sebagai contoh, *Rundulamo* diangkat menjadi Raja Konawe di zaman pra sejarah Sulawesi Tenggara, sebagai pengakuan masyarakat *Tolaki* atas kesaktian, kekuatan, kecerdasan dan keberaniannya. (Inf. 20) Dengan demikian, "pemimpin ialah seorang yang membimbing-mempimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya". (Henry Pratt Fairchild, 1960; 174)

Meskipun penunjukan pemimpin pada masa lalu hanya atas dasar pengakuan para pengikutnya, namun kepemimpinannya telah dapat menumbuhkan kondisi—kondisi dinamis dalam masyarakatnya, sebab "seorang pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan suatu usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu". (Dra. Kartini Kartono, 1983; 35).

Adanya unsur pemimpin dan yang dipimpin serta saling keter-

gantungan antara yang memimpin dan yang dipimpin, melahirkan bentuk-bentuk organisasi di dalam masyarakat.

Organisasi itu tiada lain "adalah merupakan sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi daripada sekelompok orang-orang yang bekerja secara bersama-sama menuju kearah tujuan bersama di bawah kewenangan dan kepemimpinan." (William G. Scott, 1967; 103).

Walaupun aktivitas dipimpin dan memimpin itu merupakan dua macam kegiatan yang berbeda, namun kedua hal tersebut perlu dipelajari bersama-sama sebagai suatu studi organisasi, agar supaya setiap pemimpin dapat memahami fungsi dan peranan serta hak dan kewajibannya. Demikian pula bagi kelompok yang dipimpin dapat menjadi pengikut yang baik; yaitu sadar akan kedudukannya serta mengerti akan hak dan kewajibannya.

Demikianlah hubungan kausalitas antara pemimpin, yang dipimpin dan organisasi sebagai wadah penggerak aktivitas manusia di dalam masyarakat, sehingga naskah ini memilih tema "Sistem Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Pedesaan".

MASALAH

Desa yang kita kenal sekarang sebagai nama organisasi pemerintah di seluruh Indonesia sudah dikenal sejak zaman Pra Hindu. Dengan demikian desa di Indonesia merupakan produk pertumbuhan sejarah yang berabad-abad. Kerajaan-kerajaan di Indonesia telah berulang kali timbul dan tenggelam, kekuasaan politik yang meliputi sebagian atau seluruh wilayah Indonesia silih berganti. Namun Desa, sebagai kesatuan Pemerintah yang terendah tetap bertahan dan hidup terus menerus. Bahkan selama itu pada umumnya susunan pemerintahannya tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah (historis) dan faktor tujuan (teleologis) daripada pemerintahan dan desa itu sendiri merupakan faktor yang memegang peranan penting dan dominant.

Di dalam sejarah kehidupan desa yang terlampau panjang dimana manusia berusaha mengejar tujuan hidupnya, timbullah berbagai masalah yang menyangkut desa, khususnya pemerintahan desa.

Masalah Umum.

1. Dalam kondisi wilayah Indonesia yang luas dan terpisah-pisah letaknya, dan dihuni oleh berbagai macam suku bangsa dengan adat dan tradisi yang berbeda-beda, memungkinkan pula keanekaragaman kebudayaan serta pola organisasi kemasyarakatan-nya.
2. Hingga sekarang ini, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional belum dapat sepenuhnya melayani data yang terjaln di dalam bahan kesejahteraan, folklore adat istiadat, (sistim budaya), geografi budaya (lingkungan budaya), baik untuk pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, kepentingan pemerintahan, maupun pendidikan dan kemasyarakatan.

Masalah Khusus

1. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin laju, masyarakat di pedesaan selalu mengalami kecenderungan untuk berubah dan berkembang. Perubahan ataupun perkembangan nilai, sikap dan sistem dalam tata kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat, senantiasa menimbulkan multiplikasi masalah serta cara pemecahannya.
2. Para ilmuwan menyadari pula betapa kurangnya pengetahuan para ahli Ilmu Sosial di negara kita terutama mengenai masalah kepemimoinan dalam kaitannya dengan usaha-usaha pembangunan masyarakat di pedesaan sebagai akibat dari kurangnya penelitian ilmiah serta kurangnya publikasi terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
3. Daerah Sulawesi Tenggara khususnya, dan mungkin sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, bahwa di dalam sejarah pertumbuhannya daerah ini mengalami beberapa kali perubahan politik pemerintahan yaitu sejak dari Pemerintahan Kerajaan oleh raja-raja setempat kemudian pada pemerintahan di zaman penjajahan dan akhirnya memasuki zaman Kemerdekaan sekarang ini.
4. Khususnya wilayah Kecamatan Wawotobi di Daerah Tingkat II Kendari sebagai daerah sample, sejak dahulu telah mengenal

sistem pemerintahan yang teratur di bawah kepemimpinan raja-raja konawe. Hingga pemerintahan Kaum Intelektual sekarang ini, masih terlihat pengaruh tradisi kepemimpinan di masa lampau.

TUJUAN

Tujuan Umum

1. Tujuan Inventarisasi dan dokumentasi Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan ialah untuk memberikan data ilmiah dan obyektif tentang sistem kepemimpinan sebagai bagian dari kebudayaan universal bangsa Indonesia, sebagai bahan informasi kebudayaan nasional di dalam menetapkan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan kepentingan masyarakat.
2. Melestarikan kebudayaan nasional sebagai suatu usaha memelihara wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Tujuan Khusus

1. Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan naskah Sistem Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Pedesaan, yang mengungkapkan masalah kepemimpinan dikaitkan dengan kegiatan politik, sosial, ekonomi, agama, dan pendidikan.
2. Meletakkan dasar yang fundamental terhadap penelitian dan penulisan sejarah pemerintahan desa di daerah Sulawesi Tenggara, Khususnya kepemimpinan dalam komunitas suku Tolaki di daerah Kendari.

RUANG LINGKUP

Kegiatan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah untuk tahun 1983/1984 ini, meliputi 5 aspek kebudayaan termasuk aspek "Sistem Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Pedesaan" sebagai tema naskah ini. Oleh karena ruang lingkup tema dan wilayah penelitian yang sangat luas, maka perlu diberikan pembatasan yang tegas baik dari segi materi, maupun pada wilayah operasionalnya.

Materi

Materi pokok kegiatan inventarisasi dan dokumentasi sistem ke-

pemimpinan di dalam masyarakat pedesaan, ialah sistem kepemimpinan dalam berbagai kegiatan masyarakat yang meliputi; bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, agama dan pendidikan, baik di masa lampau, maupun di masa sekarang ini.

Di samping itu faktor masyarakat dan kondisi lingkungannya merupakan dasar yang paling utama, sebab bentuk-bentuk kepemimpinan itu adalah merupakan wujud usaha manusia untuk mengendalikan lingkungannya.

Lokasi

Daerah operasional inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah ialah meliputi 27 wilayah Propinsi di Indonesia, Di antaranya adalah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Daerah Sulawesi Tenggara terdiri dari 4 daerah Kabupaten dan 47 wilayah Kecamatan. Wilayahnya cukup luas yang terdiri dari sebagian daratan Pulau Sulawesi dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Sudah tentu dengan keadaan pulau-pulaunya yang dipisahkan oleh lautan yang sering mengganas, merupakan permasalahan khusus dalam perhubungan antara wilayahnya.

Oleh keadaan wilayah yang terpisah-pisah ini, melahirkan pula berbagai suku bangsa yang masing-masing suku mempertahankan wilayah, adat dan tradisinya.

Di daratan Sulawesi bagian Tenggara, berdiam suku Tolaki yang mengangkat dirinya sebagai penduduk asli daerah Kabupaten Kendari dan Kolaka. Sedang di daerah kepulauan bermukim beberapa suku bangsa dengan bahasa dan tradisinya masing-masing. Kelompok etnis yang terbesar di wilayah kepulauan adalah suku Muna yang mendiami Pulau Muna dan bagian barat Pulau Buton, sedang suku Wolio, Cia-cia dan Kamaru mendiami bagian utara, timur dan selatan Pulau Buton. Karena luasnya wilayah Sulawesi Tenggara disamping sifat masyarakatnya yang majemuk, maka perlu ditetapkan Daerah Kabupaten Kendari sebagai wilayah kegiatan penelitian ini. Masyarakat yang dijadikan sample dalam studi kepemimpinan ini ialah masyarakat Tolaki sebagai mayoritas penduduk di daerah Sulawesi Tenggara.

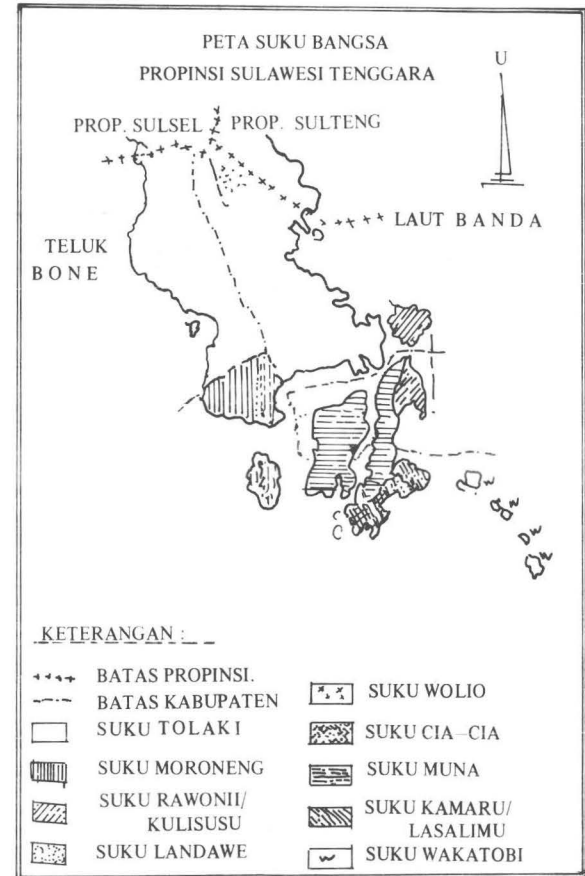
Wujud komunitas kecil di daerah Sulawesi Tenggara sama dengan unit administrasi terkecil di daerah tersebut, yaitu yang disebut Desa. Pola hidup kemasyarakatan di desa hingga sekarang ini masih dalam

keadaan murni dan utuh. Oleh karena itu yang menjadi sasaran permasalahan menurut tema/judul naskah ini ialah masyarakat yang bermukim di desa.

Di daerah Sulawesi Tenggara telah ditetapkan 2 desa yang berada di wilayah Kecamatan Wawotobi, yaitu :

- Desa Benua, sebagai sample dari desa-desa yang terletak jauh dari pusat kota;
- Kelurahan Inalahi, merupakan sample dari desa-desa yang berada di lingkungan kota kecamatan.





Uraian selengkapnya tentang desa/kelurahan sample di atas akan dikemukakan dalam bab-bab berikutnya.

Waktu

Kurun waktu kegiatan penelitian dan penyusunan naskah ini meliputi waktu dari bulan Juli 1983 sampai dengan bulan Maret 1984 (lihat jadwal kegiatan).

Jadwal Kegiatan.

No.	KEGIATAN	W A K T U										
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1.	Penelitian :											
	— Persiapan											
	— Kepustakaan											
	— Lapangan											
2.	Pengolahan Data.											
3.	Penyusunan Naskah.											
4.	Serah Terima Naskah											

PROSEDUR PENELITIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH.

Untuk efisiensi dan efektivitasnya kegiatan inventarisasi dan dokumentasi ini, dirasa perlu untuk menetapkan tahapan-tahapan kegiatan dan jadwal pelaksanaannya, sebagai suatu prosedur penelitian secara ilmiah yang susunan kegiatannya diatur sebagai berikut:

- Tahap I : Persiapan
- Tahap II : Pengumpulan data
- Tahap III : Pengolahan data
- Tahap V : Penyusunan naskah
- Tahap VI : Hasil akhir/penyerahan naskah.

Tahap Persiapan

Sebagai langkah awal dari persiapan penelitian ini adalah penyusunan organisasi Team penelitian oleh Pemimpin Proyek. Untuk mak-

sud tersebut Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara disingkat IDKD, dengan surat Keputusannya tertanggal Mei 1983 No. /IDKD/V/83, telah menetapkan Susunan Team Penelitian dan Penyusunan naskah Sistem Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

- Drs. A. Djohan Mekuo (Ketua)
- Drs. Mardhan (Anggota)
- H.M. Djafar Mekoa, BA (Anggota)
- Drs. Sumardin Abbas (Anggota)
- Muslan Pamada, BA (Anggota).

Untuk mendayagunakan anggota team seefisien dan seefektif mungkin, maka anggota team yang sangat terbatas jumlahnya, diorganisir kembali menurut pembagian wilayah dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka terbentuklah kelompok-kelompok kerja sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan.

Penelitian di perpustakaan (library research), dilakukan oleh Ketua Aspek dengan pertimbangan bahwa para Ketua Aspek sebagai penulis daerah, telah banyak dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan aspek yang dikelolanya.

2. Penelitian lapangan.

Empat orang anggota team dibagi dalam dua wilayah penelitian, yaitu masing-masing sebagai berikut :

- Desa Benua : 1. Drs. Sumardin Abbas
2. Muslan Pamada. BA.
- Kelurahan Inalahi : 1. Drs. Mardhan
2. H.M. Djafar Mekoa, BA.

Masing-masing kelompok bertanggung jawabkan tugasnya dengan melaporkan data-data yang diperoleh dalam wilayah penelitiannya.

3. Pengolah data.

Pengolahan data terdiri dari keseluruhan anggota team peneliti ditambah dengan Ketua Aspek selaku Ketua Team Pengolah,

4. Penyusunan naskah.

Penyusunan naskah dilakukan oleh Drs. A. Djohan Mekuo yang sekaligus melakukan pengetikan naskah.

Khususnya Anggota Team Peneliti, sebelum turun ke lapangan penelitian, telah dibekali dengan pengetahuan siap tentang pendalaman materi, strategi penelitian, serta sebuah buku pegangan tentang Kerangka Dasar dan uraian permasalahan yang perlu dijaring dengan sejumlah quetioner yang ada hubungannya dengan materi naskah yang dibutuhkan.

Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan oleh team yang telah ditunjuk setelah persiapan-persiapan penelitian termasuk persiapan ilmu dianggap mantap.

Untuk pengumpulan data, team penelitian telah memilih penggunaan metode yang tepat dan sesuai dengan tema penulisan, yaitu:

1. Metode kepustakaan.

Metode ini dipergunakan dalam studi kepustakaan dengan maksud untuk meneliti dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya dengan tema dan materi penelitian. Penelitian kepustakaan juga bertujuan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan telah adanya publikasi atau dokumentasi aspek yang sama, sehingga duplikasi penelitian tidak akan terjadi.

2. Metode wawancara.

Metode ini telah umum dipergunakan dalam penelitian di daerah ini, sebab sangat kurang didapatkan adanya tulisan-tulisan berupa buku, majalah ataupun memory tentang kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara. Metode wawancara ialah suatu sistem atau cara memperoleh data secara lisan dari seorang informan. Pelaksanaan wawancara ini ditunjang oleh sejumlah pertanyaan yang telah dibuat sedemikian rupa agar dapat menjaring data yang relevan dengan tema/judul naskah.

3. Metode observasi.

Yaitu suatu metode yang dipergunakan peneliti dalam pengamatan langsung di lapangan, sehingga dengan metode ini akan lebih menjamin kebenaran data.

Tahap Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data dilaksanakan setelah penelitian lapangan selesai dilaksanakan. Pengolahan data adalah suatu kegiatan menyeleksi, mengklasifikasikan dan menganalisa data yang masih mentah dengan tujuan untuk mendapatkan data yang murni dan relevant dengan judul naskah. Data yang masih kurang diusahakan untuk dilengkapi dengan cara mengadakan pengecekan kembali di lapangan (penelitian kedua).

Tahap Penyusunan Naskah.

Setelah pengolahan data selesai dimana data-data mentah telah diseleksi dan diorganisir menurut relevansinya dengan bagian-bagian dari kerangka laporan, maka kegiatan penyusunanpun segera dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk penulisan yang terdapat dalam TOR Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan. Sistematika laporan adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal mengenai; masalah, tujuan, ruang lingkup dan prosedur penelitian serta pertanggung jawaban ilmiah.

Bab II, Identifikasi. Pada bab ini diuraikan secara mendetail tentang identifikasi Desa Benua dan Kelurahan Inalahi yang merupakan sample dari desa-desa yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara.

Bab III, Gambaran Umum Kepemimpinan Di Dalam Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tenggara. Di dalam bab ini diuraikan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan di dalam masyarakat pedesaan Sulawesi Tenggara, baik yang berperan sekarang ini, maupun yang pernah tumbuh dan dialami oleh masyarakat pedesaan di masa lampau. Demikian pula tentang sistem kepemimpinan di masing-masing organisasi tersebut.

Bab IV, Pola Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Di Bidang Sosial. Pada bab ini diuraikan beberapa jenis organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat di pedesaan sekarang ini, baik organisasi formal yang dibentuk dan diligitimasi pemerintah, maupun organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri atas persetujuan kelompok pendukungnya.

Bab V, Pola Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Di Bidang Ekonomi. Bab ini memuat uraian dari beberapa organisasi yang bergerak di bidang ekonomi masyarakat.

Bab VI, Pola Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Di Bidang Agama. Di dalam bab VI ini diuraikan pula bentuk-bentuk, fungsi dan peranan organisasi keagamaan di dalam masyarakat.

Bab VII, Pola Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Di Bidang Pendidikan. Bab ini memuat uraian jenis-jenis organisasi kependidikan dan peranannya di dalam pengembangan/peningkatan pengetahuan masyarakat di pedesaan.

Bab VIII, Beberapa Analisa. Di dalam bab ini diuraikan secara singkat hasil penganalisaan keadaan kemasyarakatan di desa dalam hubungan pengaruh timbal balik antara; kepemimpinan dengan kebudayaan, kepemimpinan dengan sistem administrasi politik nasional, serta hubungan antara kepemimpinan di desa dengan pembangunan nasional.

Bab IX Penutup. Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

IDENTIFIKASI

DESA BENUA DAN KELURAHAN INALAH

LOKASI

Desa Benua dan Kelurahan Inalahi adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wawotobi Kabupaten Kendari. Desa/Kelurahan tersebut di atas dijadikan lokasi penelitian dan pengumpulan data Sistem Kepemimpinan di Dalam Masyarakat Pedesaan Sulawesi Tenggara.

Desa Benua yang terletak jauh dari ibu kota kecamatan, dijadikan sebagai sample dari desa-desa lainnya yang jaringan komunikasinya masih sederhana bila dibandingkan dengan desa/kelurahan di perkotaan, sedang Kelurahan Inalahi yang berada di wilayah kota kecamatan akan dapat memberikan gambaran tentang pola hidup masyarakat desa di perkotaan.

A. DESA BANUA

1. Letak dan Keadaan Geografis.

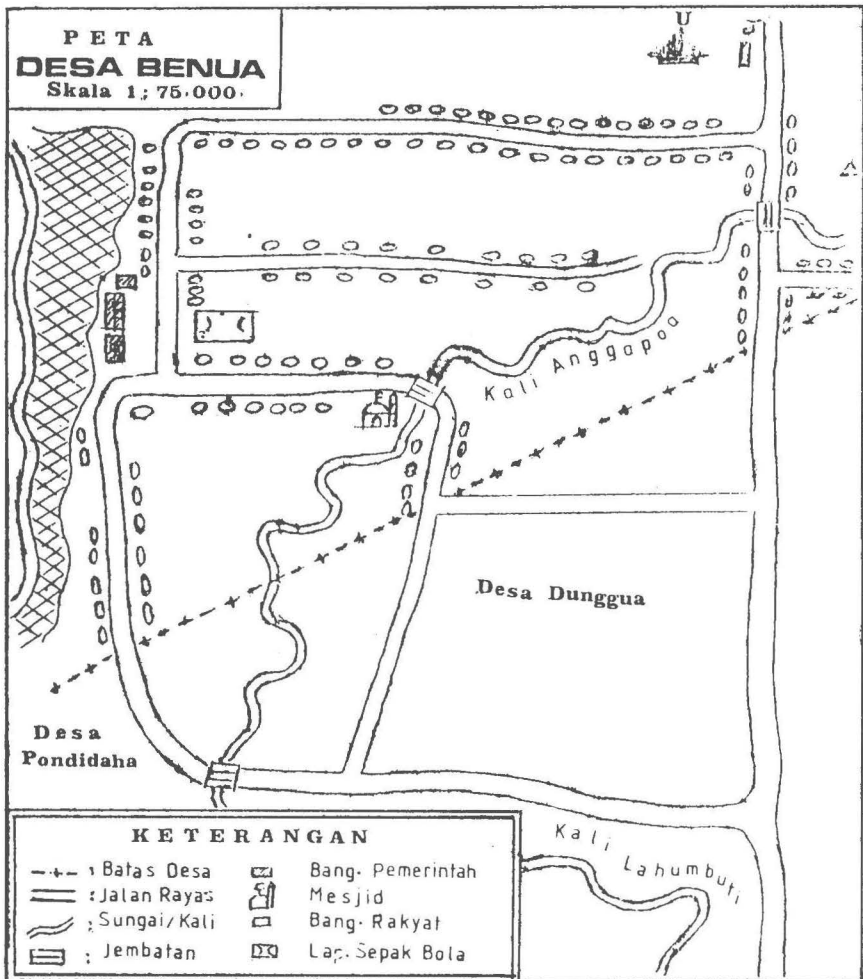
Desa Benua yang dahulunya dinamakan Desa Amonggedo terletak di bagian Timur Wilayah Kecamatan Wawotobi dan sekaligus menjadi tapal batas antara Kecamatan Wawotobi dengan wilayah Kecamatan Sampara. Jauhnya dari ibu kota kecamatan kurang lebih 22 Km.

Desa Benua dibatasi oleh :

- Sebelah Utara, dengan wilayah pegunungan Kecamatan Lasolo;
- Sebelah Selatan. dengan Desa Dunggua;
- Sebelah Timur, dengan Gunung Lalombonda (wilayah Kecamatan Sampara);
- Sebelah Barat, dengan Kali Lahumbuti.

Keseluruhan wilayah Desa Benua terdiri dari tanah dataran rendah yang diapit oleh gunung dan kali besar, sehingga wilayahnya sangat cocok untuk lahan pertanian.

Gambar 4 : Situasi Wilayah Desa Benua
Keadaan Tahun 1983



2. Keadaan Alamnya.

Lingkungan alam desa ini terdiri dari tanah datar yang berselimutkan hutan rimba seolah-olah hamparan lembah yang membentang dari Barat ke Timur, yaitu dari tepian kali Lahumbuti sampai ke kaki gunung Lalombonda. Sungai Anggapoo yang tiada pernah kering di musim panas, merupa-

kan tulang punggung yang membelah dua wilayah Desa Benua. Demikian pula keberadaan kali Lalumbuti di tapal batas bagian Barat desa ini senantiasa membawa kesuburan tanah Desa Benua.

Sebelum datangnya para transmigran dari pulau Jawa dan Bali, bagian barat dan timur desa ini ditutupi oleh hutan rimba yang lebat, sehingga Desa Benua hingga tahun 1982 terkenal sebagai penghasil kayu bayam, kayu besi dan ponto.

Dalam kondisi alam yang demikian ini, Desa Benua terkenal pula sebagai penghasil madu terbaik di Daerah Sulawesi Tenggara, sebab madunya terdiri dari sari-sari bunga kayu besi.

Binatang-binatang liar seperti rusa, anoa, kerbau liar, babi dan jenis-jenis burung adalah merupakan bagian dari kekayaan alam di Desa Benua sejak dahulu. Akan tetapi setelah hutan-hutan di desa ini diolah dan dijadikan lokasi pemukiman para transmigran maka lingkungan alam desa inipun berubah wajah menjadi tempat pemukiman penduduk baru dengan rumah-rumah yang kecil serta sedikit lahan kering yang hampir-hampir tidak berproduksi lagi. Binatang-binatang liar penghubi rimba di sekitar desa ini menjadi buyar mencari tempat pemukiman yang baru. Beberapa jenis tanaman rakyat di desa ini, seperti; kelapa, durian, langsung, mangga dan rumpun sagu ikut tergusur di dalam pengolahan wilayah pemukiman transmigran, sedang tanaman-tanaman tua di sekitar rumah penduduk hampir punah ditelan oleh musim kemarau yang terlampaui panjang.

B. Kelurahan Inalahi.

1. Letak dan Geografis.

Kelurahan Inalahi terletak di wilayah ibu kota Kecamatan Wawotobi. Luas wilayahnya : 600 Ha. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Kulahi;
- Sebelah Selatan dibatasi oleh Kelurahan Wawotobi;
- Sebelah Timur, dibatasi oleh Desa Kasupute;
- Sebelah Barat, dibatasi oleh Desa Kulahi;

Pada zaman Kerajaan Konawe dahulu, wilayah Kelurahan Inalahi secara administratif termasuk wilayah ibu kota kerajaan, sebab letaknya tidak jauh dari Unaaha yang merupakan ibu kota Kerajaan Konawe.

Keadaan morfologi atau permukaan tanah Kelurahan Inalahi sebagian besarnya terdiri dari tanah datar yang memanjang dari Timur ke Barat, seakan-akan menjadi tulang punggung wilayah Kecamatan Wawotobi.

Keadaan tanahnya cukup subur dan sangat cocok untuk lahan pertanian. Sejak dahulu kampung/desa-desa di sekitar pusat kerajaan telah terkenal sebagai penghasil beras yang terbesar di Daerah Kendari. Demikianlah keadaannya Kerajaan Konawe di zaman pemerintahan Raja *Tebawo* yang terkenal sebagai penghasil padi dan mampu melayani kebutuhan daerahnya maupun kerajaan-kerajaan tetangga yang mempunyai hubungan baik dengan pemerintahan Kerajaan Konawe.

Dari istilah *Inalahi* dapat diketahui bahwa wilayah Kelurahan Inalahi dahulunya adalah merupakan daerah pertanian, sebab istilah *inalahi* dalam bahasa daerah Kendari (bahasa Tolaki) diartikan sebagai wilayah hutan rimba yang diolah secara tradisional (*nialahi*), kemudian dijadikan perladangan penduduk. Secara besar-besaran (Inf. :7). Untuk jelasnya dapat dilihat pada peta situasi kelurahan tersebut.

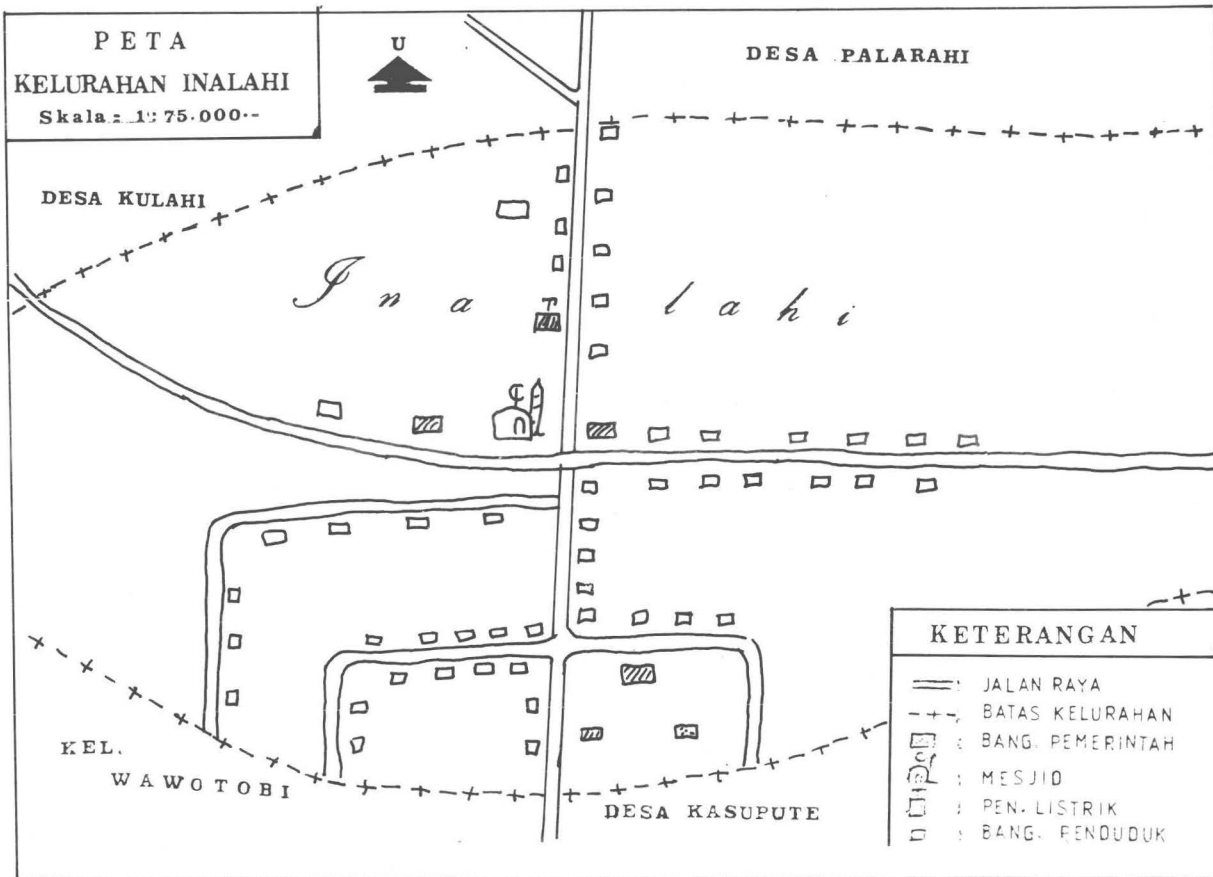
2. Lingkungan Alam.

Sebagaimana halnya dengan desa-desa lain di daerah Kabupaten Kendari, maka Kelurahan Inalahi inipun dahulunya terdiri dari hutan rimba yang lebat.

Sebelum wilayah ini dijadikan tempat pemukiman penduduk, lokasi kelurahan ini telah dijadikan *walaka*, yaitu lokasi pemeliharaan ternak kerbau (Inf.)

Sekarang ini hutan rimba tropis telah dirombak dan digantikan dengan tanaman-tanaman komoditi serta bangunan-bangunan rumah penduduk, kantor, pasar dan lain-lain.

Kurang lebih $\frac{3}{4}$ dari wilayah Kelurahan Inalahi sekarang ini dijadikan lahan pertanian penduduk, sehingga sebagian besar dari penduduknya terdiri dari petani yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada hasil-hasil pertanian mereka.



Sebaliknya dengan kondisi wilayah yang demikian itu, binatang-binatang liar yang dapat dikonsumsi oleh penduduk seperti; kerbau liar (*kiniku lambu*), rusa dan anoa tidak dapat bertahan lagi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging, beberapa orang penduduk mengadakan peternakan sapi, kerbau dan kambing.

3. Pola Perkampungan.

Sejarah perkampungan penduduk di Daerah Kendari dimulai sejak datangnya orang-orang Tolaki di daerah tersebut. Orang Tolaki yang merupakan penduduk asli dari sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara adalah petani turun temurun. Mereka inilah yang telah meletakkan dasar yang fundamental dari terbentuknya desa-desa/perkampungan di Daerah Kendari dan Kolaka. Sejarah pertumbuhan perkampungan suku Tolaki dimulai dari terbentuknya kelompok-kelompok petani ladang di lokasi yang paling kecil sampai kepada terbentuknya desa/kelurahan yang lebih luas dan kompleks. Sebagai suatu proses pertumbuhan yang berkesinambungan, maka oleh orang-orang Tolaki di dalam menata lingkungan perkampungannya mengemban 3 pola perkampungan, yaitu :

- Pola perkampungan menyebar.
- Pola perkampungan mengelompok padat.

Pola perkampungan menyebar yang terdiri dari kelompok kecil yang beranggotakan beberapa keluarga, adalah merupakan sistem pemukiman yang paling mendasar. Sistem perkampungan yang demikian itu terjadi di sekitar abad VII dan berakhir di saat Pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Daerah Kendari. Sebagai masyarakat petani, orang-orang Tolaki mempunyai tradisi kehidupan berkelompok dan berusaha bersama di bidang pertanian ladang yang disebut *mondau*.

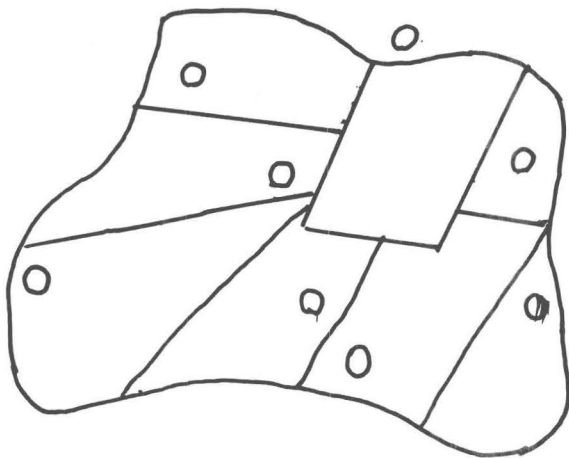
Sistem kelompok usaha ladang ini disebut *metobu*. Dari istilah *metobu* inilah lahir suatu komunitas terkecil di kalangan masyarakat Tolaki yang disebut *Tobu*, yaitu suatu wilayah pemukiman yang sama kedudukannya dengan kampung atau desa sekarang ini.

Pada pola perkampungan menyebar ini, masyarakat setempat membangun rumah-rumah mereka sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai yaitu untuk kelancaran piker-

jaan pokoknya. Oleh karena itu mereka mendirikan rumah di tengah-tengah ladang/kebun mereka (Inf. : 31).

Dalam kondisi perkampungan menyebar ini yang jumlah anggota masyarakatnya sangat sedikit, tidak memungkinkan untuk membangun jalan-jalan raya. Antara kelompok Tobu yang satu dengan kelompok lainnya sangat jarang terjadi saling mengunjungi, sehingga cukup dihubungkan dengan jalan-jalan setapak.

Gambar : 6 Sketsa Perkampungan menyebar
(Tobu)



Letakan rumah-rumah penduduk tidak beraturan. Antara mereka pun jarang untuk saling mengunjungi, kecuali pada peristiwa-peristiwa penting atau pada saat-saat kerja gotong royong di salah satu keluarga.

Keterangan :

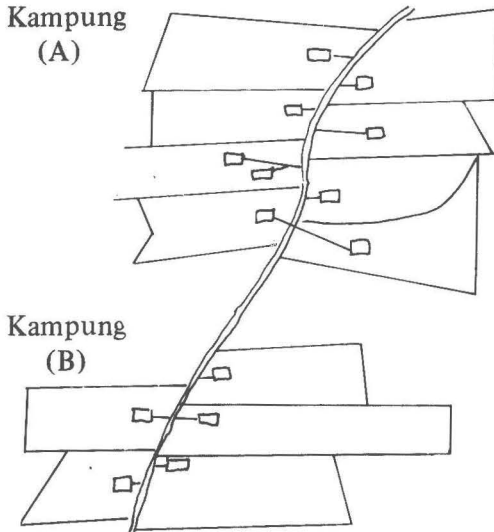
1. : Lahan Keluarga.
2. : Rumah Penduduk.

Di dalam perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin pesat dan terdorong oleh kebutuhan untuk hidup bersama, maka orang-orang Tolaki mulai menyadari pentingnya bentuk perkampungan yang lebih teratur serta sarana perhubungan yang lebih memadai.

Sejak itulah orang-orang Tolaki mulai merintis pola hidup bersama di dalam suatu lingkungan masyarakat yang lebih luas. Lokasi pemukiman yang tadinya hanya berbentuk tobu, berkembang menjadi wilayah perkampungan yang lebih besar. Pada perkampungan

yang demikian ini kemudian melahirkan kampung-kampung kecil yang oleh orang-orang Tolaki disebutkan *okambo*.

Gambar : 7 Sketsa Perkampungan yang sudah Menetap (Kambo)



Pada perkampungan yang sudah menetap ini, penduduk membangun rumah kediaman mereka di sekitar jalan yang menghubungkan antara rumah yang satu dengan rumah yang lain. Sehingga pola perkampungan menjadi memanjang letak rumah-rumah penduduk mulai teratur, meskipun tidak terletak dalam suatu garis lurus karena masih ditentukan oleh keadaan lahan pertanian mereka.

Keterangan :

1. : Jalan setapak.
2. : Rumah penduduk.

Dalam kondisi perkampungan yang demikian ini, suasana kekeraiban semakin nampak. Mereka sudah memerlukan suatu organisasi yang teratur, yaitu Kampung. Mereka memerlukan pula adanya Pemimpin serta aturan-aturan yang mengikat keseluruhan warga kampung. Pemimpin di suatu kampung disebut *Kapala Kambo* (Kepala Kampung).

Di Desa Benua sejak sebelum pemerintahan Belanda telah berbentuk beberapa wilayah perkampungan, yaitu :

- Kampung Woerahi
- Kampung Puasana
- Kampung Anahinunu
- Kampung Benua.

Demikian pula di wilayah sekitar Kerajaan Konawe dahulu telah

terbentuk kampung-kampung tua, seperti :

- Kampung Inolobu
- Kampung Kulahi
- Kampung Analahumbuti
- Kampung Meluhu
- Kampung Kasupute
- Kampung Palarahi
- Dan beberapa kampung lainnya.

Setelah Belanda menguasai keseluruhan wilayah Kerajaan Konawe, mereka pun membuat jalan yang dapat dilalui kendaraan. Kelompok-kelompok masyarakat yang tadinya masih terpisah-pisah, dipindahkan ke perkampungan baru di sekitar jalan yang dibuat oleh Pemerintah Belanda (Inf.: 13). Pembangunan rumah-rumah penduduk dilaksanakan secara serentak, meskipun mereka juga mempunyai rumah di wilayah perladangan masing-masing. Bentuk rumah penduduk di zaman itu adalah rumah panggung yang berukuran kecil. Kecuali rumah Kepala Kampung dibuat lebih besar secara gotong royong oleh masyarakat bawahannya.

Setelah Indonesia merdeka, dimana bangsa Indonesia berkewajiban untuk membangun rumah tangga sendiri, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, desa-desa dalam wilayah Republik Indonesia, mulai membangun dirinya. Akan tetapi karena kondisi masyarakat pedesaan yang sudah remuk oleh pemerasan penjajah Belanda, tidak semudah untuk bangkit kembali. Bahkan beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Wawotobi mengalami kehidupan yang lebih krisis di sekitar tahun 1955 – 1963, akibat perbuatan gerombolan DI/T.I.I. yang telah membakar habis rumah-rumah rakyat serta merusak sarana penghidupan masyarakat (Inf. 31).

Dengan demikian maka penataan kembali perumahan penduduk pedesaan dalam wilayah kecamatan Wawotobi mutlak baru dimulai sejak tahun 1966, yakni setelah masyarakat terlepas dari ancaman kekacauan yang berlangsung terus-menerus.

Pembangunan nasional yang dicanangkan dalam Pelita baru mulai menyentuh kehidupan masyarakat di pedesaan pada tahun 1970. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat di pedesaan untuk lebih mampu membangun dirinya, sebab kenyataannya sampai pada awal Pelita I masyarakat di pedesa-

an belum juga dapat berbuat lebih banyak sesuai yang diharapkan pemerintah.

Desa Benua khususnya dan beberapa desa lainnya di wilayah Kecamatan Wawotobi, hingga Pelita II baru berada dalam taraf penataan rumah-rumah penduduknya. Sebelumnya rumah-rumah penduduk masih tersebar di sepanjang jalan setapak yang menghubungkan kebun-kebun atau tempat perladangan mereka.

Beberapa tahun terakhir ini, dengan adanya Instruksi Pemerintah Daerah tentang larangan perladangan liar yang kemudian disusul dengan kegiatan penertiban rumah-rumah penduduk, maka keadaan bangunan rumah penduduk di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Wawotobi sudah diatur sedemikian rapi di sepanjang jalan-jalan raya di desa.

Rumah-rumah panggung yang tadinya tidak beraturan letaknya kini telah berubah menjadi rumah-rumah tembok sekalipun dalam kondisi bangunan yang belum memadai.

Bangunan-bangunan pemerintah mulai nampak di desa-desa berkat adanya subsidi desa serta beberapa bagian pembangunan yang dialokasikan di desa. Khusus di Desa Benua hingga tahun 1982 telah terdapat beberapa buah bangunan permanen yang dibangun oleh pemerintah bekerja-sama dengan masyarakat setempat. Bangunan-bangunan itu antara lain adalah; Balai Desa, Sekolah Inpres, Mesjid, bendungan/pengairan dan lain-lain yang sifatnya merehabilitasi bangunan rakyat yang telah ada.

Demikian pula di Kelurahan Inalahi sebagai salah satu desa yang berada di lingkungan ibukota Kecamatan di mana selain jenis-jenis bangunan seperti yang disebutkan di atas, terdapat pula bangunan-bangunan tingkat kecamatan seperti, gedung Madrasah-Tznanawiyah, Penerangan Listrik dan lain-lain.

PENDUDUK.

Telah diuraikan terlebih dahulu bahwa suku Tolaki adalah merupakan penduduk asli di daerah Kabupaten Kendari dan Kabupaten Kolaka. Suku Tolaki adalah kelompok etnis yang terbesar jumlahnya di Daerah Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1983, diperkirakan bahwa jumlah suku Tolaki di kedua daerah kabupaten tersebut telah mencapai sekitar 350.250 jiwa.

Pada umumnya orang-orang Tolaki ini membentuk perkampung-

an di sepanjang jalan raya yang menghubungkan antara ibukota Kabupaten Kendari dan Kabupaten Kolaka. Sebagian dari mereka itu menempati jalan-jalan desa yang menghubungkan antara desa dan ibukota kecamatan. Bahkan ada di antara mereka itu yang mendiami lereng-lereng gunung dan pantai.

Di Desa Benua dan kelurahan Inalahi 97% penduduknya terdiri dari suku Tolaki. Suku Tolaki inilah yang merupakan penduduk asli di desa/kelurahan tersebut. Penduduk pendatang di Desa Benua hanya terdiri dari beberapa orang yang asal usul kedatangannya berasal dari Sulawesi Selatan (suku Bugis dan Selayar), dari pulau Jawa dan Kabupaten Muna. Masuknya mereka itu sebagai penduduk Desa Benua disebabkan oleh perkawinan mereka dengan penduduk asli di desa tersebut.

Di kelurahan Inalahi terdapat 40 kepala keluarga penduduk pendatang. Sebagian besar dari suku pendatang itu berasal dari Sulawesi Selatan. Dua kepala keluarga di antaranya berasal dari Kabupaten Muna.

Secara terperinci dapat didatakan sebagai berikut :

— Suku Selayar	30 Kk.
— Suku Bugis,	7 Kk.
— Suku Toraja,	1 Kk.
— Suku Muna,	2 Kk.
Jumlah suku pendatang	40 Kk.

1. Asal-usul Penduduk.

Berbicara tentang asal-usul penduduk asli di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi, akan lebih tepat bila diriwayatkan secara singkat latar belakang sejarah kedatangan suku Tolaki di Daerah Sulawesi Tenggara.

Menurut tradisi orang-orang Tolaki, mereka itu mengaku berasal dari daerah sekitar Danau Towuti dan Matana di perbatasan wilayah Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Tengah. Oleh karena itu mereka menganggap dirinya serumpun dengan suku To Bungku, Toili, Tomori dan Menui di Sulawesi Tengah.

Di dalam pengelompokan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, bahasa Tolaki termasuk dalam kelompok bahasa *Bungkulaki* (To Bungku dan Tolaki).

Kurang lebih sekitar abad VII, terjadi pergeseran penduduk dari daerah tiga danau di Sulawesi Tengah. Sebagian besar dari mereka itu berpindah ke arah selatan dan memasuki wilayah Sulawesi Tenggara di sekitar hulu sungai KonaweEha. Di sana mereka bermukim untuk sementara waktu. Tempat pemukiman mereka itu kemudian disebut *Andolaki* artinya tempat orang-orang Tolaki (Inf.: 8).

Dari tempat pemukiman sementara ini, mereka mendesak suku-suku tertua di daerah ini (suku Toaere dan Moronene), kemudian bergerak ke arah Tenggara, lalu menyebar ke seluruh pelosok wilayah Kabupaten Kendari. Pergeseran mereka itu mengikuti aliran sungai (*rumuru ala*) dan melintasi lereng-lereng gunung yang dalam bahasa Tolaki disebut *metete nggare osu*. Kelompok yang bergerak ke arah timur melintasi gunung dan kemudian menempati wilayah di sekitar pantai. Maka lahirlah perkampungan-perkampungan tua di pesisir pantai timur, yaitu antara lain; Kampung Mondeodo, Lasolo, Toreo, Puulemo, Lembo, Taipa, Kokapi, Pudonggala, Motui dan Boru-Boru. Kelompok yang bergerak ke arah selatan menyusuri kali Konawe Eha kemudian membentuk perkampungan-perkampungan tua di pesisir kali KonaweEha.

Perpindahan penduduk dari negeri asal mereka tidak sekaligus, tetapi secara bergelombang dan berkelompok. Kelompok-kelompok dalam perpindahan itu disebut *lako mbaa-paa* (Inf.: 8)

2. Demografi Penduduk.

Jumlah penduduk Desa Benua menurut hasil sensus tahun 1981/1982, berjumlah 732 jiwa dengan 138 Kk.

Secara terperinci keadaan penduduk desa ini dapat diuraikan menurut jenis kelamin, tingkat umur, tingkat pendidikan, agama serta mata pencaharian mereka sebagai berikut :

a. Keadaan menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	359
2.	Perempuan	363
	Jumlah	722

b. *Keadaan penduduk menurut tingkat umur.*

No.	Tingkat Umur Tahun	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	68	60	128
2.	5 – 9	47	63	110
3.	10 – 14	40	41	81
4.	15 – 24	66	64	130
5.	25 – 49	106	105	211
6.	50 keatas	32	30	62
	Jumlah	359	363	722

Sumber : Daftar potensi Desa Benua Tahun 1982.

c. *Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan.*

No.	Jenis Pendidikan	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Perguruan Tinggi	17	5	22
2.	S.M.T.A.	59	36	95
3.	S.M.T.P.	47	35	82
4.	Sekolah Dasar	161	94	255
5.	Putus Sekolah	31	57	88
6.	Kursus B. Huruf.	26	21	47
7.	Buta Huruf	11	32	43

Sumber : Daftar Potensi Desa Benua Tahun 1982.

d. *Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian :*

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	26
2.	Petani	365
3.	Pengusaha kecil/tukang	18
4.	Tidak bekerja	293
5.	Tidak dapat bekerja	20
	Jumlah	722

Kelurahan Inalahi memiliki jumlah penduduk yang lebih besar daripada Desa Benua dan desa-desa lainnya dalam wilayah kecamatan Wawotobi. Menurut keadaan tahun 1982, penduduk Kelurahan Inalahi berjumlah 1.067 jiwa yang terdiri dari 110 kepala keluarga dengan keadaannya sebagai berikut :

a. *Keadaan penduduk menurut jenis dan tingkat umur :*

No.	Tingkat Umur Tahun	Laki	Peremp.	Jumlah	Ket.
1.	0 – 4	73	67	140	
2.	5 – 9	149	111	260	
3.	10 – 24	134	146	280	
4.	25 – 54	141	179	320	
5.	55 keatas	22	45	67	
	Jumlah	519	548	1.067	

Sumber : Papan Data Kelurahan Inalahi Tahun 1982.

b. *Keadaan penduduk menurut Agama/kepercayaan.*

No.	Agama/kepercayaan	Penganut	Keterangan
1.	I s l a m	1.032	
2.	Keristen	35	

Sumber : Papan Data Kelurahan Inalahi Tahun 1982.

c. *Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan.*

No.	Tingkat Pendidikan	Laki	Peremp.	Jumlah	Ket
1.	Sarjana	—	—	—	
2.	Sarjana Muda	—	—	—	
3.	S.M.T.A.	41	15	56	
4.	S.M.T.P.	57	14	71	
5.	S.D.	85	42	127	
6.	Putus Sekolah	43	72	115	
	Jumlah	226	143	369	

Sumber : Papan data Kelurahan Inalahi Tahun 1982.

d. *Keadaan penduduk menurut mata pencaharian.*

No.	Jenis Mata Pencaharian	Banyaknya	Ket.
1.	Pegawai Negeri	25	
2.	Pedagang Kecil	21	
3.	Petani	320	
	Jumlah	366	

Sumber : Papan data Kelurahan Inalahi Tahun 1982.

Dalam hal mobilitas penduduk, tradisi nenek moyang suku Tolaki sebagai petani ladang yang berpindah-pindah kini berubah menjadi petani menetap dengan peralatan yang lebih modern. Lapangan pekerjaan bagi penduduk di pedesaan semakin terbuka karena adanya pemerataan pembangunan di tanah air. Generasi muda kalangan suku Tolaki yang dahulunya dikungkung oleh tradisi yang ketat kini tergerak ke dalam aktivitas pendidikan dan berpartisipasi dalam pengembangan kebudayaan. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan senantiasa merobah strata sosial dalam masyarakat serta mengangkat derajat setiap warga masyarakat pedesaan yang mau berusaha meningkatkan taraf hidupnya.

Perpindahan beberapa orang penduduk Desa Benua dan Kelurahan Inalahi ke kota Kabupaten atau Propinsi, merupakan suatu dorongan untuk mencari dan menemukan kehidupan yang lebih maju, atau karena akibat perubahan status dirinya dari petani penggarap menjadi Pegawai Negeri atau pengusaha.

Para siswa dan pelajar yang telah menyelesaikan studinya di daerah, berlomba-lomba untuk melanjutkan pendidikan ke luar daerah Sulawesi Tenggara. Maka tidaklah mengherankan apabila di daerah-daerah pusat pendidikan seperti; di pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, terdapat orang-orang Tolaki yang bermukim di sana secara sementara ataupun menetap.

Di samping itu dengan bertambah lancarnya komunikasi antara kota dan wilayah pedesaan, para penduduk desa lebih mudah berdagang ke kota kemudian kembali membawa barang-barang dan sejumlah pengalaman ke desanya.

Sekarang ini masyarakat pedesaan di Daerah Sulawesi Tenggara khususnya di wilayah penelitian Team, telah ikut berpar-

tisipasi aktif dalam menunjang Program Pemerintah, seperti pelaksanaan Program Keluarga Berencana, Program Kewajiban Belajar dan pembangunan fisik lainnya.

SEJARAH PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan desa ialah suatu wilayah setempat yang merupakan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa di dalam pembatasan umum diartikan sebagai suatu kesatuan interaksi antara wilayah, masyarakat dan pemerintahannya. (Dra. Sumber Saparin, 1977 ; 117).

1. Latar Belakang Sejarah Terbentuknya Desa.

Desa sebagai nama dari suatu komunitas kecil dalam wilayah pemerintahan Indonesia sekarang ini, telah ada sejak zaman Pra-Hindu di Indonesia. Desa-desa di Indonesia adalah merupakan produk pertumbuhan sejarah yang telah terbilang abad lamanya.

Terbentuknya desa sebagai tempat pemukiman dari sekelompok manusia, disebabkan karena naluri manusia yang dikodratkan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia selalu berusaha memperkembangkan diri serta mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam proses interaksi sosial manusia sebagai makhluk sosial tidak melepaskan dirinya dari kelompok manusia lainnya, sebab tanpa orang lain manusia tak mungkin dapat mempertahankan hidupnya. (R. Soeparmo, 1977 ; 12)

Oleh karena itu apabila kita akan membahas masalah terbentuknya desa khususnya di wilayah pedesaan Sulawesi Tenggara, kita akan dapat melepaskan penguraian tentang proses pembentukan kelompok pemukiman sebagai sendi terbentuknya desa. Pengertian kelompok di sini ialah suatu kesatuan dari dua atau lebih individu, yang mengalami interaksi psikologik satu sama lain (Anderson dan Parker. 1964 : 117)

Istilah "Desa" belum menyeluruh dipergunakan di wilayah Indonesia, sebab masing-masing daerah memberikan nama desa sesuai istilah dalam bahasa daerahnya sendiri.

Di Daerah Kendari, orang-orang Tolaki menamakan desa dengan istilah "*okambo*" (Kampung), sedang kelompok pemukiman mereka namakan *tobu*.

a. *Asal Usul Desa Benua*

Sebagaimana yang diuraikan di muka, bahwa akibat dari pergeseran penduduk di bagian Selatan pulau Sulawesi, maka lahirlah perkampungan-perkampungan tua di pesisir pantai timur daerah Kabupaten Kendari. Di antara perkampungan-perkampungan tua itu, Desa Lembo telah mengalami perkembangan yang amat pesat.

Akan tetapi di sekitar abad XVII, desa-desa pantai mulai mendapat tekanan musuh dari daerah-daerah tetangga terutama oleh bajak laut dari kerajaan Banggai, Ternate dan Maluku. Akhirnya pada permulaan abad XVIII, yaitu pada masa kekuasaan *Kapita Mayoro* Mekuo sebagai Panglima Angkatan Laut Kerajaan Konawe yang berkedudukan di Lembo, terjadilah perpindahan penduduk dari Desa Lembo ke arah Barat dan menempati wilayah sekitar kali Abenua.

Di tempat yang baru itu mereka membentuk kelompok-kelompok pemukiman yang didasarkan atas ikatan keluarga yang disebut *paa-paa*. Kelompok-kelompok pemukiman itu mereka namakan *wonua* yang statusnya sama dengan kampung atau desa. Maka tercatatlah adanya :

- wonua Mendikonu
- wonua Anahinunu
- wonua Wowandawahuko
- wonua Ura-ura
- wonua Ambedahaia
- wonua Laiue.

Pada masa itu pola perkampungan penduduk Benua masih menyebar. Antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain terpisah jauh. Komunikasi antar kelompok hanya dihubungkan dengan jalan setapak, sehingga antara mereka tidak terlalu sering untuk saling mengunjungi.

Dua abad kemudian yaitu sekitar awal abad XX, Pemerintah Belanda menguasai keseluruhan wilayah Kerajaan Konawe. Perkampungan penduduk yang menyebar di kaki-kaki gunung dan disekitar tepi sungai, dipindahkan dan diatur di sepanjang jalan baru yang dibuat oleh Pemerintah Belanda (Inf. : 13)

Sejak itu penduduk yang mendiami sekitar Kali Benua dipindahkan di sepanjang jalan yang menghubungkan Desa Meluhu dengan Desa Benua sekarang. Dalam perpindahan To Benua ke tempat pemukiman yang baru ini, penduduk Wonua Mendikonu dan penduduk Anahinunu bergabung menjadi satu dan menempati Kampung Woerahi. Kelompok Ambedahaia menjelma menjadi Kampung Puasana, sedang Wonua Laiue menjelma menjadi Kampung Abenua. Dengan demikian akibat adanya pemukiman kembali ini kelompok To Benua yang tadinya terdiri dari 6 kelompok menjelma menjadi 4 buah kampung seperti yang tersebut di atas. Karena penduduk ke empat kampung di atas mendiami pesisir Kali Benua, maka mereka pun disebut *To Benua* yang artinya orang-orang yang berasal dari Kampung Benua.

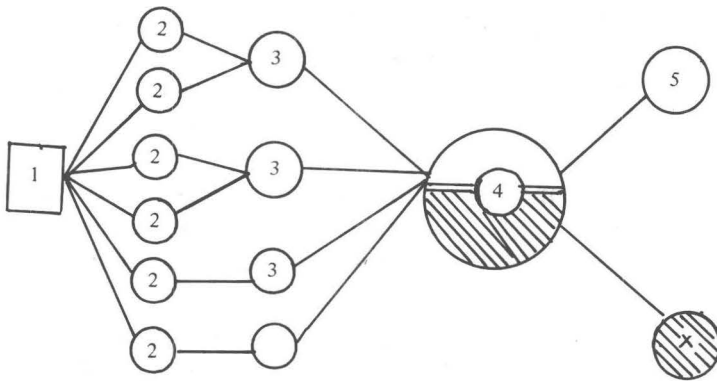
Selanjutnya setelah terjadi revolusi di bidang pertanian, yaitu perobahan sistem pertanian ladang secara sederhana menjadi sistem pertanian menetap dengan peralatan yang lebih maju, maka *Konggoasa* yang pada saat itu menjabat Pati di Daerah Kendari memindahkan To Benua ke salah satu lokasi pertanian yang kemudian disebut Desa Amonggedo. (Inf. : 14)

Dalam perkembangan Desa Amonggedo sejak dari tahun 1918, penduduknya menjadi pesat sekali dimana hingga tahun 1979 penduduknya telah mencapai 1671 jiwa, Keadaan ini disebabkan karena penduduk Desa Amonggedo meliputi keseluruhan penduduk yang bermukim di 4 buah kampung, yaitu; Anahinunu, Woerahi, Puasana dan Benua.

Akhirnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979, Desa Amonggedo dipecahkan menjadi dua, yaitu :

- Desa Amonggedo I yang kemudian dinamakan Desa Benua dan
- Desa Amonggedo II yang kemudian diberi nama Desa Dunggu.

Demikianlah proses terbentuknya Desa Benua sebagai suatu proses sejarah yang sistematikanya dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Keterangan :

1. Desa asal (Desa Lembo)
2. Kelompok Pemukiman I (Wonua)
3. Kelompok Pemukiman II (Kampung)
4. Lokasi Resetlemen (Desa Amonggedo)
5. Pemecahan Desa (UU. RI No. 5 Tahun 1979)
- X. Desa Sample (Desa Benua).

Wilayah Desa Benua dan Desa Dungua seperti terlihat pada peta di muka adalah wilayah Desa Amonggedo sebelum terjadinya pemecahan desa seperti yang tersebut di atas.

b. Terbentuknya Kelurahan Inalahi

Sebagaimana halnya dengan proses terbentuknya Desa Benua dan desa-desa lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara, maka Kelurahan Inalahi pun memulai sejarah pembentukannya dari awal terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat di daerah Kendari.

Pada bab sebelumnya telah disinggung tentang proses pergeseran penduduk dari arah utara serta akibat-akibat selanjutnya yang timbul karena pergeseran tersebut. Sebagian dari mereka yang bergeser ke arah selatan dengan menyusuri Kali KonaweEha akhirnya membentuk kelompok-kelompok pemukiman di sekitar wilayah Kecamatan. Unaaha dan Wawotobi sekarang ini.

Di sekitar tahun 1912, datanglah orang-orang Belanda di Daerah ini dan menyusun pemerintahannya. Kelompok pe-

mukiman penduduk yang tersebar dan sukar diatur, dipersatukan dan diatur di sepanjang jalan raya yang mudah dilalui kendaraan. Sejak itulah terbentuk wilayah perkampungan yang merupakan cikal bakal terbentuknya desa-desa seperti yang kita lihat sekarang ini.

Kelompok-kelompok keluarga yang berasal dari Loluwehuko, Singgere, Ranomelonggu, Korumba dan Lasiuti, berkumpul di satu tempat pemukiman baru yang kemudian diberi nama Kambo Inolobu (Inf. : 7)

Selanjutnya pada masa pemerintahan Kapita Lasandara (sekitar tahun 1930), dibentuklah beberapa wilayah perkampungan baru, yaitu :

1. Kampung Wawotobi
2. Kampung Inolobu
3. Kampung Kulahi
4. Kampung Palarahi
5. Kampung Anggotoa.

Pada tahun 1959 – 1963, Kampung Inalahi bergabung dengan Kampung Kulahi. Pada tahun 1964–1973, Kampung Inalahi berdiri sendiri sebagai suatu desa yang mengatur rumah tangganya sendiri. Di dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1981 – 1982 Desa Inalahi menjadi pusat pemerintahan Kelurahan Wawotobi. Akhirnya sejak tahun 1982, Inalahi yang menjadi pusat Kelurahan Wawotobi berdiri sendiri sebagai suatu kelurahan, sedang Wawotobi juga menjadi satu kelurahan dengan nama Kelurahan Wawotobi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka baik Kelurahan Wawotobi maupun Kelurahan Inalahi, berada di bawah pengurusan Pemerintah Wilayah Kecamatan Wawotobi (Inf. : 1)

2. Struktur Pemerintahan.

Secara nasional Pemerintah Desa di wilayah Sulawesi Tenggara telah mengalami tiga kali perubahan bentuk pemerintahan, yaitu :

- Pemerintahan tradisional (Zaman Pra-Kerajaan–Zaman Kerajaan)

- Pemerintahan Zaman penjajahan (Belanda – Jepang)
- Pemerintahan Zaman Kemerdekaan.

Masing-masing kurun waktu pemerintahan, mempunyai bentuk/struktur pemerintahan tersendiri. Untuk jelasnya di bawah ini akan diuraikan bentuk/struktur pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Kendari, sebagai gambaran umum pemerintahan desa yang berlaku di Daerah Sulawesi Tenggara.

a. *Zaman Pra–Kerajaan/Zaman Kerajaan.*

Meskipun di masing-masing daerah dalam wilayah Sulawesi Tenggara mempergunakan istilah yang berbeda di dalam memberikan nama pemerintahannya, namun secara garis besarnya struktur pemerintahan dari 4 daerah Kabupaten dalam wilayah Sulawesi Tenggara adalah sama.

Di Daerah Kabupaten Kendari dahulu, yaitu di zaman sebelum dan sesudah Kerajaan Konawe, Pemerintahan Desa dikenal dengan nama *Tobu* (Tobu = Kampung).

Tobu dikepalai oleh seorang *Tonomotuo* dan dibantu oleh beberapa orang pembantu yang terdiri dari :

- *Pabitara* (juru bicara)
- *Posudo* (bendahara)
- *Tolea* (duta adat)
- *Mbuoway* (urusan upacara adat)
- *Mbuakoy* (urusan kesehatan masyarakat)
- *Mbusehe* (urusan pemulihan sengketa)
- *Tamalaki* (urusan pertahanan keamanan)
- *Tusa Wuta* (urusan kesejahteraan rakyat).

Tonomotuo (orang yang dituakan) di dalam kedudukannya sebagai Pemimpin Tobu, melaksanakan pemerintahan di dalam wilayahnya dan bertanggung jawab kepada *Puutobu* selaku atasannya yang sama kedudukannya dengan seorang camat sekarang ini.

Pembantu-pembantu Tonomotuo seperti yang tersebut di atas, melaksanakan tugasnya masing-masing atas perintah Tonomotuo. Pemerintahan Tonomotuo dilaksanakan secara musyawarah.

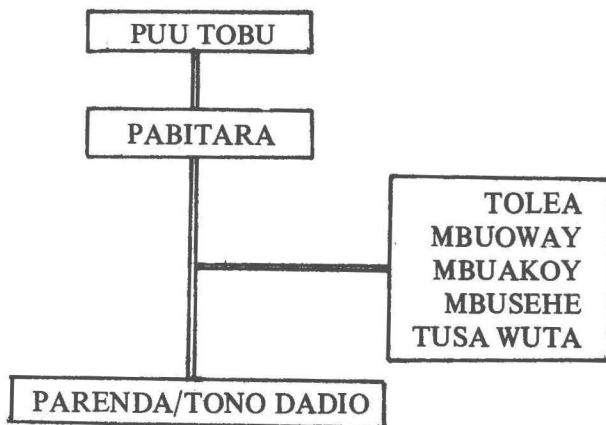
b. *Zaman Penjajahan (Belanda – Jepang).*

Kedua bentuk pemerintahan penjajah di atas (Belanda dan Jepang), menganut struktur pemerintahan yang sama. Pemerintah Jepang di masa pendudukannya di Daerah Sulawesi Tenggara, tidak merubah struktur pemerintahan desa yang ada, kecuali menguatkan kedudukan Kepala Kampung sebagai suatu kekuatan yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Jepang di pedesaan.

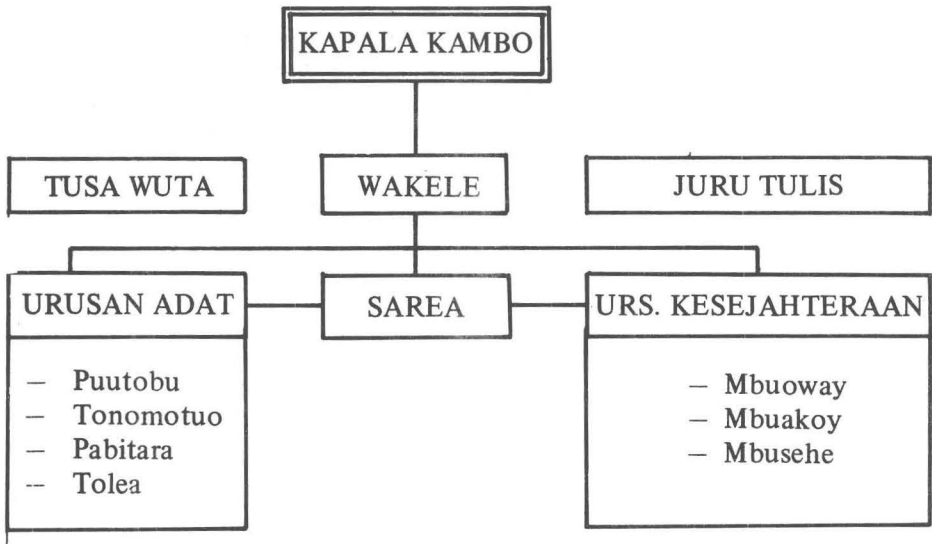
Pada masa pemerintahan Belanda di Daerah Kendari, selain mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat yang hidup menyebar, Belanda berusaha juga meletakkan dasar-dasar pemerintahan desa sebagai alat penguasaannya terhadap masyarakat di pedesaan.

Pemerintahan Tobu yang tadinya berada di bawah seorang Puu Tobu digantinya menjadi pemerintahan kampung di bawah seorang Kepala Kampung. Struktur Organisasi pemerintahan kampung dilengkapi dengan seorang Wakil (Wakele) dan beberapa aparat sebagai pembantunya. Puu Tobu dan Tono Motuo yang sedianya berfungsi sebagai Pimpinan Pemerintahan di desa, pada struktur baru bentukan Belanda, hanya merupakan Kepala-kepala Urusan yang berfungsi sebagai pembantu Kepala Kampung. Bandingkan kedua jenis struktur organisasi pemerintahan desa di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA (TOBU) DI ZAMAN KERAJAAN



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG DI ZAMAN PENJAJAHAN



Bagan organisasi Pemerintahan Kampung (Desa) seperti yang tergambar di atas, berlaku juga dalam Pemerintahan Jepang di wilayah pedesaan Sulawesi Tenggara.

c. *Zaman Kemerdekaan Indonesia*

Sesudah Indonesia Merdeka, keadaan pemerintahan di desa pun mengalami perubahan. Wowotobi dijadikan Distrik yang membawahi beberapa Kampung di sekitarnya. Kampung Kulahi berada di bawah koordinasi Kepala Distrik Wawotobi, sedang Kampung Benua dan beberapa kampung di sekitarnya berada di bawah kekuasaan Distrik Pondidaha. Kepala Kampung Amonggedo yang pada saat itu dijabat oleh *Leanda*, diangkat sebagai Wakil Distrik Pondidaha. Pimpinan Pemerintahan Desa Amonggedo dipegang oleh Moalahi dengan jabatan Ketua.

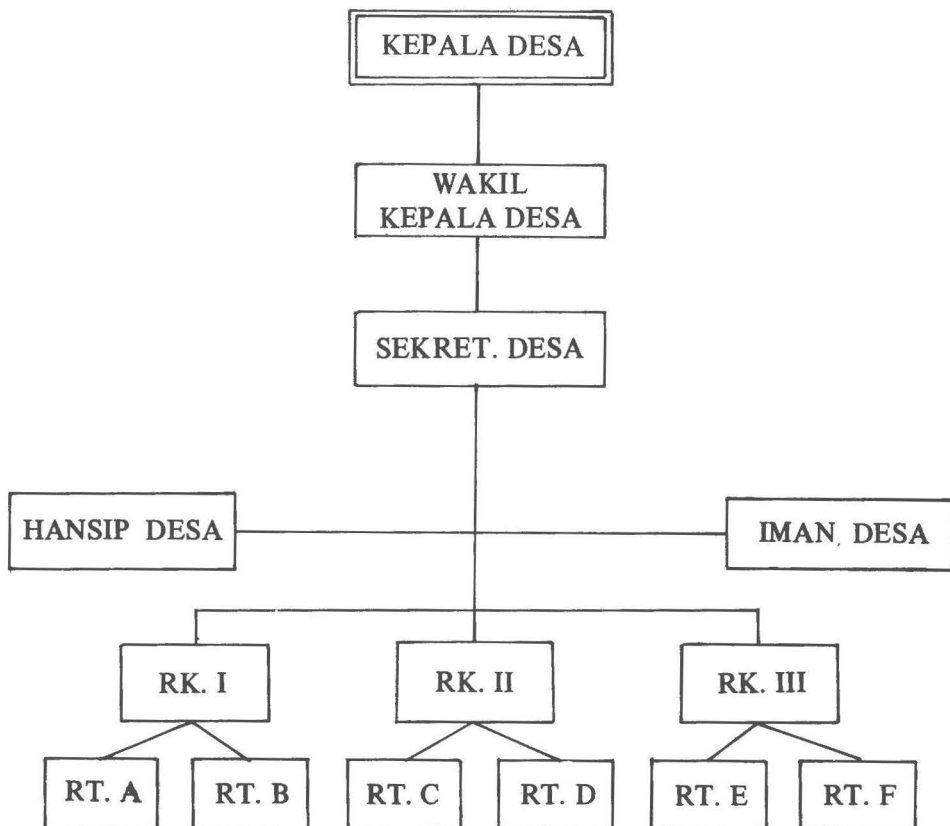
Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 13 yang mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan desa, maka kampung-kampung di daerah Sulawesi Tenggara berubah menjadi Desa.

Desa Benua dan Kelurahan Inalahi sebagai suatu komunitas kecil di Daerah Kendari, berada di bawah koordinasi Pemerintah Kecamatan Wawotobi.

Sebagai komunitas kecil, Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa (dahulu disebut Juru Tulis), Kepala Rukun Kampung, Kepala Rukun Tetangga, Hansip dan unsur-unsur pimpinan dalam desa.

Untuk sebagai gambaran dari struktur Pemerintahan Desa sekarang ini, dapat dilihat pada bagan Organisasi Pemerintahan Desa di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BENUA



LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

1 Kolektiva dan Elite-Elite Desa.

Masyarakat telah merupakan kelompok etnis terbesar jumlahnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Wilayah pemukimannya meliputi keseluruhan daratan semenanjung Sulawesi Tenggara, yaitu di daerah kabupaten Kendari dan kabupaten Kolaka.

Suku-suku bangsa lain yang termasuk penduduk daerah Sulawesi Tenggara umumnya berdiam di pulau-pulau kecil sekitar pantai Timur daratan Sulawesi Tenggara.

Mereka terdiri dari beberapa suku sehingga jumlah masing-masing kelompok relatif kecil.

Orang-orang Tolaki diangkat sebagai penduduk asli di daerah Kenari karena mereka merupakan penduduk yang tertua di daerah tersebut.

Mereka itulah yang mendiami desa-desa serta kebudayaan mereka pula yang sangat menonjol sejak dahulu sampai sekarang.

Didalam masyarakat Tolaki sejak dahulu sampai kini telah ada kelompok-kelompok yang menonjol, dan kelompok-kelompok inilah yang merupakan elite-elite desa, yaitu :

- Kelompok petani sederhana.
- Kelompok peternak, (*mbuwalaka*)
- Kelompok penguasa, (Keluarga ningrat)
- Keluarga kaya.
- Keluarga pendekar, dan
- Beberapa bentuk kelompok/keluarga lain.

Dari kelompok-kelompok inilah timbul-timbul calon-calon pemimpin yang akan berpengaruh di masyarakat.

2. Stratifikasi Sosial.

Stratifikasi terjadi oleh karena adanya kebiasaan hubungan manusia secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang dalam setiap saat mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang lain secara vertikal maupun horisontal dalam masyarakatnya.

Dalam setiap masyarakat akan ditemukan atau berkembang dengan sendirinya suatu stratifikasi sosial; hanya masyarakat-

Salah satu kebiasaan yang merupakan ciri khas orang Tolaki dalam kehidupannya sebagai petani ialah bekerja sama (bergotong-royong) di pelbagai kegiatan sosial mereka.

Seorang yang akan membuat rumah perlindungan keluarganya, tidak perlu harus mengadakan persiapan selengkapnyanya. Dengan kerja-sama antara sesama warga desa, pendirian rumah itu dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat mulai dari peramuhan bahan bangunan, sampai kepada pendirian dan penyelesaiannya. Demikian pula di dalam pengolahan sawah. Mulai dari pembabatan rumput (*mondeteki*), pembongkaran tanah (*metang-gali* = memacul), penanaman padi, sampai pada kegiatan pemotongan padi, biasanya semua itu dilaksanakan secara bergotong royong.

Di dalam kegiatan pembangunan desa, seperti pendirian mesjid, sekolah, rumah pesta, pembuatan jembatan, saluran air dan perbaikan jalanan, pada umumnya dilakukan secara gotong royong. Sebagian besar dari bangunan yang terdapat di Desa Benua dan kelurahan/desa-desa lainnya, adalah merupakan hasil swadaya masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Di dalam pola tingkah-laku masyarakat maupun individu, faktor adat dan bahasa merupakan norma dasar dalam proses interaksi antar individu, keluarga maupun masyarakat.

Salah satu tradisi orang Tolaki yang masih berkembang sekarang ini, yaitu mengundang sanak famili/kerabat dengan dua cara yakni cara tertulis (undangan tertulis) dan cara lisan (undangan adat).

Khusus kepada sanak keluarga yang dipertua atau kaum kerabat yang sangat dihormati, selalu diundang secara adat. Undangan adat dimaksud ialah undangan lisan yang disampaikan secara adat, yaitu menggunakan *Tolea* selaku duta adat dan *kalo sara* sebagai wujud adat suku Tolaki.

Demikian pula halnya apabila seseorang pria ingin meminang seorang puteri pujuannya, atau pada saat mengikat pertunangan dan pelaksanaan upacara adat perkawinannya, selalu dilaksanakan komunikasi secara adat dengan tatacara penyajian tertentu yang disebut upacara adat *mondeo pesuko* (meminang), *momboko ndetoro* (mengikat pertunangan), dan upacara adat perkawinan yang disebut *mowindahako*. Berkomunikasi secara adat disebut *momdesara*. (Inf. : 36)

Di samping kebiasaan adat tersebut di atas, terdapat pula suatu kebiadaan atau cara untuk menempatkan/mengatur tempat duduk di dalam suatu pesta masyarakat di desa. Umumnya masyarakat Tolaki mengetahui bahwa seseorang pejabat atau orang-orang yang mempunyai status sosial yang tinggi harus ditempatkan paling hulu dari barisan tempat duduk yang tersedia. Sangat tercelah di dalam masyarakat apabila ada salah seorang yang duduk membawahi seseorang sedang ia tahu bahwa status sosial orang yang dibawahinya itu lebih tinggi dari status sosialnya sendiri.

4. Sistem Ekonomi.

Semua masyarakat telah menyusun pola-pola untuk pemenuhan kebutuhan dasar ekonominya. Makanan, pakaian, perumahan dan lain-lainnya mutlak harus disediakan. Adanya kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam, mendorong pula sejumlah aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Maka lahir lah sistim mata pencaharian penduduk.

Suku Tolaki pada umumnya hidup dari pertanian, menangkap ikan, berburu, perdagangan, peternakan, pertukangan, pegawai dan lain-lain.

a. *Pertanian.*

Sistem pertanian masyarakat Tolaki di pedesaan, terdiri pertanian ladang (*mondau*), pertanian sawah (*meqalu*), berkebun (*mepombahora*) dan menanam sagu (*mondudu tawaro*).

Sebagian besar dari penduduk Desa Benua dan Kelurahan inalahi hidup dari jenis-jenis pertanian di atas.

Pertanian dengan sistem berladang sudah dikenal sejak datangnya nenek moyang orang Tolaki di daerah Sulawesi Tenggara. Karena sistem berladang itu dilakukan secara berpindah-pindah, telah mengakibatkan gundulnya hutan-hutan dan pegunungan di sekitar daerah pemukiman mereka. Di sadari pula bahwa dengan perladangan berpindah-pindah ini telah mengakibatkan kemunduran sektor pembangunan dan pendidikan anak-anak mereka. Karena itu sistem berladang ini telah dilarang oleh Pemerintah. Penduduk dianjurkan untuk membuka daerah-daerah persawahan dengan pola menetap.

masyarakat yang sangat kecil dan homogen yang tidak mempunyai stratifikasi. Stratifikasi terjadi dengan makin meluasnya masyarakat dengan makin terjadinya pembagian pekerjaan (Dr. Phil. Astrid S. Susanto; 1983 ; 65)

Di dalam masyarakat Tolaki, kelas-kelas ini terdiri dari :

- Golongan Anakia (bangsawan)
- Golongan Puutobu (bangsawan menengah)
- Golongan Tonodadio (rakyat biasa).

Di samping tiga golongan tersebut di atas, ada lagi satu golongan yang merupakan tingkatan sosial yang paling di bawah, yaitu golongan *ata* (budak).

Apabila kita meneliti pelapisan masyarakat tersebut di atas, maka yang menjadi dasar pelapisan masyarakat pada masa lalu adalah faktor keturunan. Seorang mempunyai kedudukan dalam pelapisan tertentu karena keturunannya. Selain faktor keturunan, faktor keaslian (status kependudukan) juga menjadi salah satu dasar yang kuat di dalam menentukan kedudukan seseorang di dalam masyarakat Tolaki.

Pada zaman kerajaan, pelapisan masyarakat Tolaki sangat ketat. Sangat jarang terjadi salah seorang anggota dari kelompok bawah (Tono dadio) yang dapat memasuki kelompok yang paling atas (Anakia). Apalagi kelompok yang paling bawah sangat tertutup kemungkinannya untuk dapat bergerak naik menyatu dengan tingkatan masyarakat di atasnya (*verti mobility*).

Sistem kelas mencerminkan suatu masyarakat dimana kesempatan untuk naik tangga sosial lebih sukar dan hampir tertutup (Dr. phil. Astrid S. Susanto ; 1983 : 66).

Sampai pada zaman Pemerintahan Belanda, sistem kelas/golongan dalam masyarakat Tolaki tetap dipertahankan. Bahkan sistem pelapisan masyarakat ini dijadikan tameng Belanda di dalam melaksanakan praktek politik pemerintahannya (politik *adu-domba*).

Pada masa pemerintahan Belanda, golongan Bangsawan Pri-Bumi merupakan lapisan masyarakat ke-dua sesudah tingkatan/kedudukan bangsa Belanda sendiri.. Golongan bangsawan diberikan kedudukan yang lebih istimewa dari pada golongan masyarakat lainnya dalam komunitas suku Tolaki. Hanya keluarga dari

golongan bangsawan itulah yang boleh mendapatkan pendidikan. Akibatnya, jurang-jurang pemisah antara golongan masyarakat yang satu dengan golongan lainnya semakin dalam. Seolah-olah masyarakat Pri-Bumi terutama lapisan masyarakat bawah, sudah ditakdirkan sebagai bangsa atau golongan yang diperhamba. Sebaliknya golongan bangsawan utamanya orang-orang Belanda di satu pihak memiliki status yang teramat tinggi.

Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelas atau kasta, maka orang-orang itu dapat bergerak dalam pelbagai kelompok dengan pelbagai hak dan kewajiban (Soekandar Wiriaatmadja M.A ; 1983 : 67).

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dimana setiap warga Indonesia memperoleh kembali hak-hak azasinya, maka sistem kelas di dalam masyarakat Tolaki yang sangat merugikan itu berangsur-angsur terkikis oleh semangat demokrasi dan jiwa Pancasila itu sendiri.

3. Sistem Kekerabatan.

Sistem kekerabatan adalah merupakan pola interaksi sosial antar individu di dalam masyarakat. Mulai dari lingkungan masyarakat kecil (keluarga), sampai pada lingkungan masyarakat yang lebih luas (bangsa), tentu terjadi interaksi sosial dengan cara atau sistemnya masing-masing.

Di lingkungan masyarakat Tolaki, keluarga ini disebut *rapu*, yang biasanya hanya terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak. Dalam keluarga batih seperti ini, ayah mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga lainnya. Dalam komunikasi sehari-hari, ayah dipanggil *ama*., ibu dipanggil *ina*, sedang anak-anak mereka dipanggil dengan sebutan *di* bagi seorang putera, *tie* kepada seorang puteri, atau langsung menyebutkan nama-nama mereka.

Hidup bertetangga atau masyarakat adalah merupakan ekspresi naluri manusia yang saling membutuhkan dan bekerja-sama antara satu dengan yang lain. Sebagai konsekwensi dari hidup bermasyarakat itu, lahirlah berbagai macam kebiasaan atau tradisi masyarakat baik dalam hal bertingkah-laku, maupun dalam bertutur kata. Maka timbullah semacam pola atau cara kekerabat/ bermasyarakat secara kompleks. Bahkan sebagian dari tradisi orang-orang Tolaki itu meningkat menjadi norma-norma sosial yang harus ditaati oleh setiap warga desa.

Sekarang ini penduduk Desa Benua dan Kelurahan Inalahi telah menganut sistem pertanian menetap (bersawah). Meskipun masih terdapat satu, dua orang yang melakukan perladangan, namun kegiatannya itu hanya merupakan kegiatan sampingan. Ada kecenderungan sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa pertanian ladang lebih produktif dari pada persawahan.

Di samping penduduk desa/kelurahan tersebut bersawah, mereka juga melakukan kegiatan berkebun. Di dalam kebun, penduduk dapat menanam tanaman-tanaman komoditi atau sejumlah tanaman muda yang dapat menunjang kebutuhan pokok akan makanan mereka sehari-hari.

Menanam sagu adalah merupakan bagian dari pertanian orang Tolaki. Sagu adalah termasuk makanan pokok penduduk di pedesaan di samping beras. Akan tetapi rumpun-rumpun sagu milik penduduk Desa Benua sudah habis digusur dan dijadikan lokasi pemukiman para transmigran di desa tersebut. Kini tinggal satu-satunya jenis pertanian penduduk Desa Benua, yaitu persawahan dan sedikit kebun yang hampir-hampir tidak berproduksi lagi. Untuk meningkatkan gairah penduduk dalam mengolah sawah mereka yang selama ini hanya menunggu curah hujan tidak menentu, Pemerintah membangun pengairan di desa/kelurahan tersebut di atas.

b. *Berburu.*

Berburu binatang liar adalah salah satu warisan kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Di Desa Benua, mata pencaharian serupa ini sudah jarang dilakukan sebab hutan-hutan di sekitar desa sudah berubah menjadi wilayah pemukiman transmigrasi. Demikian pula halnya di Kelurahan Inalahi yang wilayahnya berada di wilayah ibu kota Kecamatan Wawotobi.

c. *Peternakan.*

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging, penduduk Desa Benua dan Kelurahan Inalahi mengadakan usaha peternakan. Jenis peternakan yang ada di desa dan kelurahan tersebut adalah sapi, kambing, itik dan ayam. Kurang lebih 150 ekor sapi sedang ditenak di Desa Benua, sedang di

Kelurahan Inalahi terdapat 25 ekor sapi milik penduduk setempat. Selain itu terdapat pula 60 ekor kambing, 200 ekor ayam dan 90 ekor itik (sumber : papan potensi kelurahan).

d. *Perdagangan.*

Sesungguhnya orang-orang Tolaki bukanlah turunan pedagang. Akan tetapi dengan kehadiran suku-suku pendatang di Daerah Sulawesi Tenggara, di desa-desa terpencil pun terdapat penduduk yang hidup dari perdagangan.

Di Kelurahan Inalahi terdapat 21 orang pedagang. Mereka itu terdiri dari penduduk pendatang, yaitu orang-orang Selayar yang datang dari Sulawesi Selatan.

Di Desa Benua, perdagangan tidak berarti. Terdapat satu atau dua orang penduduk yang berjualan kecil dan itu pun hanya merupakan pekerjaan sampingan.

e. *Pegawai.*

Di mana-mana dalam Daerah Sulawesi Tenggara, terdapat penduduk yang hidup sebagai pegawai. Umumnya pegawai yang hidup di pedesaan adalah Guru atau pegawai Kelurahan.

Di Desa Benua terdapat 29 orang pegawai, sedang di Kelurahan Inalahi terdapat pula 21 orang yang hidup sebagai pegawai.

Sistem Teknologi.

Antara sistem mata pencaharian dan sistem teknologi penduduk terdapat hubungan yang kausalitas. Adanya aktivitas penduduk di bidang pertanian dan peternakan, mendorong pula usaha penduduk untuk mengadakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan.

Salah satu pengetahuan yang dibawah nenek moyang suku Tolaki dari negeri asalnya, ialah kepandaian bertukang besi (*sumopu*). Akan tetapi tidak semua mereka pandai bertukang besi. Bahkan di Desa Benua hanya terdapat 3 orang yang dapat membuat peralatan dari besi. Umumnyahasil dari pertukangan besi ini hanya terdiri dari alat-alat pertanian, alat berburu dan senjata tajam.

a. *Ayat pertanian.*

Sesuai dengan bentuk pertanian di desa yang umumnya masih dengan cara yang sederhana, maka alat-alat pertaniannya pun masih sederhana, yaitu berupa parang, sabit, pacul, luku dan ani-ani.

Di Desa Benua dan beberapa desa lainnya belum menggunakan alat pertanian yang modern. Kecuali di Kelurahan Inalahi dan beberapa desa lainnya telah menggunakan traktor sebagai alat pembongkar tanah.

b. *Senjata.*

Senjata khusus bagi orang Tolaki ialah *taawu* (parang panjang sejenis mandao di Kalimantan). Selain itu penduduk di pedesaan juga menggunakan tombak (*karada*) sebagai senjata dan alat berburu. Ada juga beberapa orang penduduk yang memiliki keris pusaka, akan tetapi bukan buatan penduduk setempat. Sebagian besar keris-keris pusaka milik penduduk berasal dari daerah Luwu dan Bone (Sulawesi Selatan).

Selain pertukangan besi, terdapat pula kepandaian menganyam dan bertukang kayu. Kerajinan tangan demikian ini menghasilkan sejumlah jenis peralatan rumah tangga. Alat-alat dapur dan tempat penyimpanan barang yang terbuat dari daun pandan atau daun agel, merupakan hasil kerajinan tangan dari ibu-ibu yang terampil. Sedang alat-alat rumah tangga yang terbuat dari kayu, rotan dan bambu adalah hasil ketrampilan laki-laki. Pengetahuan anyam-menganyam dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Penggunaan alat-alat modern di desa-desa pada umumnya diadakan dengan cara dibeli atau bantuan pemerintah.

6. Sistem Religi

Suku Tolaki di Daerah Sulawesi Tenggara keseluruhannya adalah umat beragama. Sebagian besar dari orang-orang Tolaki memeluk agama Islam. Ada juga yang memeluk agama Kristen, namun jumlahnya sangat sedikit.

Penduduk Daerah Kendari baru memeluk agama Islam secara resmi pada sekitar pertengahan abad ke 18, yaitu pada masa pemerintahan abad ke 18, yaitu pada masa pemerintahan Mokole

Lakidende, atau yang dikenal oleh masyarakat dengan gelar *Sangia Ngginoburu* (raja yang dikebumikan). Sebelumnya itu masyarakat Tolaki, masih percaya akan dewa-dewa dan kekuatan gaib. Dewa-dewa orang Tolaki terdiri dari :

- *Sangia mbuu* : Dewa utama yang menguasai kehidupan
- *Sangia ilosoano oleo* : Dewa yang menguasai matahari.
- *Sangia itepuliano oleo* : Dewa yang menguasai malam.
- *Sangia i puri tahi* : Dewa yang menguasai laut.

Selain dewa-dewa tersebut di atas, orang Tolaki percaya pula adanya Dewi Kesejahteraan yang disebut *Sanggoleo Mbae* (Dewi Padi).

Di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi, tidak berkembang lagi kepercayaan-kepercayaan seperti yang disebutkan di atas. Kecuali oleh beberapa orang dukun yang masih terkadang memuja para dewa di saat melaksanakan upacara pengobatan secara magis. Sekarang ini Desa Benua 100% penduduknya memeluk agama Islam, sedang di Kelurahan Inalahi terdapat 4 orang penduduknya yang menganut agama Kristen.

Upacara-upacara magis-tradisional yang sering-sering dilaksanakan di lingkungan masyarakat pedesaan, bukanlah merupakan manivestasi kepercayaan masyarakat setempat. Upacara *mosehe* dan *mooli* yang sering dilakukan oleh para pawan (dukun kampung), adalah salah satu cara pemberian sesajian serta permohonan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat secara tradisional.

Oleh masyarakat Tolaki, menghargai tradisi nenek moyang adalah wajar sekalipun tidak berarti untuk kembali menghidupkan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang yang sifatnya mensekutukan Tuhan.

7. Bahasa.

Bahasa adalah simbol persatuan dari kelompok atau bangsa pendukungnya. Tanpa bahasa identitas kelompok-kelompok suku itu pasti akan kabur dilebur oleh kelompok suku yang lebih maju kebudayaannya.

Dari kurang lebih 200 buah bahasa daerah di Indonesia, ter-

sebutlah bahasa Tolaki (Bungkulaki) sebagai bahasa yang dipergunakan oleh sebagian besar penduduk Daerah Sulawesi Tenggara. Bahasa Tolaki ini dipergunakan sebagai bahasa pengantar oleh masyarakat Tolaki di Daerah Kendari dan Kolaka, terutama bagi masyarakat di pedesaan yang masih murni kesukuannya.

Di samping bahasa Tolaki sebagai bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dipergunakan pula oleh masyarakat Tolaki. Bahasa Indonesia pada umumnya digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan dalam pertemuan umum atau dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa daerah setempat.

Selain faktor adat seperti tersebut di atas, faktor bahasa adalah sangat utama kedudukannya di dalam berkomunikasi.

Di dalam berkomunikasi sehari-hari, terdapat perbedaan bahasa yang diperuntukkan kepada orang yang dipertua atau orang tua-tua, dengan orang yang seusia atau sederajat. Salah satu contoh, misalnya : perkataan *inggoo* untuk menunjukkan diri bagi seorang kawan biasa atau yang lebih muda usianya/rendah derajat sosialnya diganti dengan kata *inggomiu* untuk seorang pejabat atau yang dituakan (*inggoo/inggomiu* = kau/kita).

Dari tradisi semacam ini seorang tua atau pejabat dapat memaklumi dirinya yang sudah tidak dihargai atau dihormati apabila seseorang bawahan atau orang lain telah mengucapkan *inggoo* kepadanya. Demikian pula pengertian kata *oho* yang berarti *io* untuk jawaban terhadap teguran orang biasa, dengan kata *ie* yang diperuntukkan kepada orang-orang tua-tua atau yang dituakan (*ie* = ya).

Di dalam bahasa Tolaki terdapat banyak istilah sebagai kata ganti orang yang lazim dipergunakan di dalam berkomunikasi sehari-hari, antara lain :

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| — <i>ama</i> | : | panggilan untuk ayah (bapak). |
| — <i>ina</i> atau <i>bae</i> | : | panggilan untuk ibu. |
| — <i>walinggu</i> | : | panggilan untuk isteri atau kawan. |
| — <i>sabeangu</i> | : | panggilan untuk suami (sahabat) |
| — <i>baisa</i> | : | panggilan untuk mertua/menantu |
| — <i>kaka</i> | : | panggilan untuk kakak |
| — <i>hai</i> | : | panggilan untuk adik |
| — <i>ela</i> | : | panggilan untuk ipar laki-laki |

- *hine* : panggilan untuk ipar perempuan
- *mama* : panggilan untuk paman (om)
- *naina* : panggilan untuk tante/bibi.
- *pue* : panggilan untuk nenek
- *mbue* : panggilan untuk cucu.
- *lakiana* : panggilan untuk kemenakan.

Meskipun secara nasional telah dinyatakan bahwa masyarakat Indonesia telah bebas dari buta huruf, namun kenyataannya sebagian kecil dari masyarakat di pedesaan Sulawesi Tenggara masih belum mengetahui bahasa Indonesia. Sebagian besar dari penduduk lanjut usia di pedesaan belum tahu berbahasa Indonesia, sekalipun beberapa orang di antara mereka telah memahami arti bahasa yang diucapkan.

Di dalam perbauran bahasa Tolaki sebagai bahasa suku dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa, terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung di dalam berbahasa sehari-hari.

Di satu pihak nampak adanya pengaruh bahasa Indonesia terhadap pengembangan bahasa Tolaki, terutama dalam pemberian nama-nama benda di sekitar lingkungan hidup mereka, seperti :

- | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---|-------------|
| — <i>sandale</i> | = | sendal | — <i>Kombula</i> | = | kumpul-an |
| — <i>piso</i> | = | pisau | — <i>kambo</i> | = | kampung |
| — <i>potolo</i> | = | potlot (pinsil) | — <i>disitere</i> | = | distrik |
| — <i>buku</i> | = | buku | — <i>wakele</i> | = | wakil |
| — <i>gogoso</i> | = | gogos | — <i>dambata</i> | = | jembatan-an |
| — <i>gambara</i> | = | gambar | — <i>sisi</i> | = | cincin |
| — <i>kasoro</i> | = | kasur | | | |
| — <i>mina-mina</i> | = | minyak wangi | | | |
| — <i>lamari</i> | = | lemari, dan lain-lain sebagainya. | | | |

Di pihak lain terdapat pula pengaruh bahasa daerah terhadap pengucapan bahasa Indonesia, misalnya :

- ke pasar diucapkan ke pasar
- kenalan diucapkan kenalan
- kebaya diucapkan kobaea
- kesenangan diucapkan kosonangan

Pengaruh vokal "O" dalam pengucapan bahasa Indonesia itu merupakan ciri khas bahasa Tolaki.

8. Pendidikan

Pendidikan formal baru dikenal oleh masyarakat Tolaki sejak masuknya orang-orang Belanda di Daerah Kendari. Sebelumnya itu di dalam masyarakat hanya dikenal pendidikan keluarga, di mana ayah dan ibu bertindak sebagai pendidik. Pokok-pokok pendidikan orang tua ialah berkisar pada tradisi, adat-istiadat, agama dan usaha.

Setelah orang-orang Belanda datang di Daerah ini yaitu di sekitar tahun 1917, misi *Vederlandse Zendings Vereniging* (NZV) mulai mengembangkan usaha-usaha di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan agama. Akan tetapi pada waktu itu sekolah-sekolah Belanda hanya terbuka untuk anak-anak dari keluarga bangsawan.

Setelah Indonesia merdeka, terbukalah sekolah-sekolah rakyat yang didirikan oleh dan untuk rakyat. Sekarang ini pendirian sekolah telah merata di seluruh pedesaan. Bahkan di beberapa desa/kelurahan seperti Desa Benua, Pondidaha, Punday, Tawanga, Kulahi, Kelurahan Inalahi dan beberapa desa lain di wilayah Kecamatan Wawotobi sudah terdapat Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP).

Selain pendidikan umum, terdapat pula di desa-desa semacam pendidikan agama yang mengajarkan pelajaran membaca Al-Qur'an.

9. Kesenian

Kesenian Daerah Kendari pada hakekatnya adalah kesenian suku Tolaki yang sejak dahulu telah tumbuh berkembang dalam masyarakat Tolaki. Bentuk-bentuk kesenian tradisional yang murni hanya dapat disaksikan di lingkungan masyarakat pedesaan.

Jenis-jenis kesenian masyarakat Tolaki yang masih dapat disaksikan di pedesaan terdiri dari :

1. Seni Tari tradisional :

- tali lulo (tari lemah-gemulai)
- tari dinggu (tari alu)
- tari umoara (tari perang)

- tari lariangi (tari pemujaan)
2. Seni rupa/tampak :
 - seni anyam
 - seni ukir
 3. Seni gerak (bukan tari) :
 - pencak (bela diri, selat)
 - mobiti (main betis)
 - ide (menebak cincin melalui gerakan)
 4. Seni suara :
 - anggo (lagu-lagu pujian)
 - taenango (lagu kepahlawanan)
 - sua-sua (lagu sindiran)
 - kabia (lagu-kagu biasa)
 5. Seni sastra :
 - konoho (kias)
 - singguru (teka-teki)

Pada umumnya kesenian tradisional yang disebutkan di atas masih menunjukkan keasliannya. Seniman-seniman daerah pada umumnya menciptakan tari kontemporer dengan menggali adat istiadat suku Tolaki, kemudian melakonkannya dalam bentuk gerakan, misalnya :

- tari *motasu* (tari manunggal) yang meragakan cara-cara orang tolaki mengolah ladangnya.
- tari *membesara* (tari persembahan adat) yang menggambarkan peragaan pelaksanaan suatu upacara adat suku Tolaki di Daerah Kendari dan Kolaka.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN SULAWESI TENGGARA

Kepemimpinan muncul bersama-sama lahirnya peradaban manusia, yaitu sejak nenek moyang kita mulai mengenal hidup berkumpul dan mengadakan interaksi sosial antar individu. Bekerja sama adalah faktor yang mendasar di dalam mempertahankan eksistensi hidup mereka yang setiap saat terancam oleh kebuasan binatang atau keganasan alam lingkungannya. Kecenderungan berkumpul dan bekerja-sama melahirkan kelompok-kelompok masyarakat. Di dalam kelompok itulah terjalinnya kerja-sama antar warga dan melahirkan unsur-unsur kepemimpinan.

Semula kelompok itu terbentuk atas dasar kebersamaan usaha dan cita-cita untuk melanjutkan hidup. Seperti usaha pertanian, peternakan atau perdagangan.

Orang-orang Tolaki yang pada umumnya terdiri dari petani, membentuk kelompok atas dasar persamaan usaha/mata pencaharian. Maka lahirlah kelompok petani ladang yang berkumpul dalam suatu lokasi perladangan yang disebut *Tobu*. Orang-orang Tolaki yang memiliki hewan ternak membentuk pula wilayah administratif walaka lebih luas dari pada *tobu*. Akan tetapi organisasi *tobu* lebih kompleks, karena selain sebagai wilayah kegiatan usaha, juga sekaligus sebagai wilayah pemukiman anggota-anggotanya.

Di pandang dari segi fungsi dan kedudukannya, *Tobu* adalah setingkat dengan Kampung, Desa atau Kelurahan meskipun tingkat kemajuannya sangat jauh berbeda. Baik desa maupun *tobu*, sama-sama mempunyai wilayah administratif tertentu, mempunyai organisasi pemerintahan serta memiliki sejumlah penduduk pendukungnya.

Untuk lebih jelasnya pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam naskah ini, perlu diberikan pembatasan mengenai apa yang dimaksud Desa, masyarakat desa dan Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan pembatasan yang diberikan oleh peraturan maka yang dimaksud dengan desa atau daerah yang setingkat menurut Undang-Undang tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah No.18 Tahun 1965, adalah suatu wilayah setempat yang merupakan suatu kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Desa ialah Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa atau daerah setingkatnya, dimana karena jabatannya itu ia disertai tanggung jawab mengelolah administrasi atau urusan pemerintahan oleh atasannya.

Pemerintahan Desa adalah merupakan simbol formil daripada kesatuan masyarakat desa (Ny. Dra. Sumber Saparin ; 1977 : 30).

Karena sifat keanekaan masyarakat dan bangsa, istilah penamaan desa di dalam masyarakat hukum suku bangsa Tolaki ternyata berbeda dengan penamaan desa di daerah lainnya di Indonesia.

Adanya perkembangan masyarakat yang terus menerus, mempengaruhi pula perkembangan politik dalam suatu daerah. Demikianlah keadaannya sehingga masyarakat hukum suku Tolaki hingga kini telah mengalami tiga kali perobahan politik pemerintahan seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

1. Pemerintahan Desa Berstatus Tobu.

Sekitar abad VII, di mana orang-orang Tolaki masih menganut pola pemerintahan menyebar, masyarakat Tolaki telah mengenal suatu bentuk pemerintahan desa yang dinamakan *Tobu*. Di dalam istilah bahasa Tolaki, Tobu diartikan sebagai suatu lokasi pertanian ladang yang di dalamnya bermukim beberapa orang/keluarga secara menetap selama waktu yang tidak tertentu. Lebih kecil dari Tobu disebut *Napo*, yaitu suatu kelompok kecil yang hanya terdiri dari satu, dua atau lebih keluarga dan tinggal untuk waktu semusim. Kelompok masyarakat kecil seperti ini belum mempunyai organisasi yang teratur, kecuali seorang pemimpin dari kalangan mereka yang dituakan (Tono Motuo).

Berbeda keadaannya dengan Tobu yang sudah merupakan suatu organisasi pemerintahan yang mempunyai Pimpinan dan beberapa personil pembantu pimpinan.

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan Tobu ialah *Puu Tobu*. Fungsi, peranan, hak dan kewajiban Puu Tobu sama dengan seorang Pimpinan Desa. Seorang Puu Tobu membawahi beberapa orang Tono Motuo.

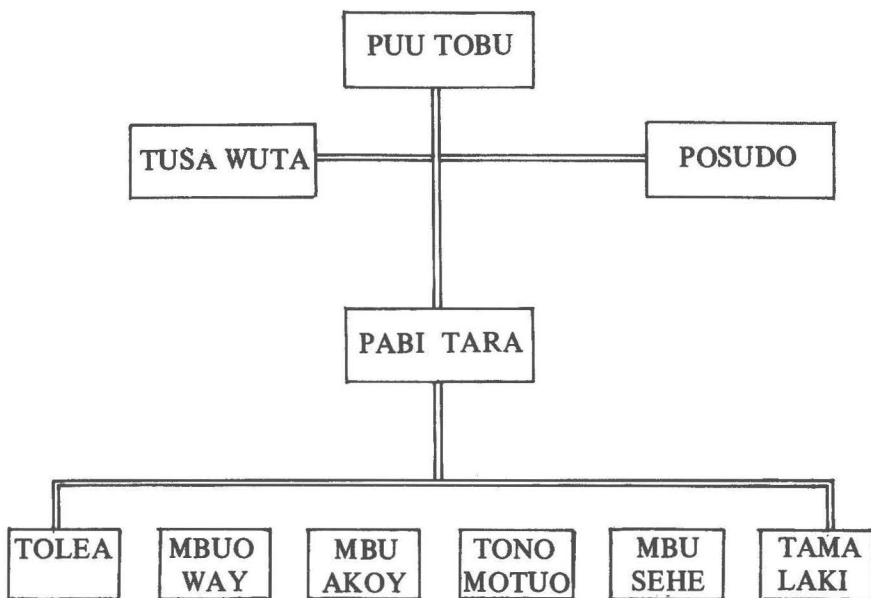
Di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pemimpin Pemerintahan Tobu, Puu Tobu dibantu oleh beberapa orang aparat pemerintahannya, yaitu :

- Tono Motuo (orang yang dituakan dalam napo)
- Pabitara (juru bicara)
- Posudo (urusan keuangan)
- Tolea (duta adat)
- Mbuoway (urusan upacara adat)
- Mbuakey (urusan kesehatan masyarakat)
- Mbusehe (urusan pemulihan kesehatan)
- Tamalaki (urusan pertahanan keamanan)
- Tusa wuta (urusan kesejahteraan/pertanian).

Pokok-pokok pemerintahan di tingkat Tobu didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Masing-masing personil sebagai Kepala Urusan, melaksanakan tugas-tugasnya dalam batas kewenangannya masing-masing.

Puutobu di dalam mengatur dan memimpin administrasi pemerintahan Tobu, menganut suatu sistem komando. Sistem kepemimpinannya terlihat di dalam struktur organisasi pemerintahannya di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN T O B U DI DAERAH KABUPATEN KENDARI



Tugas dan Kewajiban.

Organisasi pemerintahan Tobu pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam susunan organisasinya, kelihatan bahwa 90% pejabatnya diarahkan kepada urusan kesejahteraan.

a. *Puu Tobu*

Puutobu adalah Pimpinan Tobu yang atas jabatannya itu ia mempunyai tugas untuk memimpin pemerintahan di wilayahnya. Dalam kedudukan Tobu sebagai komunitas kecil yang justru lahir dalam periode pemerintahan kerajaan (Konawe), maka kedudukannya berada di bawah pemerintahan *Sapati*. Sapati sama kedudukannya dengan Bupati Kepala Daerah sekarang ini. Untuk itu secara organisasi, Puu Tobu wajib bertanggung jawab kepada Sapati. Di samping itu setiap pemerintah Tobu wajib memikirkan perbekalan dari Pemerintahan di atasnya.

b. *Tono Motuo*.

Tono Motuo mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan Tobu dalam kelompok masyarakat yang dipimpinnya (Napo). Dalam kedudukannya itu Tono Motuo wajib mendukung keberlangsungan pemerintahan Tobu.

c. *Pabitara*

Pabitara adalah pemangku jabatan juru bicara dalam pemerintahan Tobu. Tugasnya ialah menyampaikan perintah Pimpinan (Puu Tobu) kepada segenap rakyat (Tono Dadio). Pabitara mempunyai kewajiban menampung segala aspirasi masyarakat banyak untuk disampaikan kepada pimpinannya.

d. *Posudo*.

Posudo adalah pejabat yang menangani urusan keuangan. Posudo wajib memikirkan cara memperoleh dana untuk konsumsi pemerintah. Dalam bahasa Tolaki, istilah Posudo mempunyai arti yang menerangkan kewajibannya, Po, artinya alat, Sudo artinya tunjang. Pisudo artinya alat penunjang yang pengertiannya adalah sebagai tulang punggung pemerintahan.

e. *Tolea*.

Tolea ialah duta adat. Tugasnya adalah memberikan pelayanan adat kepada masyarakat. Sebagai duta adat, ia wajib memelihara kehidupan adat serta keberlangsungannya di dalam proses sosialisasi dalam masyarakat. Perlu diketahui bahwa adat (*sara*) adalah merupakan salah satu kepribadian masyarakat Tolaki.

Tersebut dalam falsafah orang Tolaki yang berbunyi "Inae kosara ie pinesara, inae kasara ie pinekasara" artinya siapa yang beradat dia dimuliakan, si yang kasar (tak tahu adat) ia akan dihinakan.

f. *Mbuoway*.

Mbuoway adalah pejabat yang bertugas mengurus pelaksanaan upacara adat.

g. *Mbuakoy*

Mbuakoy adalah pejabat yang mengurus kesehatan masyarakat. Tugasnya ialah menyelenggarakan upacara-upacara tradisional yang sifatnya mengandung unsur magis religious.

h. *Mbusehe*.

Mbusehe adalah pejabat yang bertugas menyelesaikan sengketa (*mosehe*). Menurut tradisi orang Tolaki, perdamaian yang tidak melalui prosedur mosehe akan menimbulkan bencana yang sangat merugikan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

i. *Tamalaki*

Tamalaki ialah pejabat yang ditugaskan untuk memelihara atau mempertahankan keamanan masyarakat dan pemerintah. Istilah Tamalaki mempunyai arti tersendiri yang menunjukkan sifat yang harus dimiliki oleh pejabat itu sendiri. Tama artinya jantan, Laki berarti laki-laki. Tama laki berarti laki-laki yang bersifat jantan (pemberani).

j. *Tusa wuta*

Tusa wuta adalah pejabat yang mengurus kesejahteraan masyarakat. Tugasnya ialah memberikan penyuluhan pertanian kepada masyarakat.

2. Pemerintahan Desa Yang Berstatus Kampung

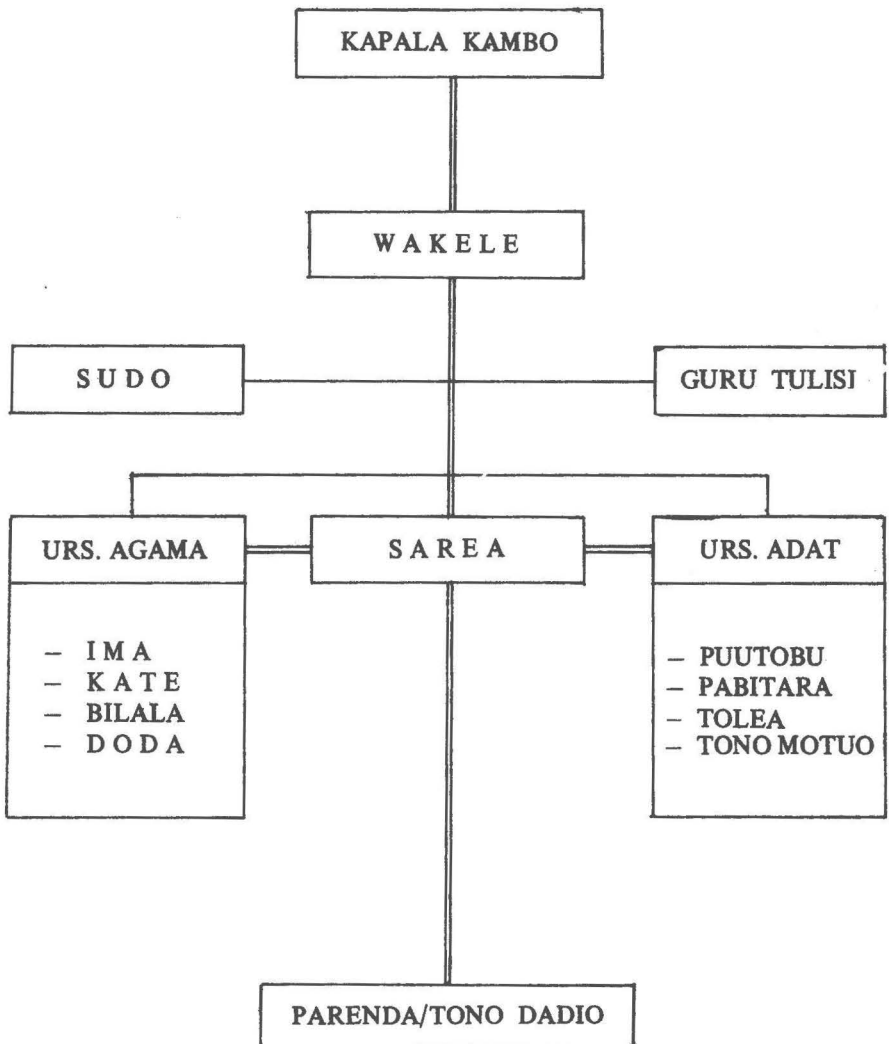
Sejak datangnya orang-orang Belanda di Daerah Kendari, masyarakat Tolaki mengalami perubahan kehidupan secara besar-besaran. Kurang lebih sekitar awal abad XX, pola perkampungan Tolaki yang menyebar berubah menjadi sistem pemukiman terpusat. Wilayah-wilayah pemerintahan kecil (Tobu) dilebur dan dijadikan suatu organisasi pemerintahan yang lebih besar yang disebut *Kambo* (Kampung). Kampung adalah gabungan dari beberapa Tobu. Nilainya sama dengan desa sekarang ini. Perubahan tersebut sekaligus merubah nama maupun susunan personil pemerintahannya.

Pimpinan pemerintahan Kampung dinamakan Kepala Kambo. (Kepala Kampung). Di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Kepala Kampung dibantu oleh beberapa anggota pemerintah, yaitu :

- Wakele (wakil)
- Guru Tulisi (Juru tulis)
- Sarea (hubungan masyarakat), dan dilengkapi dengan beberapa anggota pemerintah seperti pada pemerintahan Tobu.

Susunan organisasi pemerintahannya tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi pemerintahan Tobu di zaman Kerajaan Konawe. Kecuali jabatan Puu Tobu digantikan oleh Kepala Kampung, sedang Puu Tobu di dalam struktur pemerintahan Kampung ini hanya merupakan Lembaga Penasehat Pemerintah. Demikian pula pemerintah di atasnya telah berubah dari pemerintahan Sepati menjadi pemerintahan Distrik.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
KAMPUNG DI DAERAH KAB. KENDARI
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**



Tugas dan Kewajiban.

a. Kepala Kampung

Kepala Kampung bertugas memimpin pemerintahan Kampung. Di samping tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan Kampung, Kepala Kampung mempunyai kewajiban-kewajiban yang meliputi :

- 1) Menjaga agar pemerintahannya dapat berjalan dengan baik serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan kepentingan warga masyarakatnya.
- 2) Mengadakan hubungan vertikal dengan pemerintah atas dan hubungan horizontal dengan pemerintahan desa yang setingkat.
- 3) Memungut dana untuk pembangunan wilayah pemerintahannya dan pembiayaan rumah tangga kampung.

b. Wakil Kepala Kampung.

Wakil Kepala Kampung bertugas mewakili Kepala Kampung dalam urusan rumah tangga pemerintahannya. Wakil Kepala Kampung berkewajiban untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan sosial serta bertanggung jawab kepada pimpinan pemerintahan kampung.

c. Juru Tulis

Juru Tulis bertugas melaksanakan urusan administrasi pemerintahan.

d. Sudo (Posudo)

Tugasnya ialah mengusahakan, menyimpan dan mengatur perbelanjaan rumah tangga kampung.

e. Sarea

Sarea adalah pejabat yang bertugas menyampaikan perintah Kepala Kampung terhadap warga masyarakat serta ber-

tanggung jawab atas pelaksanaannya.

3. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yaitu Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.

Pada Bagian Kedua Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979, menyebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah Desa terdiri atas :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Lembaga Musyawarah Desa.
- 2) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya, dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala-kepala Dusun.

Di samping unsur pimpinan dan perangkat desa seperti tersebut di atas, organisasi pemerintahan desa dilengkapi pula dengan Kepala-kepala Urusan yang membidangi urusan agama dan keamanan lingkungan desa.

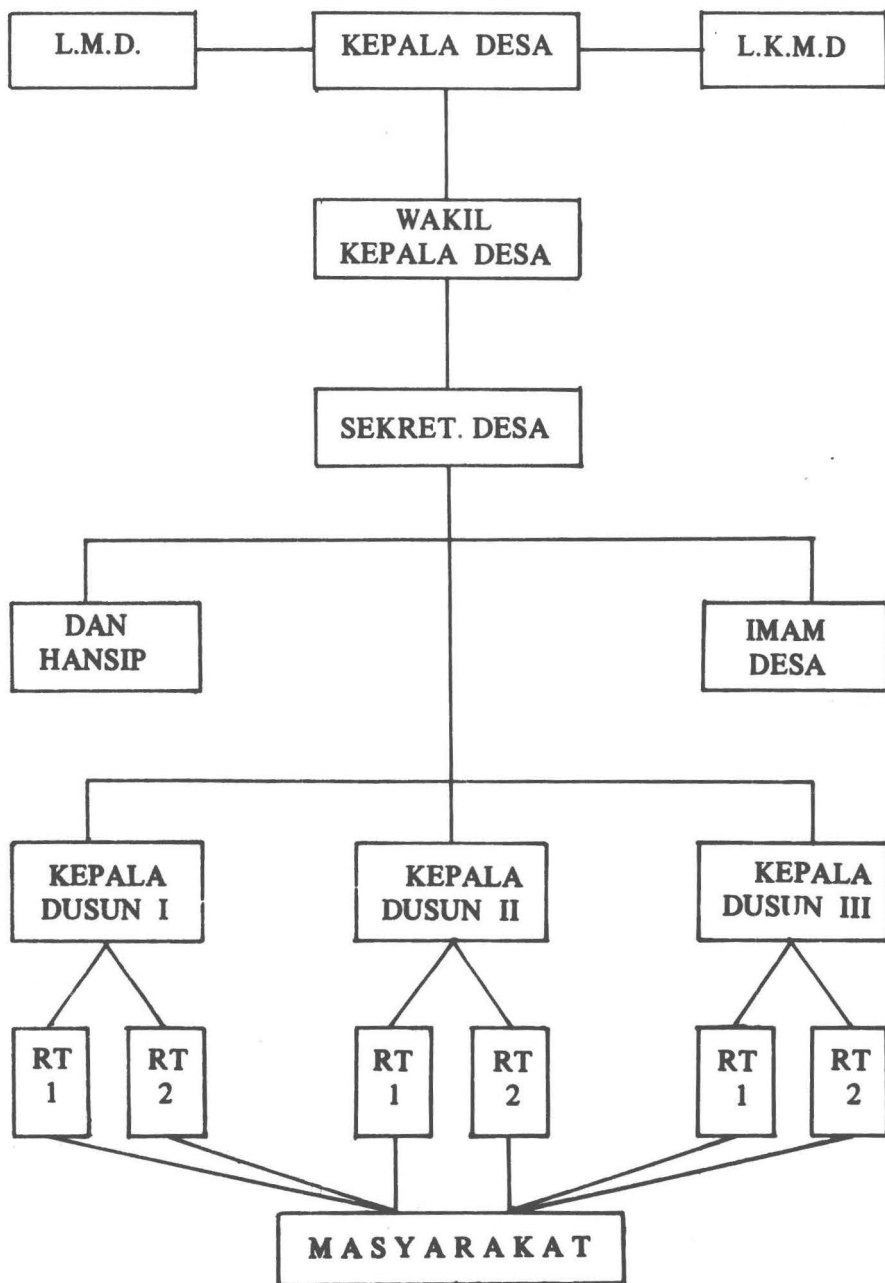
Yaitu masing-masing :

- a. Imam Desa/P3NTR;
- b. Komandan Hansip.

Susunan organisasi dan tatakerja pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Secara vertikal pemerintahan desa berada dibawah koordinasi Camat dan membawahi kelompok-kelompok dusun, sedang secara horizontal merupakan bagian dari badan-badan organisasi yang setingkat dengan desa.

**STRUKTUR PEMERINTAHAN
DESA BENUA**



Tugas dan Kewajiban

a. Kepala Desa

Sebagai pimpinan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Kepala Desa mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan.
- 3) Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakilinya.
- 4) Menerima dan melaksanakan instruksi dan petunjuk-petunjuk Pemerintah di atasnya, mengenai bidang pemerintahan, ketertiban/keamanan, tugas-tugas teknis dan kesejahteraan.
- 5) Membuat laporan secara periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi wilayah desa berdasarkan hasil pencatatan buku-buku register desa, kepada pemerintah Kecamatan.
- 6) Mengadakan kerja-sama dengan instansi-instansi atau organisasi lain yang terdapat dalam tingkat desa antara lain; Kepala-kepala Dusun, LKMD, LMD, Hansip, Imam/P3NTR, Dinas teknis (pertanian dan kesehatan), Kepala/Guru-guru Sekolah dan lain-lain sebagainya.
- 7) Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan tanah desa/agraria.
- 8) Sebagai otorita echelon bawah Pemerintah Desa berwenang untuk memberikan macam-macam surat keterangan untuk berbagai keperluan, antara lain; surat keterangan bukti diri, nikah/talak/rujuk, kartu penduduk, kelakuan baik, pemberian kesaksian untuk berbagai transaksi.

b. Sekretaris Desa.

Dalam kedudukan Sekretaris selaku Juru Tulis di dalam

pemerintahan desa atau sebagai pelaksana tata usaha pemerintahan desa, Sekretaris Desa mempunyai tugas-tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pencatatan register-register dan dokumentasi.
- 2) Menyusun laporan data-data tentang keadaan wilayah desa, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pelayanan umum, laporan keuangan dan hal-hal lain yang telah ditetapkan sebagai tugas pemerintah desa.
- 3) Mengerjakan pembukuan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan milik pemerintah desa.
- 4) Membuat pertanggung jawaban keuangan pengumpulan dana bantuan masyarakat secara gotong royong bagi pelaksanaan program pembangunan desa yang telah dilaksanakan.
- 5) Apabila Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa.

c. *Kepala Dusun.*

Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu (Dusun). Tugasnya ialah menyelenggarakan masalah teknis dengan bekerja-sama antar organisasi/instansi teknis yang ada di desa serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

d. *Kepala-Kepala Urusan*

Di dalam organisasi pemerintahan desa, Kepala-Kepala Urusan adalah merupakan perangkat desa yang masuk dalam kelompok sekretariat desa. Kepala-Kepala Urusan ini bertugas membantu pelaksanaan tugas pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya.

- 1) Hansip Desa bertugas di bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
- 2) Imam Desa/P3NTR mempunyai tugas dalam bidang pembinaan mental-spiritual serta urusan-urusan keagamaan, seperti urusan pernikahan, talak dan rujuk dengan bimbingan Jawatan Agama di tingkat Kecamatan.

4. Pemerintahan Kelurahan

Pemerintahan Kelurahan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979, Bab III Pasal 22 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.

Di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56 Bagian I ayat (8) dikatakan bahwa "Di samping Pemerintahan Desa terdapat pula suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang disebut "Kelurahan" yang dapat di bentuk di Ibu Kota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif dan Kota-kota lain" (Ny. Dra. Sumber Saparin; 1979 ; 27)

Pimpinan dalam pemerintahan Kelurahan disebut *Lurah*. Di dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Kelurahan, Kepala Kelurahan dibantu oleh Perangkat Kelurahan yang terdiri dari :

- Sekretaris
- Kepala-Kepala Lingkungan, dan
- Kepala-Kepala Urusan.

Di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi sebagai wilayah penelitian Team, Kepala Lingkungan terdiri dari 3 orang untuk 3 lingkungan, yaitu :

- 1) Kepala Lingkungan I
- 2) Kepala Lingkungan II
- 3) Kepala Lingkungan III

Kepala Urusan terdiri dari 5 orang, yaitu masing-masing sebagai berikut :

- 1) Kepala Urusan Pemerintahan
- 2) Kepala Urusan Keuangan
- 3) Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan
- 4) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
- 5) Kepala Urusan Umum

Pimpinan Pemerintahan (Kepala Kelurahan) Inalahi dijabat oleh Aburaerah Tawa, sedang Sekretaris Kelurahan dijabat oleh Arifin M.

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kelurahan seperti yang dimaksudkan di atas, diatur dengan peraturan

Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan memperhatikan kondisi masyarakat serta volume kegiatan yang akan dilaksanakan.

Peraturan Daerah yang dimaksudkan di atas baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Sebagai gambaran struktur pemerintahan kelurahan di wilayah Kecamatan Wawotobi, berikut ini dapat dilihat dalam bagan organisasi Pemerintahan Kelurahan Inalahi.

**BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
KELURAHAN INALAH**



Tugas dan Kewajiban

Tugas-tugas operasional Pemerintahan Kelurahan meliputi pembinaan wilayah, keamanan dan ketertiban masalah kesejahteraan dan pembangunan.

a. *Lurah (Kepala Kelurahan)*

- 1). Kepala Kelurahan bertugas dan bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakatnya.
- 2) Dalam tugas-tugas administrasi, Lurah mempunyai tugas dan tanggung jawab membina staf Kantor Kelurahan, yang terdiri dari beberapa jenis unit kerja dalam wilayah pemerintahannya.
- 3) Merencanakan, menyusun, mengkoordinir dan mengawasi segala pelaksanaan tugas-tugas dari masing-masing unit kerja seperti yang telah ditetapkan dalam tata kerja dan uraian pekerjaan masing-masing staf Kelurahan.
- 4) Kepala Kelurahan juga mengemban tugas membangun mental masyarakatnya baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.
- 5) Kepala Kelurahan wajib memberikan laporan keadaan pemerintahan, perubahan-perubahan dalam masyarakat, keamanan serta sosial ekonomi wilayah kelurahan kepada pemerintah atasannya (Camat).
- 6) Menerima dan melaksanakan instruksi maupun petunjuk-petunjuk Pemerintah di atasnya serta bekerja-sama dengan instansi-instansi/organisasi di dalam lingkungan pemerintahannya.

b. *Sekretaris Kelurahan*

Di dalam struktur organisasi pemerintahan Kelurahan, Sekretaris adalah merupakan pejabat kedua dari Lurah. Karena itu Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi dan peranan penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan Kelurahan. Tugas dan kewajibannya antara lain :

- 1) Menyelenggarakan kegiatan ketata-usahaan Kelurahan.

- 2) Melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang dilimpahkan kepadanya serta mewakili Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepala Kelurahan bilamana sewak-waktu Kepala Kelurahan berhalangan.
- 3) Menyiapkan data dan laporan tentang keadaan wilayah kelurahan, yang meliputi pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan umum serta pengelolaan keuangan yang dialokasikan pada kelurahan.
- 4) Dan lain-lain yang sehubungan dengan tugas-tugas kesekretariatan pemerintahan Kelurahan.

c. *Kepala Lingkungan*

Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerja tertentu (Lingkungan). Tugas dan kewajibannya ialah :

- 1) Menerima dan melaksanakan perintah atasannya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat di lingkungannya.
- 2) Melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Kelurahan yang diperintahkan kepadanya.
- 3) Mengkoordinir kegiatan kerja-sama/gotong-royong dalam pembangunan maupun dalam kegiatan sosial.

d. *Kepala Urusan*

Kepala-Kepala Urusan adalah merupakan perangkat kelurahan yang menangani bidang-bidang tertentu sebagai bagian dari tugas pemerintah Kelurahan.

- 1) Kepala Urusan Pemerintahan menangani bidang organisasi pemerintahan.
- 2) Kepala Urusan Keuangan menangani bidang keuangan dalam hal :
 - Menyimpan dan mengeluarkan uang serta mengelola administrasi keuangan di Kelurahan.
 - Merencanakan/mengusahakan keuangan untuk keperluan pembangunan wilayah dan rumah tangga Kelurahan.
 - Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan

rutin maupun hasil sumbangan suka-rela masyarakat.

- 3) Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan bertugas memikirkan, merencanakan dan melakukan langkah-langkah peningkatan ekonomi masyarakat sebagai suatu usaha menggalakkan pembangunan masyarakat di segala bidang.
- 4) Urusan Kesejahteraan Rakyat, bertugas dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat melalui :
 - pemerataan kesempatan belajar dan mendapatkan lapangan pekerjaan
 - Usaha pembangunan mental dan ekonomi penduduk.
 - menumbuhkan usaha-usaha/kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 5) Urusan Umum ialah urusan rumah tangga kelurahan, yang berkewajiban memikirkan rumah tangga kelurahan.

SISTEM KEPEMIMPINAN

Studi tentang kepemimpinan adalah merupakan hal yang sangat kompleks. Hampir di setiap tempat dan waktu di mana orang berkumpul dan bekerja-sama, di sana terdapat unsur Pemimpin dan yang dipimpin.

Telah disinggung dalam uraian terdahulu, bahwa kepemimpinan itu lahir akibat adanya kehidupan bersama serta kerja-sama yang terjalin dengan tertib antara seorang atau sekelompok orang. Kehidupan bersama yang dilandasi oleh tujuan yang sama melahirkan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat kecenderungan saling bergantung antara yang dipimpin dan yang memimpin.

Karena kompleksnya pengetahuan tentang kepemimpinan itu, maka sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok permasalahan yang akan dibahas, perlu adanya suatu batasan pengertian tentang Kepemimpinan.

"Organisasi formal merupakan sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi daripada sekelompok orang-orang yang bekerja secara bersama-sama, menuju kearah tujuan bersama di bawah *kewenangan dan kepemimpinan*" (William G. Scott ; 1967 ; 103).

Organisasi-organisasi yang berkembang dalam masyarakat Tolaki, terdiri dari organisasi formal dan non formal (informal). Sifat dan status organisasi itu menentukan pula kedudukan/status kepemimpinan seseorang yang memimpinnya.

Kepemimpinan itu sendiri ditafsirkan oleh para ilmuwan dalam berbagai pengertian. Antara lain Kepemimpinan itu diartikan "sebagai seni untuk menciptakan kesesuaian faham atau kesetiaan, kesepakatan (leadership as the art of inducing compliance" (Ralph M. Stogdill ; 1974 : 9)

Jelasnya bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan pola interaksi sosial yang terjadi dalam suatu proses aktivitas dipimpin dan memimpin.

Di dalam komunitas suku Tolaki di Daerah Kabupaten Kendari. dikenal adanya aneka macam jenis kepemimpinan, antara lain ialah :

- kepemimpinan formal
- kepemimpinan formal tradisional
- kepemimpinan informal.

Sebelum diuraikan satu-persatu tentang bentuk-bentuk kepemimpinan tersebut di atas, perlu dikemukakan beberapa pengertian mengenai ketiga unsur kepemimpinan tersebut.

"Pemimpin formal ialah orang yang oleh organisasi tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya" (Dra. Kartini Kartono ; 1983 : 5)

Pengangkatan secara resmi atas diri seorang Pemimpin formal bukanlah merupakan jaminan akan penerimaan secara baik oleh anggota-anggota organisasi yang dipimpinnya. Terkadang seorang pemimpin formal harus bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan segenap anggota masyarakat terutama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang beraneka ragam keinginannya.

Pemimpin formal ini pendekatannya lebih banyak berorientasi ke atas atau kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Pada umumnya pemimpin formal (formal leader) ini lebih banyak dikenal istilah "Kepala" seperti; Kepala Daerah, Kepala Kecamatan, Kepala Desa, atau Kepala Kelurahan. Pemimpin formal itu ditetapkan atas dasar legitimasi (surat keputusan) pejabat yang berwenang untuk itu.

Sedang Kepemimpinan Formal Tradisional adalah Pemimpin yang pengangkatannya melalui saluran administrasi kemasyarakatan

dalam daerah pedesaan. Pemimpin formal tradisional itu dipilih langsung oleh rakyat menurut tradisi pengangkatan pimpinan setempat, misalnya Puu Tobu dan Kepala Kampung.

Pola kepemimpinan yang demikian ini sudah tidak terdapat di Daerah Sulawesi Tenggara sekarang ini. Khusus di Daerah Kabupaten Kendari, pola kepemimpinan seperti ini hanya berkembang hingga pertengahan abad XX, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 1965.

Bentuk kepemimpinan yang ketiga ialah Pola Kepemimpinan Informal. (Informal leader). Kepemimpinan yang demikian ini tidak berdasarkan kepada pengangkatan secara resmi atau melalui pemilihan, tetapi hanya merupakan pengakuan dari masyarakat.

"Pemimpin informal ialah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin; namun karena memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat" (Drs. Kartini Kartono ; 1983 : 5).

Dibanding dengan Pemimpin Formal, kedudukan Pemimpin Informal lebih menjamin penerimaan masyarakat, sebab dengan keunggulan serta sifat-sifat kepemimpinan yang dimilikinya lebih memancarkan daya mempengaruhi lingkungan masyarakatnya.

Pemimpin informal semacam ini pada umumnya terdiri dari lapisan sosial yang sejak dahulu telah merupakan sumber kepemimpinan dalam masyarakat tersebut, atau dari lapisan sosial menengah yang telah terangkat oleh gerak sosial ke tingkat atas, misalnya; pegawai, pedagang, tokoh agama, pendekar, dukun dan lain-lain sebagainya.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan sosial yang terdapat dalam masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya tentang sistem kepemimpinan dalam masyarakat Tolaki di pedesaan, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Formal

Di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi sebagai lokasi penelitian Team, terdapat unsur kepemimpinan formal yaitu Kepala Desa dan Kepala Kelurahan yang disebut Lurah.

Syarat-syarat pengangkatan Pemimpin formal seperti yang di-

sebutkan di atas adalah berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa.

Kepala Desa dalam wilayah pemerintahan Daerah Tingkat II Kendari diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Pejabat desa yang diangkat itu adalah calon yang terpilih serta memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Desa.

Syarat-syaratnya adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD. 1945.
- c. Berkelakuan baik, jujur, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat dalam organisasi ataupun kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e. Mempunyai hak pilih dan dipilih berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.
- f. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun.
- g. Sehat jasmani dan rohani.
- h. Tercatat sebagai penduduk di desa yang bersangkutan.
- i. Memiliki ijazah pendidikan formal serendah-rendahnya ijazah Sekolah Dasar.

Persyaratan calon tersebut pada ayat (h) dan (i) di atas terkadang tidak terpenuhi. Kenyataan terdapat beberapa Kepala Desa karyawan ABRI yang tidak berijazah Sekolah Dasar dan berasal dari luar desa. Kepemimpinannya itu hanya didasarkan pada pengalaman kerja yang ditunjang oleh beberapa faktor sebagai faktor pendukung, antara lain :

- a. Memiliki integritas pribadi yang baik dengan warga desa.
- b. Mempunyai andil atau hubungan baik dengan unsur pimpinan di atasnya.
- c. Mempunyai ikatan keluarga di desa yang bersangkutan.
- d. Jujur dan berani.

Persyaratan calon pejabat Kepala Desa dan Kepala Kelurahan di daerah ini adalah sama. Kecuali perbedaan itu terdapat pada prosedur pengangkatannya.

Meskipun demikian secara kenyataan masih terdapat pengangkatan Kepala Desa di beberapa tempat dalam Daerah Sulawesi Tenggara yang menyimpang dari ketentuan umum tersebut di atas. Di beberapa Desa terutama yang pejabatnya terdiri dari karyawan ABRI, pengangkatan pimpinannya berdasarkan penunjukan langsung dari Camat atau Bupati, tanpa melalui proses pemilihan oleh warga desanya.

Hak, Wewenang dan Kewajiban Pemimpin Formal

Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dalam kedudukannya selaku Pemimpin Pemerintahan Desa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Kepala Kelurahan menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu :
 - 1) menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 - 2) mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - 3) mempertanggung jawabkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - 4) mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa seperti yang dimaksud di atas, Kepala Desa/Kepala Kelurahan wajib :

- bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang melalui Camat;
- memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Selanjutnya di dalam pengembangan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa/Kepala Kelurahan selaku pejabat eselon bawah menempuh beberapa jalur kedinasan antara lain :

- a. Jalur keatas (vertikal mobility), yaitu menerima, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pejabat di atasnya;

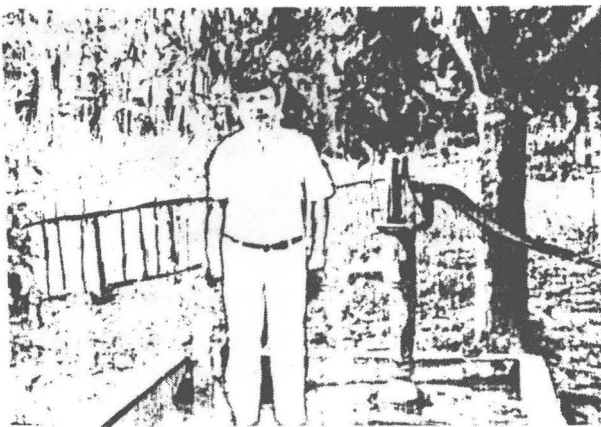
- b. Jalur ke bawah adalah jalur pelayanan terhadap seluruh warga masyarakat desa;
- c. Jalur ke samping yaitu jalur koordinasi dengan organisasi-organisasi masyarakat di mana Kepala Desa memegang peranan koordinatif;
- d. Jalur ke luar yaitu jalur konsultasi dan kerja sama dengan pemerintah desa di sekitarnya;
- e. Jalur ke dalam yaitu jalur pembinaan aparat pemerintahannya (intern organisasi).

Atribut/Simbol Kepemimpinan.

Di dalam lingkungan masyarakat Tolaki terutama masyarakat yang berada di pedesaan pada umumnya menyebutkan Kepala Desanya dengan panggilan "*O Desa*", yang sama artinya dengan sebutan Pak Desa.

Kecuali dengan gelar *O Desa*, Kepala Desa mempunyai pula tanda-tanda pengenal seperti yang kelihatan pada foto ini.

- a. Pakaian dinas model safari, berwarna abu-abu atau putih.
- b. Pet atau pici warna biru.
- c. Tanda pangkat kembang persegi di atas balak berwarna biru.
- d. Tanda pelantikan.
- e. Simbol Korpri.



*Foto : Kepala Desa Benua Dengan
- Simbol Kepemimpinannya*

Atribut/tanda-tanda kepemimpinan seperti yang terlihat di sebelah, hanya dipergunakan oleh Kepala Desa. Pejabat-pejabat desa (perangkat) desa lainnya tidak mempunyai tanda-tanda tertentu kecuali panggilan menurut jabatannya masing-masing seperti; Pak Sekretaris, Pak RK, Pak RT, Pak Imam, Komandan Hansip dan lain-lain.

Berbeda dengan pejabat Kelurahan di mana Kepala Kelurahan dan seluruh perangkat pemerintahannya, mempunyai atribut tertentu sesuai tingkat penggolongannya.



Dalam foto ini nampak Kepala Kelurahan Inalahi dalam pakaian dinas lengkap yaitu baju dan celana putih, peci berwarna biru, tanda pangkat di pundak, serta simbol pelantikan yang menempel di saku kanan.

Perbedaannya dengan Kepala Desa ialah pada dasar tanda pangkatnya yang berwarna kopi susu, sedang Kepala Desa berwarna biru tua.

Prosedur Pengangkatan dan Upacara Pelantikan.

Menurut ketentuan yang berlaku, pengangkatan Kepala Desa selaku Pemimpin formal di desa, harus melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh seluruh warga desa (Indonesia) yang telah berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin.

Dalam hal pemilihan Kepala Desa, yang dimaksud dengan asas :

- a. Langsung, ialah pemilihan mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara atau tingkatan.
- b. Umum, yaitu pada dasarnya semua penduduk desa warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan tertentu berhak memilih.
- c. Bebas, dalam arti memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapa pun.
- d. Rahasia, artinya memilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan itu tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

Pengajuan calon sekurang-kurangnya tiga orang. Calon yang diajukan diperiksa terlebih dahulu pemenuhan persyaratannya sebelum diajukan ke forum pemilihan. Setelah pemilihan selesai dilaksanakan, calon-calon tersebut diajukan kepada Camat/Bupati untuk penentuan calon terpilih. Biasanya calon yang mendapatkan suara terbanyak itulah yang diangkat menjadi Kepala Desa.

Pelantikan Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas nama Gubernur. Pelantikan dilakukan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat, pimpinan organisasi dan seluruh warga desa.

Untuk pelantikan Kepala Kelurahan selalu didahului dengan pengucapan sumpah jabatan.

Sebelum memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh pejabat yang berwenang mengangkat atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Sumber Pendapatan, Penerimaan Keuangan Desa.

Sumber pendapatan desa adalah berasal dari pendapatan asli dari desa dan pemberian/bantuan Pemerintah Daerah.

- a. Pendapatan asli desa sendiri yang terdiri dari :
 - hasil tanah-tanah kas desa ;

- hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
 - hasil dari gotong royong masyarakat;
 - lain-lain hasil dari usaha desa yang syah.
- b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
- Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
 - sebagian dari pajak dan restribusi daerah yang diberikan kepada desa;
 - lain-lain pendapatan yang syah.
- c. Setiap tahun Kepala Desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.

2. Kepemimpinan Formal Tradisional.

Apabila kita kembali mengkaji batasan pengertian kepemimpinan formal tradisional dalam arti Pemimpin yang pengangkatannya melalui saluran administrasi kemasyarakatan yang kemudian mendapatkan pengakuan dari pemerintah di atasnya, maka dapatlah dimasukkan dalam bagian ini adanya Pemerintahan Tobu dan Kampung sebagai unsur kepemimpinan formal tradisional di Daerah.

Sistim kepemimpinan formal tradisional adalah demokratis yang tumbuh dan berkembang di atas dasar prinsip kolektif. Dalam bentuk kepemimpinan yang demikian ini mengutamakan unsur relasi antara pribadi pemimpin dengan orang yang dipimpinnya.

Sehubungan dengan hal ini, dituntut pemilikan kualitas-kualitas yang merupakan persyaratan untuk diangkat sebagai Pemimpin masyarakat (Puu Tobu dan Kepala Kampung), sebagai berikut :

a. *Syarat Pengangkatan Puu Tobu.*

Untuk diangkat menjadi Puu Tobu diperlukan beberapa persyaratan, antara lain :

- Berasal dari lapisan sosial tertentu (golongan penguasa) yaitu golongan Puu Tobu;

- Mempunyai sejumlah keunggulan yang merupakan keutamaan dari calon Puu Tobu;
- Mempunyai kemampuan mengadakan koordinasi dan mengkonsepsikan sekaligus menjabarkan tujuan-tujuan umum kelompoknya;
- mampu mengayomi masyarakat yang dipimpinnya;
- kuat, berani dan berwibawa.

b. *Syarat Pengangkatan Kepala Kampung.*

Kepemimpinan Kepala Kampung merupakan peralihan dari sistem kepemimpinan formal tradisional murni ke sistem kepemimpinan formal. Syarat-syarat kepemimpinannya masih banyak dipengaruhi oleh tradisi pengangkatan pemimpin tradisional, yaitu :

- Berasal dari lapisan masyarakat penguasa;
- Mempunyai sejumlah kualitas/keutamaan dari kelompoknya;
- sanggup membawa kelompoknya kepada tujuan yang pasti dan menguntungkan (tujuan kesejahteraan);
- Bersikap adil dan tidak berat sebelah;
- Memiliki kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu;
- Memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus;
- Mendapat dukungan dari mayoritas kelompok masyarakat.

Jelasnya bahwa menjadi syarat mutlak dalam pemilihan Pemimpin formal tradisional maupun Pemimpin informal di daerah ini adalah pemilikan dominasi yang didasari atas status sosial dan kualitas-kualitas unggul. Kepemimpinan formal tradisional di Daerah Sulawesi Tenggara khususnya dalam komunitas suku Tolaki, selalu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok pada saat dan kurun waktu tertentu.

Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan Puu Tobu/ Kepala Kampung sebagai Pemimpin kelompok masyarakat adalah kemampuan ekonomi pemimpin itu sendiri. Adalah merupakan

tradisi dalam kepemimpinan tradisional di daerah ini, bahwa seorang Pemimpin harus mampu mengorbankan segalanya untuk kepentingan orang banyak (Inf. : 13)

Pada umumnya Pemimpin tradisional di lingkungan masyarakat Tolaki terdiri dari orang kaya, mempunyai tanah yang luas, hewan ternak yang banyak, rumpun sagu yang luas. Hal ini tidak mengherankan karena Kepemimpinan tradisional tidak mengharapkan bantuan dari pihak pemerintahan di atasnya baik di dalam menghadapi rumah tangga pemerintahannya, maupun di dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatannya.

Hak dan Kewajiban.

Dalam komunikasi antara atasan dan bawahan atau antara pemimpin dan yang dipimpin dalam suatu kelompok, Pemimpin mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Mempertahankan kesatuan dan kelangsungan hidup kelompok melalui kerja-sama yang baik;
- b. Mendidik dan menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri bawahan;
- c. Menyadarkan anggotanya bahwa kepentingan obyektif dari organisasi tidak terlepas dari pada realisasi tujuan subyektif dari individu (Dr. phil. Astrid S. Susanto ; 1983 : 25).

Di samping itu Kepala Kampung selaku pemimpin komunitas kecil di bawah pemerintahan Distrik, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan keadaan kemasyarakatan kepada Kepala Distrik.

Atribut/Simbol Kepemimpinan.

Salah satu simbol/atribut kepemimpinan formal tradisional di Daerah Sulawesi Tenggara ialah rumah tempat tinggal pemimpin. Pada umumnya rumah pemimpin tradisional di lingkungan masyarakat Tolaki mempunyai bentuk yang berbeda serta berukuran lebih luas dibanding dengan rumah penduduk biasa. Rumah Puu Tobu atau Kepala Kampung pada umumnya difungsikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan di wilayahnya. Di serambi muka terdapat *gandaria* (ruang tamu) yang luas, tempat Puu Tobu atau Kepala Kampung memimpin sidang/musyawarah (*mepolahadere*).

Di samping rumah dengan bentuk yang spesifik sebagai simbol kepemimpinan formal tradisional di daerah ini, maka pada zaman Kerajaan Konawe (hingga awal abad XX), masih terdapat adanya atribut pemimpin pemerintahan dalam bentuk pakaian. Masing-masing pejabat pemerintahan Tobu atau Kampung, mengenakan selempang yang berwarna warni menurut kedudukan mereka di dalam pemerintahan.

Prosedur Pengangkatan.

Pengangkatan seorang Pemimpin formal tradisional adalah melalui penunjukan/kenaikan secara otomatis. Apabila salah seorang pemimpin telah meninggal dunia atau karena lanjut usia, maka diangkatlah salah seorang putera atau salah satu dari pada anggota keluarganya yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan kepemimpinan seperti yang disebutkan di atas.

Dalam hal-hal yang luar biasa di mana tidak terdapat salah seorang putera/keluarga yang mampu menjalankan pemerintahan, maka menantu pun dapat ditunjuk menjadi pemimpin menggantikan kedudukan isteri yang seharusnya mewarisi kedudukan tersebut.

Pengangkatan Kepala Kampung di sekitar awal abad XX, sudah melalui pemilihan (sistem pemilihan terbatas), yaitu oleh tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang selama itu dianggap sebagai unsur pimpinan dalam masyarakat. Calon pemimpin yang terpilih diajukan kepada Kepala Distrik untuk mendapatkan pengukuhan.

3. Kepemimpinan Informal

Sejak adanya manusia yang berkumpul dan bekerja sama, sejak itupula lahirnya pemimpin-pemimpin masyarakat yang dalam tradisi suku Tolaki mendapatkan pengakuan spontan dari masyarakat.

Pemimpin-pemimpin formal; para tetua desa, Guru/Kepala Sekolah, penghulu adat, pemimpin agama, guru mengaji, guru silat, dukun dan lain-lain, adalah pemimpin yang tidak legal tetapi dianggap legitim karena mendapat dukungan dan ketaatan anggota kelompok atas gagasan serta keputusan-keputusannya.

Persyaratan untuk terpilihnya seorang sebagai pemimpin informal tidak diatur dalam suatu ketentuan seperti apa yang di-

syaratkan dalam pemilihan Pemimpin formal ataupun Pemimpin formal tradisional, akan tetapi persyaratan-persyaratan itu lebih dititik beratkan kepada penerimaan atau pengakuan dari masyarakat.

Seorang tokoh masyarakat atau tetua desa yang dianggap sebagai pemimpin di dalam kelompok-kelompok masyarakat, umumnya terdiri dari orang-orang yang :

- memiliki kualitas dan keterampilan teknis tertentu;
- memiliki daya kemampuan mempengaruhi orang lain di dalam usaha pencapaian tujuan tertentu;
- memiliki sifat-sifat jujur, arif dan bijaksana;
- ikhlas berkorban untuk kepentingan orang banyak;
- mempunyai hubungan yang baik dengan segenap anggota masyarakat, pemerintah desa dan unsur-unsur pimpinan masyarakat lainnya.

Pengaruh pemimpin-pemimpin informal ini dapat bersifat positif, namun juga sering bersifat negatif. Demikian pula dalam menanamkan pengaruh, sugesti, larangan dan dukungan kepada masyarakat luas perlu mendapat perhatian.

”Besarnya peranan pemimpin-pemimpin informal ini tergantung pula pada tinggi rendahnya status sosial yang diperolehnya” (Dra. Kartini Kartono ; 1983 : 6)

Status sosial ini pada umumnya dicapainya karena didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Berasal dari keturunan bangsawan, keluarga kaya, dan lain-lain :
 - Taraf pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan orang lain;
 - Pengalaman hidup yang lebih banyak;
 - Partisipasi yang tinggi dalam aktivitas masyarakat;
 - Memiliki sejumlah konsep pemikiran yang sangat berarti untuk pembangunan masyarakat.

Hak dan Kewajiban.

Pemimpin-pemimpin informal dalam gerak sosialnya mem-

punyai hak, kewajiban dan tanggung jawab ke atas dan ke bawah.

Ke atas (vertikal mobility), para pemimpin informal mengembangkan program pemerintah Desa. Ke bawah, para pemimpin informal berkewajiban Desa. Ke bawah, para pemimpin informal berkewajiban mendorong, menggerakkan dan menjadi pola anutan masyarakat. Ke samping (horisontal mobility), pemimpin-pemimpin informal menjalin kerja-sama dalam usaha pembinaan masyarakat.

Atribut/Simbol Kepemimpinan.

Tidak terdapat tanda-tanda khusus yang dapat menunjukkan kedudukan kepemimpinan informal di daerah ini. Kecuali dalam bentuk gelar/sebutan untuk masing-masing tokoh masyarakat, seperti :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| — guru sekolah | disebut <i>tuangguru</i> |
| — kepala sekolah | disebut <i>kapala sikola</i> |
| — guru mengaji | disebut <i>oguru</i> |
| — pemimpin agama | disebut <i>pua ima</i> |
| — guru/pelatih silat | disebut <i>pandegara</i> |
| — pemimpin organisasi | disebut <i>kotua</i> , dan lain-lain. |

Pengangkatan pemimpin-pemimpin informal di desa tidak melalui prosedur tertentu, tetapi langsung melekat pada diri seorang pemimpin.

BAB IV

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL

ORGANISASI DALAM KEGIATAN SOSIAL

Salah satu kecenderungan hidup manusia adalah hidup bersama (berkelompok). Di dalam kelompok itulah berlangsungnya aktivitas-aktivitas sosial yang secara tertib dan bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, Maka lahirlah kelompok-kelompok sosial dalam berbagai wadah (organisasi) berdasar atas tujuan yang ingin dicapai.

Kelompok-kelompok sosial itu ada yang bersifat resmi (organisasi formal) dan ada pula yang tidak resmi (organisasi informal)

Organisasi formal mempunyai personalia pengurus yang dipilih, mempunyai aturan-aturan kepengurusan, hak dan kewajiban serta kedudukan pengurus.

Sebaliknya ada kelompok (organisasi informal), yang tidak mempunyai organisasi kepengurusan dan peraturan-peraturan resmi. Organisasi informal demikian itu biasanya terjalin atas hubungan keluarga, kekerabatan yang sifatnya hanya sementara (insidental). Di atas kelompok-kelompok sosial itulah munculnya kepemimpinan yang dibedakan atas jenis dan ruang gerak organisasi itu.

Organisasi Sosial Formal.

Di dalam masyarakat pedesaan Sulawesi Tenggara khususnya di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi sebagai lokasi penelitian Team, terdapat beberapa organisasi sosial formal, yaitu sebagai berikut :

1. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD, adalah suatu lembaga masyarakat di Desa dan Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat. LKMD ini merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam aspek aspek kehidupan dan penghidupannya.

Kegiatan LKMD diarahkan kepada usaha mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.



a. *Tujuan*

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bertujuan membantu Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan/hambatan dalam pembinaan wilayah.

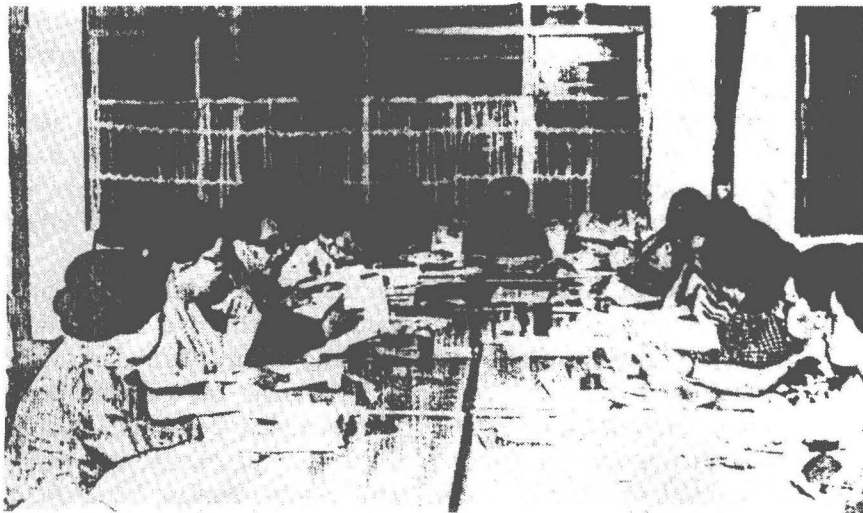
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak hanya merupakan organisasi penyelenggara yang sifatnya hanya menunggu program pembangunan yang diturunkan dari atas, tetapi lebih dari itu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa justru merupakan organisasi perencanaan pembangunan di desa/kelurahan. Tujuannya ialah agar pembangunan yang iprogramkan ke desa betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan prioritas-prooritas yang diajukan oleh lembaga tersebut.

b. *Pusat Kegiatan.*

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena sasaran pembangunan nasional bangsa kita adalah masyarakat di mana sebagian besar dari masyarakat Indonesia hidup di pedesaan, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mutlak berkedudukan di desa/kelurahan. Kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi lembaga masyarakat tersebut dipusatkan pada Kantor LKMD di masing-masing desa/kelurahan yang selama ini masih bergabung dengan Kantor desa/kelurahan. Kegiatan operasionalnya dipusatkan pada lingkungan di mana kegiatan dari masing-masing aspek pembangunan diselenggarakan, misalnya kegiatan pembangunan sektor pendidikan dipusatkan di sekolah sedang pembinaan mental dipusatkan di mesjid.

c. *Kegiatan*

Di dalam kedudukan LKMD selalu satu-satunya badan yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan masyarakat di desa dan kelurahan, maka kegiatan LKMD senantiasa berorientasi kepada tugas pokoknya yaitu :



Peserta Temu.Karya LKMD sedang berdiskusi untuk membahas rencana pembangunan desa

1). Perencanaan Pembangunan Desa.

Melalui wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, diadakan perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan baik untuk jangka pendek, maupun untuk pembangunan jangka panjang.

Dalam kegiatan seperti ini, LKMD melibatkan segenap unsur pemimpin di dalam masyarakat, sebab para cendekiawan, ulama, Pimpinan Organisasi, usahawan dan Tokoh-tokoh Masyarakat di desa adalah merupakan komponen dari pada LKMD.

2) Penyelenggaraan Pembangunan

Di dalam usaha menyelenggarakan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi secara aktif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah, maupun melalui swadaya gotong royong masyarakat, LKMD Desa Benua dan Kelurahan Inalahi telah melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan, antara lain sebagai berikut :

a) *Kegiatan perbaikan jalan.*



Gotong royong yang digerakkan LKMD dalam perbaikan jalan Desa Benua

Kegiatan perbaikan dan pemeliharaan jalan di desa-desa dalam wilayah Sulawesi Tenggara sebagian besarnya menjadi tanggung jawab masyarakat desa setempat. Bahkan jalan raya di pusat kota pun terkadang harus meminta uluran tangan masyarakat untuk memperbaikinya.

Di desa Benua yang hanya mempunyai satu-satunya jalan desa yang menghubungkan dengan jalan raya jalur Kendari — Kolaka, hampir setiap bulan dikerjakan oleh masyarakat secara gotong royong yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa dan aparatnya. Demikian pula keadaan kelurahan Inalahi dan desa-desa lainnya di Sulawesi Tenggara dimana perbaikan/pemeliharaan jalan desa berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan.

- b). Kegiatan-kegiatan pembangunan di desa atau kelurahan baik yang sifatnya menunjang proyek pembangunan desa maupun dalam swadaya masyarakat, seperti :
- Kegiatan pembangunan gedung sekolah;
 - pembangunan Balai Desa;
 - pembangunan Kantor Desa;
 - pembangunan Mesjid Desa;
 - pembuatan sumur umum;
 - pembangunan pasar desa;
 - pembangunan pos perondaan;
 - pembuatan lapangan olah raga;
 - perbaikan jembatan;
 - perbaikan saluran air;
 - dan beberapa kegiatan pembangunan lainnya.

3) Pembinaan Masyarakat.

Dalam usaha menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat serta pemilikan pengetahuan siap dan pembentukan manusia Indonesia yang bermental Pancasila, berbudi luhur dan mampu mengembangkan ketahanan desa/kelurahan, maka LKMD Desa Benua dan Kelurahan Inalahi telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan, keagamaan, olah raga, kesenian dan lain-lain sebagainya.

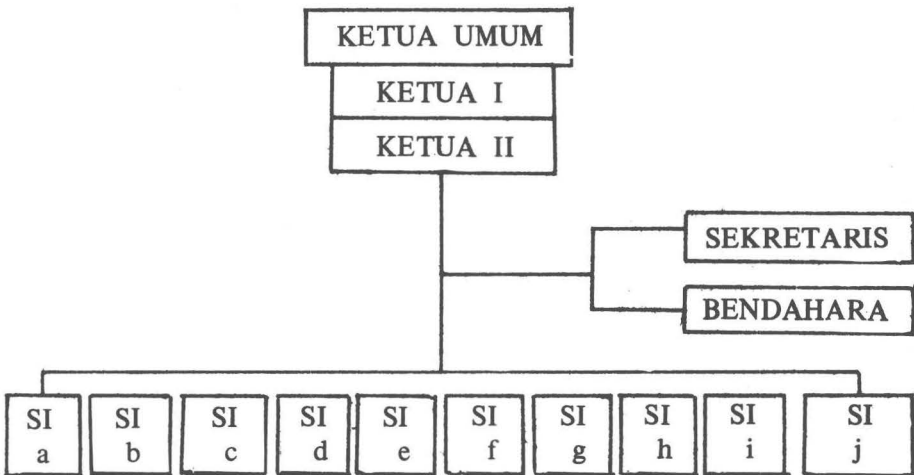
d. *Kepengurusan*

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah pembantu Pemerintah Desa dan Kelurahan di bidang pembangunan dimana duduk sebagai anggotanya unsur-unsur pimpinan RK/RT dan warga masyarakat yang dipandang perlu duduk di dalam kepengurusan lembaga tersebut.

1) Susunan Pengurus LKMD terdiri dari :

- Ketua Umum
- Ketua I
- Ketua II
- Sekretaris
- Bendahara
- Seksi-seksi :
 - a. Seksi Keamanan
 - b. Seksi Pendidikan
 - c. Seksi Penerangan
 - d. Seksi Perekonomian
 - e. Seksi Pembangunan
 - f. Seksi Agama
 - g. Seksi Kesehatan
 - h. Seksi Pemuda
 - i. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - j. Seksi PKK.

2) Struktur Organisasi L.K.M.D.



2. Lembaga Musyawarah Desa.

Lembaga Musyawarah Desa (L.M.D.), adalah suatu badan/ organisasi Pemerintah. Organisasi seperti ini terdapat hampir di semua Desa/Kelurahan dalam Daerah Sulawesi Tenggara.

a. *Susunan Kepengurusan*

Sebagai organisasi pemerintah, L.M.D. mempunyai susunan pengurus, peraturan-peraturan serta program kegiatan yang diselaraskan dengan program pembangunan desa. Susunan pengurusnya terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Anggota/Seksi.

b. *Keanggotaan*

Keanggotaan dalam organisasi ini terdiri dari anggota pengurus dan anggota biasa. Di Desa Benua, anggota pengurusnya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Ketua L.M.D. dijabat oleh *Pongae*, bekas Kepala Kampung Benua (sebelum berstatus desa). Anggota pengurus lainnya terdiri dari aparat Pemerintah Desa dan tetua desa.

c. *Pusat Kegiatan*

Lokasi kegiatan meliputi keseluruhan wilayah desa. Pusat kegiatannya ialah di Balai Desa.

d. *Kegiatan*

Sebagai badan/organisasi pemerintah yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah di atas pemerintahan desa, L.M.D. mengemban kegiatan kemasyarakatan di desa. L.M.D. merupakan unsur pembantu pemerintah desa di dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

Dalam jalur ke atas, L.M.D. merupakan perwakilan rakyat di desa yang menampung dan mengolah aspirasi masyarakat. Ke bawah, L.M.D. membawakan suara pemerintah, sedang ke samping L.M.D. menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi sosial lainnya.

e. *Tujuan*

Tujuan umum dari organisasi ini sama dengan tujuan organisasi-organisasi sosial lainnya, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan U.U.D 1945.

Tujuan khususnya ialah menumbuhkan dan mengembangkan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, berpe-
merintah dan bermasyarakat.

33. Dharma Wanita

Persamaan hak azasi manusia (emansipasi) adalah tuntutan hidup bagi masyarakat yang ber Pancasila. Konsekwensi dari per-
samaan hak azasi ini adalah bekerja dan berusaha bersama untuk
menciptakan masyarakat yang diidam-idamkan (masyarakat
makmur merata).

a. *Kepengurusan*

Sebagai organisasi wanita, maka kepengurusannya dilak-
sanakan oleh kaum wanita. Susunan pengurusnya terdiri
dari unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi.

Di Desa Benua Kecamatan Wawotobi, personil pengurus-
nya ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 1) Pembina | : | Kepala Desa Benua |
| 2) Ketua Umum | : | istri Kepala Desa |
| Ketua I | : | |
| Ketua II | : | |
| Ketua III | : | |
| 3) Sekretaris I | : | |
| Sekretaris II | : | |
| 4) Bendahara I | : | |
| Bendahara II | : | |
| 5) Seksi-seksi | : | |
| a) Seksi Organisasi | : | |
| b) Seksi Kerohanian | : | |
| c) Seksi Kebersihan | : | |
| Rumah Tangga | : | |
| d) Seksi Keuangan/ | : | |
| Arisan | : | |
| e) Seksi Pendidikan | : | |
| Ketrampilan | : | |
| f) Seksi Kesenian | : | |

g) Seksi Kesehatan :

h) Seksi Dekorasi :

b. *Keanggotaan*

Anggota-anggota dalam organisasi ini tidak ditentukan dalam suatu administrasi fisik organisasi. Anggota-anggotanya meliputi keseluruhan ibu-ibu dalam warga desa. Pimpinan organisasi bersifat mutlak dan melekat kepada istri kepala desa.

c. *Pusat Kegiatan*

Organisasi Dharma Wanita berada di setiap pusat pemerintahan; mulai di tingkat Pusat sampai di tingkat Desa. Kegiatan sehari-hari dari organisasi ini dipusatkan di kantor Desa.

d. *Kegiatan*

Sebagai organisasi partner Pemerintah, Dharma Wanita di tingkat Desa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya dalam bidang garapan wanita, misalnya :

- menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan wanita dengan kerjasama Departemen Sosial dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara;
- mengikuti Penataran P4 dan Permainan Simulasi P4;
- menyelenggarakan arisan;
- lain-lain kegiatan kewanitaan.

e. *Tujuan*

Tujuan yang ingin dicapai melalui wadah organisasi Dharma Wanita ini ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif kaum wanita.

4. **Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia**

Sesuai peranan Generasi Muda selaku penerus perjuangan bangsa dan pelopor generasi pembangunan dewasa ini, maka Pemerintah merasa perlu membentuk suatu organisasi sebagai wadah penggerak kegiatan pemuda.

a. *Kepengurusan*

Kepengurusan dalam organisasi ini disesuaikan dengan bidang-bidang kegiatan seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi tersebut. Untuk itu maka dalam susunan pengurus organisasi AMPI ini terdapat unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi. Sebagai gambaran kepengurusan dalam organisasi AMPI di tingkat desa, berikut ini diuraikan susunan pengurus AMPI Desa Benua, yaitu :

- 1) Ketua Umum :
 Ketua I :
 Ketua II :
- 2) Sekretaris :
 Wakil Sekretaris :
- 3) Bendahara :
 Wakil Bendahara :
- 4) Seksi-seksi :
 - a) Seksi Organisasi :
 - b) Seksi Pendidikan :
 dan Kaderisasi
 - c) Seksi Komunikasi:
 - d) Seksi Koperasi/ :
 Kewanitaan
 - e) Seksi Transmigrasi :
 - f) Seksi Olah Raga/
 Seni Budaya :
 - g) Seksi Pengembangan
 Program dan :
 Kemahasiswaan
 - h) Pengembangan :
 Program Kesiswa-
 an
 - i) Seksi Keputrian :
 - j) Seksi Pengerahan :
 Massa

Di dalam kepengurusan ini sudah melibatkan segala unsur dalam masyarakat yaitu; unsur Pemerintah, unsur organisasi, pemuda, tetua desa dan wanita.

b. *Keanggotaan*

Organisasi AMPI ini melibatkan keseluruhan warga desa sebagai anggota, terutama generasi muda. Tidak dapat ditentukan mana yang anggota dan mana yang bukan anggota.

c. *Pusat Kegiatan*

Desa adalah merupakan wilayah operasional dari pada program kegiatan AMPI. Kegiatan sehari-hari dipusatkan di Balai Desa atau di Kantor Kelurahan. Khusus kegiatan teknis, dipusatkan pada sanggar kegiatan masing-masing bidang kegiatan.

d. *Kegiatan*

Sebagai organisasi pendukung pemerintah, AMPI tingkat Desa giat membantu pemerintah desa di dalam pelaksanaan program pembangunan di desa. Di samping itu untuk peningkatan karier pengurus maupun anggota-anggota, AMPI senantiasa mengadakan kaderisasi melalui penataran, kursus dan latihan-latihan yang mengarah kepada pembentukan masa depan bangsa yang cemerlang.

Di dalam kegiatannya itu, AMPI senantiasa berorientasi pada program dari segala unsur pembangunan desa, baik program pemerintah Daerah, Dinas, maupun instansi yang langsung beroperasi di desa.

e. *Tujuan*

Tujuan utama dari organisasi ini ialah untuk membantu pemerintah secara aktif di dalam proses berlangsungnya pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya.

Tujuan khusus yang ingin dicapai ialah terciptanya kondisi masyarakat yang dinamis, generasi muda yang cerdas, kuat dan produktif, serta kehidupan masyarakat yang makmur merata.

5. **Karang Taruna**

Karang Taruna adalah organisasi kemasyarakatan di bidang

pelayanan kesejahteraan sosial anak dan remaja. Organisasi ini bersifat swadaya, dari, oleh dan untuk masyarakat remaja. Dalam tehnik operasionalnya, Karang Taruna ini dibina dan dikembangkan secara fungsional oleh Departemen Sosial sesuai Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, GBHN yang menyangkut Pembinaan Generasi Muda.

Organisasi tersebut adalah non politik. Namun terdapat hampir ke seluruh desa/kelurahan di Daerah Sulawesi Tenggara. Hanya namanya yang berbeda-beda karena masing-masing desa memberikan nama organisasinya sendiri-sendiri.

Organisasi Karang Taruna di Desa Benua Kecamatan Wawotobi diberi nama oleh anggotanya dengan sebutan Karang Taruna Satriya.

a. *Kepengurusan*

Setiap Karang Taruna mempunyai pengurus yang dipilih secara resmi dan bertanggung jawab atas terselenggaranya dan perkembangan Karang Taruna.

Jumlah pengurus Karang Taruna disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis kegiatan yang akan diselenggarakan.

Secara umum pengurus Karang Taruna terdiri dari; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi yang disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang digarap.

Karang Taruna Satriya di Desa Benua mempunyai susunan pengurus sebagai berikut :

- 1) K e t u a : Kepala Desa Benua
Wakil Ketua :
- 2) Sekretaris :
- 3) Bendahara :
Wakil Bendahara :
- 4) Seksi-Seksi :
 - a) Seksi Olah Raga :
 - Bola kaki :
 - Volley Bal :
 - Badmington :

- Tennes meja :
- Sepal takraw :
- b) Seksi Pembinaan :
Mental
- c) Seksi Kewanitaan :
- d) Seksi Ketrampilan :
 - Pertukangan kayu :
 - Pertukangan batu :
 - Penjahitan :
 - Tukang cukur :
 - Bengkel motor :
 - Servis radio :
- e) Seksi Penerangan :

Di samping pengurus Karang Taruna seperti tersebut di atas, terdapat juga pelindung yaitu Pemerintah dan pembina dari Instansi Sosial dan Instansi lain yang berkepentingan serta pemuka-pemuka masyarakat setempat. Pengurus Karang Taruna ini dipilih dan ditetapkan sebagai pengurus selama satu periode (selama 2 tahun).

b. *Keanggotaan*

Keanggotaan dalam organisasi ini tidak terbatas jumlah tertentu, tetapi meliputi keseluruhan masyarakat terutama anak-anak dan remaja-remaja desa yang setiap saat diperhadapkan dengan masalah-masalah sosial (Social problem).

c. *Pusat Kegiatan*

Pada umumnya organisasi Karang Taruna tumbuh dan berkembang di wilayah desa. Hampir di semua desa/kelurahan di Daerah Sulawesi Tenggara terdapat organisasi Karang Taruna. Kegiatan-kegiatannya dipusatkan pada Sasana Krida Karang Taruna setempat.

d. *Kegiatan*

Jenis-jenis kegiatan Karang Taruna terdiri dari :

- 1) Kegiatan yang bersifat rekreatis; berupa olah raga, kesenian dan rekreasi

- 2) Kegiatan yang bersifat pendidikan dan pembinaan yaitu :
Kursus-kursus, ceramah keagamaan dan lain-lain.
- 3) Kegiatan yang bersifat ekonomis produktif, berupa kursus ketrampilan dan usaha ekonomis produktif.
- 4) Kegiatan yang bersifat sosial dan menunjang program lain misalnya usaha-usaha :
 - gotong royong
 - kamtib/hankamra
 - keluarga berencana
 - kesehatan lingkungan
 - perbaikan gizi makanan, dan sebagainya.

e. *Tujuan*

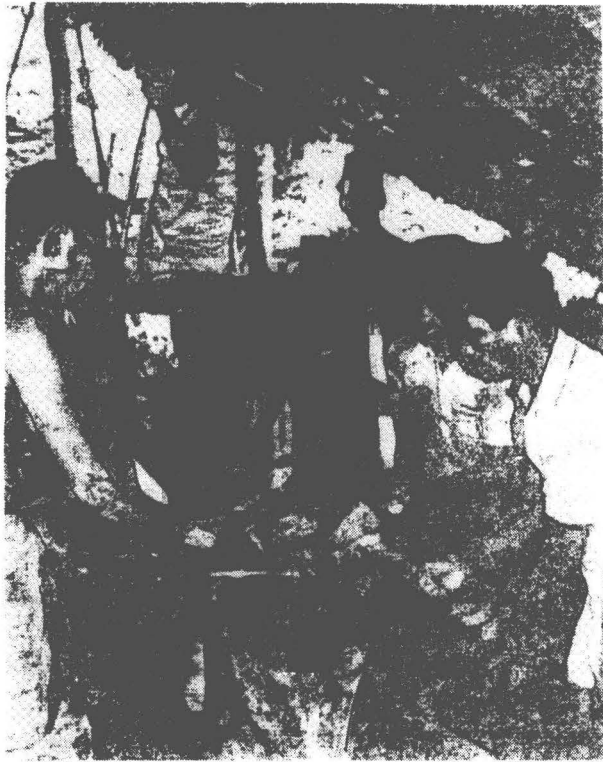
Tujuan umum daripada Karang Taruna ini adalah mempersiapkan segenap generasi muda (anak/remaja) untuk menghadapi masa depannya. Untuk tujuan tersebut, Karang Taruna berusaha memberikan modal pengetahuan siap kepada setiap generasi muda dalam masyarakat agar mampu mengembangkan hidupnya tanpa menggantungkan hidup kepada orang lain. Usaha-usaha itu antara lain :

- 1) Membantu anak dan remaja dalam mengisi waktu terluang dengan kegiatan kreatif dan rekreatif (olah raga dan kesenian);
- 2) Membantu anak dan remaja dalam memupuk bakat dan kemampuan dengan mengembangkan ketrampilan yang bersifat sosial ekonomis;
- 3) Membantu dan mengarahkan anak dan remaja kepada usaha-usaha kehidupan yang positif dilingkungan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan sosial, seperti ketrampilan menjahit bagi remaja putri, atau perbengkelan motor bagi remaja putra.

ORGANISASI SOSIAL INFORMAL

1. Perkumpulan Kerja Bebas

Perkumpulan Kerja bebas ialah semacam kelompok kerja bersama (gotong royong) secara sukarela. Pekerjaan semacam ini tidak menuntut upah ataupun balas jasa, melainkan hanya berupa pengabdian masyarakat.



Di daerah Sulawesi Tenggara khususnya di lingkungan masyarakat Tolaki di Daerah Kendari, bentuk-bentuk kerja gotong royong tersebut pada umumnya terjalin secara spontan dalam kegiatan pembangunan desa, seperti :

- 1) Pendirian mesjid desa, sekolah, pasar, pos jaga dan sebagainya;
- 2) Perbaikan jalan, jembatan dan saluran air;
- 3) Pembuatan lapangan olah raga, rumah pesta dan lain-lain sebagainya.

a. *Kepengurusan*

Dalam kegiatan kerja semacam ini tidaklah mempunyai pengurus secara resmi (secara legal). Di dalam perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan gotong royong seperti ini biasanya dipimpin oleh salah seorang dari unsur pemerintah atau pribadi yang dituakan.

b. *Keanggotaan*

Sebagai suatu pekerjaan sosial, umumnya masyarakat di pedesaan secara sadar tanpa diminta/diperintah, berusaha untuk mengambil bagian dalam setiap kegiatan seperti itu. Oleh karena itu di dalam perkumpulan kerja bebas sebagai salah satu organisasi informal di bidang sosial, tidak dapat ditentukan siapa, berapa dan bagaimana syarat keanggotaan. Siapa saja yang ikut dalam pekerjaan itu dan berapa saja jumlahnya, itulah yang merupakan anggota dari perkumpulan kerja tersebut. Organisasi kerja semacam ini sangat bersifat sementara.

c. *Pusat Kegiatan*

Kegiatan kerja gotong royong seperti yang diuraikan di atas, berlangsung dalam lingkungan masyarakat pedesaan. Pusat kegiatannya ialah di desa dimana proses pembangunan itu berlangsung.

d. *Kegiatan*

Jenis-jenis gotong-royong dalam masyarakat pedesaan Sulawesi Tenggara masih berjejak pada hasil-hasil pembangunan desa sebelum adanya bantuan pemerintah berupa Inpres, subsidi desa maupun bantuan Pemerintah Daerah.

Di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi khususnya, demikian pula di desa-desa lain pada umumnya, sebagian besar bangunan fisiknya adalah hasil swadaya masyarakat yang dikerjakan secara gotong royong. Bahkan hingga sekarang ini sistem kerja gotong-royong adalah merupakan faktor utama dan menentukan keberhasilan pembangunan desa.

2. **Perkumpulan Kerja Terikat**

Perkumpulan kerja terikat adalah suatu organisasi sekerja yang menganut sistem balas jasa. Pengertian terikat dalam peristilahan ini dimaksudkan sebagai rasa keterikatan antara anggota dalam kelompoknya.

Di dalam komunitas suku Tolaki, kumpulan kerja semacam ini disebut *bobalu* atau *kindohosi*. (Inf : 12) Sistem kerja berkelompok demikian ini sudah berkembang dalam kekerabatan orang-orang Tolaki sejak nenek moyang mereka mengenal hidup berkelompok.

Tentang pengertian bobalu dan kindohosi ini n membedakan, yaitu :

Bobalu anggotanya lebih sedikit dan dilaksanakan dalam sehari penuh, yaitu dari pukul 07.00 sampai pada pukul 17.00.

Kindohosi, anggotanya lebih banyak dan pekerjaan hanya berlangsung separuh hari. Umumnya pekerjaan dalam kindohosi dimulai pada pukul 07.00 sampai pukul 12.00 siang.

Pada kumpulan kerja bobalu, anggota pekerja diberikan jaminan makan dan minum di siang hari, sedang pada kumpulan kerja kindohosi, anggota-anggotanya hanya diberikan minum dan sedikit makanan ringan di siang hari (Inf : 24)

a. *Kepengurusan*

Dalam kerja demikian ini hampir tidak jelas kepengurusannya. Pimpinan kerja tidaklah berstatus Kepala atau Ketua dan juga tidak menetap pada diri seorang pribadi.

Biasanya pada kumpulan kerja semacam ini pimpinan pekerjaan bergilir pada pemilik-pemilik kerja (tuan rumah).

b. *Keanggotaan*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa anggota kelompok dalam kumpulan kerja kindohosi lebih besar daripada anggota kelompok kumpulan kerja bobalu, maka sebagai standart dapat diambil kebiasaan umum sebagai berikut;

- anggota kumpulan kerja bobalu terdiri dari 2 sampai 10 orang;
- anggota kumpulan kerja kindohosi, terdiri dari 5 sampai 20 orang.

Jumlah anggota ini pun tidak mutlak harus demikian, tetapi terkadang kurang atau lebih sesuai dengan volume pekerjaan yang akan diselesaikan.

c. *Pusat Kegiatan*

Organisasi kemasyarakatan yang demikian ini umumnya berorientasi dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. Sesuai dengan pokok-pokok kegiatannya, maka pusat kegiatan daripada organisasi kerja semacam ini ialah di lapangan pertanian (sawah, ladang atau kebun).

d. *Kegiatan*

Pokok-pokok kegiatannya ialah pekerjaan di bidang pertanian, yaitu dalam proses pengolahan sawah, ladang atau kebun. Jenis kegiatannya ialah pekerjaan membongkar tanah (memacul), menanam padi, membuat pagar bagi kelompok laki, menyabit bagi kelompok wanita, bahkan terkadang sampai kepada pemetikan hasil (panen).

e. *Tujuan*

Tujuan umum dari perkumpulan kerja semacam ini ialah memupuk kerjasama antara kerabat melalui pekerjaan atau kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Sedang tujuan khususnya ialah mempermudah dan mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan tanpa dirasakan sebagai beban fisik maupun material yang berat karena dilakukan secara bersama-sama.

Di samping perkumpulan-perkumpulan kerja seperti yang tersebut di atas, terdapat berbagai macam lagi perkumpulan-perkumpulan sosial yang timbul atas spontanitas masyarakat sendiri, karena sudah merupakan tradisi yang berkembang turun temurun.

Kegiatan penyelenggaraan pesta kawin atau kematian dilakukan secara gotong royong melalui kepanitiaan yang dibentuk untuk keperluan tertentu.

SISTEM KEPEMIMPINAN DI BIDANG SOSIAL

Lembaga sosial adalah pola aktivitas yang terbentuk untuk memenuhi pelbagai kebutuhan hidup manusia dalam hidup keteraturan (organisasi).

Adanya sistem hidup bersama di bawah suatu organisasi, diperlukan adanya administrasi yang teratur rapi dan unsur pimpinan (administrator).

Di atas telah diuraikan satu-persatu jenis organisasi sosial yang sementara ini berkembang di dalam interaksi sosial masyarakat pedesaan Sulawesi Tenggara. Pada bagian ini akan dijelaskan pula sistem kepemimpinan di bidang sosial yang pada garis besarnya terdiri dari Pemimpin Formal (formal leader) dan Pemimpin Informal (informal leader).

Baik pemimpin formal maupun pemimpin informal, keduanya adalah mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama yaitu selaku manajer (pimpinan). Perbedaannya hanya pada prosedur pengangkatan dari kedua unsur pemimpin tersebut.

1. Kepemimpinan Formal

Pemimpin formal di bidang sosial adalah pemimpin organisasi sosial yang pengangkatannya melalui prosedur resmi yang mendapatkan legitimasi dari Pemerintah yang berwenang.

Di atas telah disebutkan beberapa organisasi formal dalam kegiatan sosial, yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Musyawarah Desa, organisasi Dharma Wanita, AMPI dan Karang Taruna. Lembaga-lembaga/organisasi ini mempunyai administrasi formal di bawah pengaturan seorang pemimpin formal serta beberapa orang pengurus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan volume kegiatan organisasi tersebut.

a. *Syarat-syarat Anggota Pengurus.*

Anggota pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (L.K.M.D.), dan Lembaga Musyawarah Desa (L.M.D.) terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain; pemuka adat, agama, pendidik/cendekiawan, pemuda, wanita dan pimpinan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- 4) Sebagai penduduk Desa/Kelurahan dan bertempat tinggal tetap;
- 5) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

Syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat pokok yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi terutama pada organisasi formal termasuk organisasi-organisasi pemuda yaitu AMPI dan Karang Taruna serta organisasi wanita seperti Dharma Wanita dan PKK.

Di samping pemenuhan syarat-syarat kepemimpinan yang tersebut pada ayat (1) – ayat (5) di atas, kepemimpinan itu perlu pula ditunjang oleh beberapa faktor sebagai pendukung. Faktor-faktor itu antara lain terdiri dari :

a) Keturunan (kedudukan sosial)

Di dalam masyarakat pedesaan yang hidup dengan tradisi dan adatnya masing-masing, selalu menempatkan faktor keturunan seseorang pemimpin.

b) Pendidikan

Kepemimpinan di masa kini, telah menempatkan unsur pendidikan sebagai suatu prioritas. Seseorang yang tiada berpendidikan sangat sukar untuk menjadi pemimpin di dalam suatu lembaga/organisasi.

c) Jasa

Jasa-jasa baik terhadap masyarakat serta partisipasi seseorang terhadap pemerintah dan pembangunan selalu menjadi perhitungan di dalam pemilihan untuk pengangkatan seorang pemimpin;

d) Jabatan

Ada juga kepemimpinan yang melekat pada jabatan tertentu yang dimiliki oleh seseorang, misalnya; Pemimpin organisasi Dharma Wanita Tingkat Desa, melekat pada diri isteri Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam kedudukannya sebagai pendamping tugas suami. Isteri salah seorang Kepala Kantor Wilayah secara legal diangkat menjadi Ketua Dharma Wanita dalam unit kerja suaminya.

b. *Hak dan Kewajiban*

Dalam suatu organisasi formal, masalah hak dan kewajiban adalah merupakan hal yang pokok di dalam penetapan aturan-aturannya. Biasanya ketentuan-ketentuan itu ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. Secara umum hak dan kewajiban dari anggota/pengurus organisasi yang bergerak dalam kegiatan sosial adalah sebagai berikut :

1) Hak dan Kewajiban pengurus :

- Menyelenggarakan administrasi lembaga/organisasi;
- Mengadakan pembinaan anggota (kaderisasi) dalam bentuk rapat, penataran dan latihan;
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- Mengadakan koordinasi anggota dan hubungan dengan Dinas, Instansi dan organisasi ke dalam dan keluar desa;
- Mengadakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan anggota;
- Membantu pemerintah di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2) Hak dan kewajiban anggota

- Berhak untuk dipilih dan memilih;
- Berhak untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat dalam musyawarah;
- Berhak untuk mendapatkan pembinaan dan menikmati hasil pembangunan;
- Berkewajiban untuk mentaati aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi;
- Bersama-sama Pengurus, Pemerintah dan organisasi dalam melaksanakan pembangunan;
- Tunduk dan taat terhadap Pemerintah.

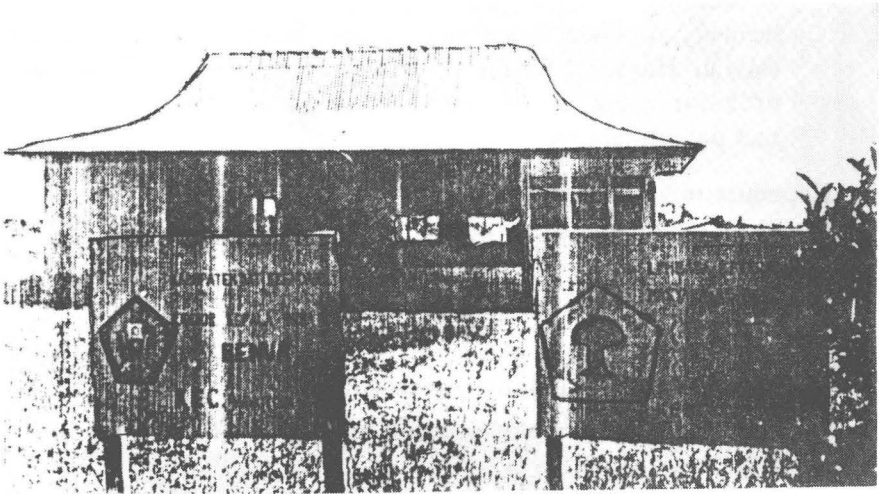
Secara singkatnya organisasi sosial formal di Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas pokoknya senantiasa mengemban fungsi sebagai berikut :

- 1) Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- 2) menanamkan pengertian dan kesadaran Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- 3) menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- 4) sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri;

- 5) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
- 6) membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan;
- 7) meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- 8) membina kerja-sama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- 9) melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

c. *Atribut/Symbol*

Tanda-tanda kepemimpinan dalam organisasi sosial di Desa/Kelurahan ialah bahwa masing-masing organisasi mempunyai papan nama yang dipancangkan di depan gedung perkantoran.



Kantor L.K.M.D. Desa Benua Yang Sementara Menumpang di Kantor Kepala Desa Benua

d. *Prosedur Pengangkatan*

Pengurus Lembaga/Organisasi sosial yang berstatus formal dipilih oleh masyarakat dalam prosedur pemilihan resmi

sesuai aturan pemilihan; yaitu pemilihan langsung, bebas dan rahasia. Yang ditentukan dalam pemilihan adalah jabatan Ketua, sekretaris dan Bendahara. Sedang anggota pengurus lainnya ditunjuk oleh Dewan Formatur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris terpilih ditambah dengan Kepala Desa dan satu atau dua orang dari tokoh masyarakat setempat.

Pengurus terpilih diajukan kepada Kepala Kecamatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah yang didelegasikan.

Dalam waktu yang ditentukan kemudian, Pengurus terpilih dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Biasanya pelantikan Pengurus baru dilaksanakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Instansi/Jawatan yang ada hubungannya dengan organisasi/ lembaga tersebut, Pemerintah Kecamatan dan Desa serta segenap tokoh masyarakat dan Pimpinan Organisasi yang ada di Desa itu.

Jelasnya bahwa pengangkatan Pemimpin Formal (formal leader) di Desa/Kelurahan dalam wilayah Pemerintahan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara, adalah melalui prosedur yang resmi mulai pada pemilihan sampai pada saat pelantikannya.

2. Kepemimpinan Informal

Pemimpin informal (informal leader) dalam aktivitas sosial di daerah ini, hanya terdiri dari pemimpin-pemimpin perkumpulan seperti yang telah diuraikan di muka.

Syarat utama dari penunjukan pemimpin informal khususnya pimpinan dalam perkumpulan kerja adalah :

- kuat dan mampu mengkoordinir anggota;
- jujur dan disiplin;
- cakap dan kreatif;
- berwibawa.

a. Hak dan Kewajiban

Pemimpin kelompok/perkumpulan kerja berhak untuk mengatur waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan serta menentukan teknis pelaksanaannya. Pemimpin perkumpulan wajib memperhatikan saran-saran serta kebutuhan anggotanya.

Di dalam organisasi kerja demikian ini hampir tidak dapat dibedakan kedudukan pemimpin dan anggota, karena pada pelaksanaannya pemimpin dan anggota sama-sama haknya.

Kedudukan pemimpin dalam organisasi ini hanya merupakan pengatur. Di samping kedudukannya sebagai pengatur, ia juga sebagai anggota (Inf. : 22)

b. *Prosedur Pengangkatan*

Pengangkatan seseorang sebagai Pemimpin dalam organisasi semacam ini hanyalah bersifat sementara. Pengangkatan pemimpin tidak melalui prosedur resmi berupa pemilihan, tetapi hanya melalui penunjukan secara aklamasi oleh segenap anggotanya. Oleh karena itu tidak ada sanksi tertentu atas pelanggaran seorang pemimpin.

Dalam hal kegiatan pelaksanaan pesta/upacara pemakaman jenazah dari salah seorang keluarga, maka kepemimpinan dalam kegiatan tersebut berlangsung dengan sendirinya. Seorang yang dianggap tua atau dari anggota keluarga yang berduka dapat bertindak sebagai pimpinan tanpa penunjukan dari para hadirin. Sering juga berlangsung tanpa adanya pimpinan, di mana masing-masing hadirin melaksanakan pekerjaan tanpa adanya komando dari seorang yang dianggap pemimpin.

Dalam pelaksanaan pesta kawin, penyelenggaranya terdiri dari beberapa orang panitia yang ditunjuk secara aklamasi oleh sanak keluarga. Pimpinan organisasi disebut Ketua Panitia. Pada umumnya penunjukan Ketua ini didasarkan pada kemampuan seseorang untuk mengkoordinir anggota atau dari salah satu anggota keluarga yang dituakan. Kepemimpinan dalam kegiatan inipun hanya bersifat sementara. Oleh karena itu tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur teknik pelaksanaannya kecuali pembagian tugas dari masing-masing personil.

PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG SOSIAL DALAM MASYARAKAT

Lembaga sosial adalah pola aktivitas yang terbentuk untuk memenuhi pelbagai kebutuhan hidup manusia. Asal mulanya adalah kelaziman yang menjadi adat istiadat yang kokoh, kemudian mem-

peroleh gagasan kesejahteraan sosial. Selanjutnya terbentuklah suatu susunan tertentu. Lembaga sosial dimaksudkan bukan saja mengenai pola aktivitas yang diakui oleh masyarakat, tetapi juga mencakup organisasi pelaksanaannya.

Kepemimpinan itu lahir bersama lahirnya peradaban manusia. Kepemimpinan itu ada dalam bentuk masyarakat apa saja dan dalam keadaan yang bagaimana saja. Dalam masyarakat bersahaja yang bagaimanapun unsur pemimpin selalu berperan aktif mendinamisir kehidupan masyarakat setempat.

Pada masa yang lampau, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan timbul dengan sendirinya. Demikian pula kepemimpinan berlangsung secara legal sekalipun hanya atas pengakuan masyarakat pendukungnya.

Rupa-rupa kebutuhan manusia, seperti pemenuhan dorongan kelamin, memperbanyak jenis dan hubungan primer yang akrab, menjadi dasar untuk adanya lembaga keluarga manusia. Sebaliknya dalam usaha mengatasi kemelaratan rakyat yang diakibatkan oleh ledakan penduduk yang semakin membesar, menuntut pula perlunya lembaga keluarga berencana.

Hal-hal lain yang berhubungan dengan usaha memperoleh pengolahan dan penyaluran bahan pangan dan sandang, menimbulkan lembaga perekonomian.

Sedang perasaan kekaguman untuk alam sekelilingnya serta keinginan manusia untuk dapat berhubungan dengan hal-hal yang gaib, itulah yang menumbuhkan lembaga keagamaan.

Singkatnya lembaga-lembaga sosial itu telah mengisi keseluruhan kehidupan manusia dalam masyarakat dan berpengaruh di segala aspek kehidupan individu maupun golongan.

Dari gambaran umum kemasyarakatan di atas, dapatlah disimpulkan beberapa pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang sosial dalam masyarakat pedesaan, sebagai berikut :

- a. Bahwa lembaga-lembaga sosial di Desa/Kelurahan, adalah merupakan motivator pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya.
- b. Kepemimpinan dalam bidang sosial senantiasa mempengaruhi pola berpikir dan bertindak warga masyarakat, dari pola berpikir/bertindak secara individu (individual system) ke pola berpikir dan bekerja secara gotong royong (kooperatif).

- c. Dari berbagai aspek kepemimpinan dapat dipelajari sejarah, tipe/ gaya kepemimpinan, watak, perilaku dan peranan kepemimpinan dalam masyarakat.
- d. Melalui Lembaga Musyawarah Desa (L.M.D) masyarakat dapat menyalurkan pendapat dan keinginannya secara tertib menurut ketentuan yang berlaku dalam organisasi.
- e. Melalui kepemimpinan dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan sistem pembagian tugas yang rapih serta koordinasi yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan masyarakat desa.

Di samping pengaruh-pengaruh positif kepemimpinan bidang sosial seperti yang disebutkan di atas, terdapat pula unsur pengaruh negatif yang timbul akibat adanya pelaksanaan kepemimpinan yang menyimpang dari ketentuan organisasi.

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa kualitas seorang pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas organisasi secara terus-menerus.

Kegagalan dalam tahap pengangkatan jabatan pimpinan misalnya suatu jabatan pimpinan yang melekat pada diri jabatan pejabat tertentu di Desa/Kelurahan lalu diangkat secara otomatis karena jabatannya itu tanpa memperhatikan persyaratan-persyaratan seorang pimpinan, menyebabkan berbagai akibat yang lebih jauh dalam berbagai hal, seperti; tidak tercapainya sasaran, tidak adanya suasana kerja yang harmonis, kurang efisien dan lain-lain penyimpangan.

BAB V

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI

ORGANISASI DALAM KEGIATAN EKONOMI

Organisasi-organisasi dalam kegiatan ekonomi adalah merupakan lembaga-lembaga perekonomian yang bergerak dalam bidang usaha produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa.

"Semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha memperoleh, pengolahan dan penyaluran makanan dan sandang serta lain-lain hasil kebendaan menimbulkan lembaga perekonomian" (S. Wiriaatmadja, MA; 1973 : 77).

Di semua Desa/Kelurahan di mana terdapat aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelompok ataupun keluarga dalam kondisi ekonomi yang bagaimanapun juga dipastikan adanya bentuk-bentuk organisasi perekonomian meskipun berbeda dalam sifat atau cara pelaksanaan serta peristilahannya.

Di daerah Sulawesi Tenggara sejak dahulu telah berkembang lembaga-lembaga perekonomian masyarakat baik yang bersifat formal (lebih kompleks), maupun yang bersifat informal (tradisional). Salah satu organisasi perekonomian yang dianggap formal di sekitar pertengahan abad ke-20 ialah Koperasi, yang sifatnya menghimpun beberapa usaha masyarakat maupun perorangan. Sedang organisasi ekonomi informal adalah bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang mempunyai usaha yang sama serta asosiasi tersendiri dalam melaksanakan tugas-tugas perekonomiannya itu. Pada masa pembangunan sekarang ini justru pertumbuhan koperasi masyarakat di pedesaan semakin mengalami kemunduran. Beberapa koperasi/kelompok usaha yang pernah berkembang di Desa/Kelurahan, kini sudah tidak kelihatan jejaknya lagi.

Koperasi Usaha Baru Amonggedo (USBA) dan kelompok Usaha Dagang KOE yang pernah tumbuh dan berkembang di Desa Benua (dahulu Desa Amonggedo), kini telah lenyap dan tidak pernah muncul kembali. Demikian pula keadaan pertumbuhan koperasi di desa-desa lain yang selama beberapa tahun terakhir ini mengalami nasib yang sama.

Untuk menumbuhkan kembali semangat kerjasama dalam usaha pemenuhan kebutuhan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,

Pemerintah melalui Instansi/Dinas/Jawatan di Daerah, membangun kembali lembaga-lembaga perekonomian masyarakat di desa yang berstatus formal. Di samping itu usaha-usaha perorangan dikembangkan terus dan mendapat pembinaan dari Pemerintah.

ORGANISASI PEREKONOMIAN FORMAL

1. Kelompok Belajar Usaha.

Kelompok Belajar Usaha sering juga disebut Kejar Usaha atau dengan singkatan K.B.U., adalah suatu organisasi/lembaga perekonomian yang dibina langsung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pendidikan Masyarakat di Daerah.

Di Desa Benua Kecamatan Wawotobi terdapat suatu Kelompok Belajar Usaha yang bergerak di bidang penyediaan kebutuhan pokok masyarakat setempat. Kelompok Belajar Usaha tersebut terbentuk dalam suatu organisasi yang dilegalisir oleh Pemerintah, yaitu oleh Penilik Pendidikan Masyarakat Kecamatan Wawotobi Kabupaten Kendari.

a. Kepengurusan.

Kepengurusan dalam Kelompok Belajar Usaha terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang anggota. Susunan pengurus K.B.U. Desa Benua adalah sebagai berikut:

Ketua
Sekretaris
Bendahara

Termasuk di dalam struktur organisasi K.B.U. ialah unsur Pembina yang terdiri dari Kepala Desa dan Penilik Pendidikan Masyarakat Kecamatan.

b. Keanggotaan.

Anggota dari pada organisasi Kelompok Belajar Usaha hanya terdiri dari anggota pengurus organisasi itu sendiri. Semakin besar usaha itu semakin banyak pula anggota pengurusnya yang sekaligus menjadi anggota Kelompok Belajar Usaha tersebut.

Pada umumnya anggota Kelompok Belajar Usaha itu terdiri dari para remaja putus sekolah yang belum memiliki lapangan penghidupan yang tetap.

c. Pusat Kegiatan.

Kegiatan sehari-hari daripada Kelompok Usaha ini berada di lingkungan wilayah desa, karena yang menjadi sasaran pembinaan organisasi ini ialah masyarakat di pedesaan. Sanggar kegiatan KBU biasanya berbentuk kios/gardu yang dibangun di tempat-tempat yang strategis yaitu di pusat kegiatan masyarakat.

Kelompok Belajar Usaha Desa Benua terletak di wilayah RK. III Woerahi, yaitu di sekitar jalan Kayu Besi dahulu.

d. Kegiatan.

Sebagai wadah pembinaan generasi muda dalam bidang usaha, maka Kelompok Belajar Usaha ini tidak hanya melakukan penjualan barang seperti pada tempat kegiatan jual beli lainnya, tetapi oleh pengurus KBU juga menyelenggarakan administrasi organisasinya secara tertib, baik dan sesuai petunjuk dari Instansi pembinaanya. Kegiatan Kelompok Belajar Usaha secara umum terdiri dari:

- pengadaan/pembelian barang.
- penyaluran/penjualan barang
- pengadministrasian barang masuk dan keluar
- rapat-rapat anggota, dan
- pelaporan ke atas kepada Kandep Dikbud Kecamatan, yaitu Penilik Pendidikan Masyarakat dan Kepala Desa.

Di samping kegiatan jual beli barang, K.B.U. di Desa dapat juga membuka usaha-usaha lain seperti kegiatan K.B.U. tersebut, sejak tahun 1980, Kelompok Belajar Usaha Desa Benua telah menghasilkan 30.000 M³ batu merah dan telah digunakan oleh masyarakat setempat dalam pembangunan desanya.

e. Tujuan.

Tujuan umum dari pembinaan organisasi ini ialah mendorong dan mengembangkan pengetahuan di bidang usaha masyarakat serta memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.

Di samping itu secara khusus K.B.U. digunakan sebagai sumber mata pencaharian/perekonomian masyarakat di desa yang sangat membantu bagi pengurusnya. Organisasi perekonomian seperti K.B.U. ini ditunjang oleh dana DIP Proyek Pendidikan Masyarakat. Masing-masing K.B.U. di desa/kelurahan diberikan bantuan permodalan sebesar Rp. 200.000,— oleh Bidang Pendidikan Masyarakat pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.

2. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang disingkat P.K.K., adalah suatu gerakan yang bersifat sosial ekonomi yang berorientasi pada usaha pembinaan individu untuk menimbulkan kesadaran kepada segi-segi kehidupan di dalam keluarga.

Gerakan PKK secara formal disponsori oleh Departemen Dalam Negeri. Pelaksanaannya disejajarkan dengan rencana pembangunan Desa yang dikaitkan dengan kegiatan organisasi Pertiwi (istri karyawan Departemen Dalam Negeri).

Organisasi PKK terdapat hampir di seluruh Desa/Kelurahan. "Pendidikan Kesejahteraan Keluarga sejak tahun 1971 dikembangkan di seluruh wilayah pedesaan di Indonesia" (Dra. Sumber Saparin; 1977 : 171).

Di desa Benua, PKK mulai dikembangkan sejak tahun 1977 yaitu di masa pemerintahan Laanda selaku Kepala Desa Benua yang pertama. (Inf. : 14). Hingga sekarang ini PKK Desa Benua telah mengalami beberapa periode kepengurusan. Demikian pula di Kelurahan Inalahi organisasi PKK telah ada jauh sebelum terbentuknya kelurahan, yaitu semasa Kelurahan Inalahi berstatus Desa. (Inf. : 4).

Organisasi ini berkembang dengan wajar dan memperoleh bantuan dana dari Pemerintah Daerah.

a. *Kepengurusan.*

Kepengurusan dalam organisasi PKK ini terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Ketua Kelompok.

Pada tahun 1977, Pengurus PKK Desa Benua adalah sebagai berikut:

- Ketua Umum

- Ketua I
- Ketua II
- Sekretaris I
- Sekretaris II
- Bendahara I
- Bendahara II
- Anggota.

Pada tahun 1982 berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4/1982, susunan pengurus PKK Desa Benua adalah sebagai berikut:

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara

Di Kelurahan Inalahi, susunan pengurus PKK-nya terdiri dari :

- Pelindung
- Ketua Umum
- Ketua I
- Ketua II
- Sekretaris
- Bendahara
- Seksi-seksi:
 - a). Seksi Perlengkapan
 - b). Seksi Pendidikan/Ketrampilan
 - c). Seksi Olah Raga
 - d). Seksi Agama
 - e). Seksi dekorasi.
 - f). Seksi Usaha
 - g). Seksi Protokol

Dalam kepengurusan PKK di Desa/Kelurahan, istri Kepala Desa/Kelurahan secara otomatis ditunjuk sebagai Pemimpin organisasi tersebut.

b. *Keanggotaan.*

Keanggotaan dalam PKK meliputi keseluruhan anggota pengurus yang sekaligus merupakan anggota dan ibu-ibu warga desa yang merupakan sasaran pembinaan organisasi tersebut.

c. *Pusat Kegiatan.*

Kegiatan PKK sebagian besarnya dipusatkan di Desa/Kelurahan. Hingga sekarang ini PKK belum mempunyai Kantor/Balai Kegiatan tersendiri sehingga untuk sementara kegiatan administrasi diselenggarakan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat.

d. *Kegiatan.*

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga adalah merupakan unit kesejahteraan micro yang sasarannya membina individu sebagai unsur masyarakat melalui pendidikan formal bagi anak usia sekolah dan melalui pendidikan informal (kursus-kursus) untuk golongan orang dewasa.

Jenis-jenis kegiatan yang sementara diselenggarakan oleh organisasi PKK di Desa/Kelurahan antara lain adalah:

- 1). Arisan uang sebesar Rp. 10.000,— setiap anggota per-bulan;
- 2). Arisan barang berupa piring sebanyak 1 lusin setiap bu-lan;
- 3). Pembuatan Tabere (tenda model tradisional) untuk di-pasarkan, oleh PKK Desa Benua;
- 4). Menyelenggarakan kursus membuat kue, makanan, jahit-menjahit dan menyulam;
- 5). Mengolah administrasi organisasi PKK setempat.

e. *Tujuan*

Tujuan pembinaan PKK ini ialah pembinaan keluarga guna menunjang ekonomi masyarakat pedesaan. Menumbuh-kan jiwa kerukunan, menjalin kerja-sama yang harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan anggota warga Desa/Ke-lurahan. Di samping itu kepada anak-anak sekolah dan remaja diberikan bekal ilmu pengetahuan praktis (pengetahuan siap) untuk menghadapi masa depan bangsa.

”Lembaga perekonomian di desa bertujuan untuk meng-usahakan adanya keseimbangan antara usaha-usaha perekon-omian sehingga dapat dihindarkan naik-turunnya konjungtir dan adanya pengangguran masal pada waktu-waktu tertentu.” (S. Wiriaatmadja; 1983 – 99).

ORGANISASI PEREKONOMIAN INFORMAL

Selain asosiasi-asosiasi yang mendapatkan legalitas pemerintah seperti yang diuraikan di atas, dalam masyarakat pedesaan yang belum terlampaui maju, masih terdapat banyak organisasi atau kelompok kerja berupa kepentingan individu (*individual interest*) dalam lapangan perekonomian.

Lembaga-lembaga perekonomian dalam bentuk kelompok maupun usaha perorangan itu umumnya tersusun secara sederhana di mana terdapat sedikit sekali pembagian tugas dan dilakukan oleh organisasi-organisasi yang tidak tetap.

Organisasi perekonomian informal yang merupakan pokok bahasan dalam uraian ini dimaksudkan adalah jenis-jenis organisasi perekonomian yang ada di Desa/Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dan bergerak dalam bidang perekonomian. Organisasi yang termasuk dalam status informal, tidak dilegalisir Pemerintah tetapi mempunyai wewenang mengatur dan menetapkan aturan-aturan organisasinya, antara lain:

1. Arisan Keluarga.

Selain bentuk arisan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi formal (Dharma Wanita dan PKK) terdapat pula beberapa bentuk arisan keluarga, misalnya:

- arisan ramuan rumah
- arisan kerja
- arisan panen, dan
- arisan uang/barang.

Arisan ramuan rumah yang dalam bahasa Tolaki disebut *mombokosangga* adalah merupakan satu bentuk organisasi (kelompok usaha) yang bergerak dalam usaha mempersiapkan ramuan rumah dari masing-masing anggota kelompok. Kelompok usaha yang demikian ini sudah berkembang dalam kehidupan orang-orang Tolaki sejak beberapa abad yang lampau. Hingga kini kelompok usaha bersama seperti ini masih tetap dikembangkan dan sudah menjadi tradisi nenek moyang orang Tolaki yang diwarisi secara turun-temurun.

Arisan kerja (*bobalu*), yaitu suatu kelompok kerja bersama dalam mengerjakan pekerjaan seseorang anggota secara bergilir. Umumnya arisan kerja seperti ini dilakukan pada saat pengolahan

ladang, sawah atau kebun. Penyelenggaraan arisan kerja ini dilaksanakan secara bersama-sama dalam mengerjakan kebun salah seorang anggota secara bergilir menurut ketentuan yang disepakati bersama. Bagi anggota yang terkena giliran sebagai tuan rumah, diharuskan menyiapkan konsumsi para anggota selama sehari penuh.

Arisan panen atau yang disebut oleh orang-orang Tolaki dengan istilah *merae* atau *mepoalo*, hampir sama dengan sistem kerja pada arisan kerja. Bedanya hanya pada ketentuan waktu kerja serta jenis kegiatannya. Kalau pada arisan kerja masing-masing anggota hanya memperoleh hak sehari penuh dalam satu kali putaran, maka pada arisan panen itu anggota kelompok (*tono merae*) itu mengerjakan pekerjaan anggota kelompoknya hingga selesai tanpa perhitungan waktu.

Bentuk-bentuk arisan yang disebutkan di atas, adalah merupakan organisasi kerja tradisional yang berstatus informal, sebab pembentukannya tidak sepengetahuan pemerintah, melainkan atas dasar hubungan kekerabatan antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. Aturan-aturannya tidak tertulis. Bahkan tidak memerlukan administrasi seperti pada organisasi formal lainnya. Meskipun demikian masing-masing anggota menyadari akan hak dan kewajibannya. Masing-masing anggota merasa terikat dalam kelompoknya. Tidak seorang pun yang mencoba menarik diri dari keanggotaannya sebelum semua anggota mendapatkan haknya.

a. *Kepengurusan*

Dalam organisasi serupa ini, hampir-hampir tak dapat ditentukan siapa pemimpinnya. Masing-masing anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Organisasi semacam ini tidak mempunyai susunan pengurus yang resmi dan teratur. Biasanya hanya ada seorang yang ditunjuk sebagai Pemimpin di antara mereka. Kepemimpinannya hanya dalam hal pengaturan giliran pemilik kerja serta waktu mulai dan berakhirnya pekerjaan. Dalam pengaturan kerja, saran dan usul para anggota merupakan dasar utama dalam pengambilan keputusan.

b. *Keanggotaan.*

Anggota organisasi kerja seperti ini tidak terlampau ba-

nyak. Masing-masing kelompok biasanya hanya terdiri dari beberapa orang dan tidak lebih dari 15 orang. Untuk arisan kerja ladang, kebun atau sawah anggota yang paling ideal cukup sampai 5 atau 6 orang agar satu kali putaran dapat selesai dalam waktu sepekan. Demikian pula keanggotaan dalam arisan penyediaan ramuan rumah. Idealnya hanya 2 sampai 5 orang anggota, sebab masing-masing anggota berhak mendapatkan satu unit ramuan rumah tanpa mengeluarkan biaya. Sama halnya dengan arisan panen. Anggotanya hanya sampai 5 orang, sebab pekerjaan memotong padi (*mosowi*) biasanya memakan waktu yang cukup lama, sehingga dipikirkan agar dalam waktu yang telatif singkat masing-masing anggota sudah kebagian giliran untuk menuai padinya.

c. *Pusat Kegiatan.*

Pusat kegiatan daripada organisasi semacam ini ialah di lingkungan keluarga. Keluarga yang dimaksudkan ialah rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Tiap keluarga yang berada di pedesaan mempunyai sawah, kebun atau ladang yang merupakan lapangan kegiatan mereka sehari-hari. Mulai pada saat pengolahan tanah sampai pada saat pemetikan hasil, sebagian besar dari kegiatan mereka terpusat di sawah, ladang atau di kebun mereka. Sesudah panen, orang-orang yang belum memiliki rumah kediaman mulai mengusahakan ramuan rumah (*pokosangga*). Mereka itu pada umumnya terdiri dari orang-orang yang baru berkeluarga dan sementara menumpang di rumah mertua. Kegiatan-kegiatan semacam inilah yang kemudian melahirkan organisasi-organisasi perekonomian dalam masyarakat Tolaki di Daerah Sulawesi Tenggara, khususnya yang berada di pedesaan Daerah Kabupaten Kendari.

d. *Kegiatan.*

Secara garis besarnya kegiatan Arisan Keluarga di Desa/Kelurahan meliputi:

- 1). Kegiatan meramu bahan bangunan rumah (*mombokosangga*);
- 2). Kegiatan mengolah sawah, ladang dan kebun (*megalu, mondau dan mepombahora*);
- 3). Menuai padi (*mosowi*);

- 4). Membangun rumah (*melaika*);
- 5). Dan lain-lain kegiatan sebagainya.

e. *Tujuan.*

Tujuan umum daripada Arisan Keluarga ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil-hasil dari berbagai kegiatan ini merupakan perwujudan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Tujuan khusus dari masing-masing anggota ialah untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan. Masyarakat Tolaki dalam kegiatan hidupnya sebagai petani, setiap saat bergumul dengan berbagai macam pekerjaan yang berat. Terkadang pekerjaan itu memerlukan tenaga yang banyak atau penyelesaian pekerjaan secara cepat, maka dalam kondisi yang demikian itu diperlukan kerja-sama dalam kelompok lebih ekonomis daripada bila pekerjaan itu diselesaikan sendiri-sendiri.

2. Organisasi Penggergajian dan Pertukangan Kayu.

Kayu merupakan kekayaan alam yang terdapat hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Kayu merupakan salah satu sumber penghidupan penduduk di daerah ini. Hampir di semua Desa/Kelurahan terdapat usaha penggergajian kayu atau pertukangan kayu termasuk salah satu organisasi yang bergerak di bidang perekonomian.

Di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi terdapat kelompok penggergajian kayu yang disebut *pangaragadi*. Demikian pula kelompok pertukangan kayu yang sejak beberapa ratus tahun yang lalu telah dikenal oleh masyarakat Tolaki di Daerah Kendari. Namun bentuk organisasinya masih sangat sederhana, karena hanya merupakan usaha perorangan yang tidak terorganisir secara rapih.

a. *Kepengurusan.*

Organisasi penggergajian/pertukangan kayu di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi tidak memiliki susunan pengurus. Kegiatan penggergajian kayu biasanya hanya dilakukan oleh dua orang (satu pasang). Makanya itu di antara mereka itu tidak ada pemimpin atau pun yang dipimpin. Keduanya mempu-

nyai kedudukan yang sama dengan hak dan kewajiban yang sama.

Pada organisasi pertukangan kayu terdapat seorang pemimpin kerja yang disebut *Kapala Tuka* (Kepala Tukang). Pekerja yang lain adalah merupakan pembantu yang tidak terikat dalam satuan kelompoknya.



Salah satu Organisasi Pertukangan Kayu di Desa Benua Kec. Wawotobi.

Di dalam organisasi tersebut tidak terdapat unsur Ketua, Sekretaris atau pun Bendahara. Yang ada hanya Kepala Tukang dan pembantu tukang. Biasanya Kepala Tukang dalam suatu organisasi pertukangan kayu di Desa/Kelurahan, adalah pemilik usaha itu sendiri. Berbeda halnya dengan organisasi pertukangan kayu yang ada di kota Kecamatan atau Kabupaten yang oleh pemilik usaha menunjuk seorang Tukang Ahli untuk memimpin pekerjaan teknis (sebagai Kepala Tukang) dan berada di bawah komando Pimpinan Usaha (Pemilik).

b. *Keanggotaan.*

Anggota pertukangan kayu di Desa/Kelurahan tidak ba-

nyak bila dibanding dengan keanggotaan pada organisasi pertukangan kayu di kota. Di salah satu kelompok pertukangan kayu di Desa Benua yang dipimpin oleh Taha hanya terdapat 3 orang anggotanya yang berstatus pembantu.

Keanggotaan mereka hanya bersifat insidental, sebab sewaktu-waktu mereka juga menjadi Kepala Tukang, manakala mereka mendapat borongan pekerjaan. Kenyataan demikian ini disebabkan karena mereka bukan tukang profesional. Pekerjaan bertukang hanya merupakan kegiatan sampingan sebab mereka itu adalah petani yang pada musim tertentu terpaksa harus meninggalkan pertukangan dan terjun ke sawah.

c. *Pusat Kegiatan.*

Kegiatan pertukangan kayu di pedesaan umumnya masih diselenggarakan di rumah kediaman seorang tukang. Ada juga yang telah membuat bangsal kerja meskipun dalam bentuknya yang darurat seperti yang terlihat pada foto di atas. Lokasi pertukangan di Desa Benua terdapat di RK. I dan RK. II.

Agaknya tidak mengherankan apabila usaha pertukangan kayu di desa cukup diselenggarakan di rumah kediaman tukang, karena volume pekerjaan mereka sangat terbatas (sangat kurang). Sangat jarang diperoleh pesanan berupa perabot, kecuali borongan pembuatan rangka rumah yang umumnya dikerjakan di lokasi bangunan. Kegiatan semacam itu pun tidak bersinambungan sehingga terkadang para tukang kayu mengantungkan gergajinya untuk beberapa waktu lamanya.

d. *Kegiatan.*

Organisasi penggergajian kayu di desa lebih sementara sifatnya, karena kegiatan penggergajian kayu di Desa/Kelurahan hanya merupakan pekerjaan sampingan. Mereka hanya bekerja menggergaji apabila ada pesanan. Mereka tidak pernah menumpuk kayu untuk dipasarkan dalam sebuah bangsal seperti pada pedagang-pedagang kayu di kota. Bahkan terkadang para tukang gergaji terpaksa mengambil panjar sebelum bekerja. Setelah utang mereka terbayar, mereka pun berhenti dan melakukan kegiatan lain.

Organisasi pertukangan kayu mempunyai kegiatan yang lebih kompleks dibanding dengan kegiatan tukang gergaji. Jenis-jenis kegiatan pertukangan kayu terdiri dari:

- 1). Pembuatan rangka dan kusen rumah;
- 2). Pendirian rumah bangunan penduduk/pemerintah;
- 3). Pembuatan perabot rumah tangga berupa: kursi, meja, lemari, tempat tidur dan lain-lain.

Jenis kegiatan para tukang kayu banyak tergantung pada pesanan yang masuk. Sewaktu-waktu mereka sangat sibuk sekalipun untuk beberapa waktu yang cukup lama kegiatan mereka itu sepi dan hampir tidak dapat diketahui adanya pertukangan kayu di Desa itu.

e. *Tujuan.*

Ditinjau dari sudut pembangunan, organisasi pertukangan kayu dan penggergajian bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Desa. Tersedianya organisasi pertukangan kayu di masing-masing Desa/Kelurahan, berarti tersedia pula sarana dan prasarana pembangunan.

Akan tetapi bila ditinjau pada tujuan Pengusaha dan para pekerja tukang itu sendiri, maka yang menjadi tujuan pokok dari organisasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik maupun anggota-anggotanya.

Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pendapatan seorang tukang kayu terkadang lebih besar daripada pendapatan perkapita seorang petani penggarap yang sekedar menggantungkan hidupnya pada sebidang tanah kering yang sudah tidak produktif lagi. Apalagi dengan keadaan seorang tukang kayu di Desa yang juga bekerja sebagai petani. (Inf. : 31).

Di samping organisasi/lembaga perekonomian seperti yang telah disebutkan di atas, masih banyak bentuk-bentuk organisasi perekonomian yang sifatnya sebagai usaha per-orangan/keluarga dengan asosiasinya masing-masing.

Organisasi di bidang produksi pangan misalnya *sumaku* (menokok sagu), adalah suatu bentuk kerja-sama dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuannya masing-masing. Demikian pula pada organisasi *paue* (pengumpul rotan) atau

palupai (penangkap ikan dengan tuba), nampaknya dilakukan secara bersama-sama meskipun bertujuan untuk kepentingan perorangan. Organisasi semacam ini sangat sederhana, tidak mempunyai pengurus/anggota dan tidak mempunyai lokasi kegiatan tertentu.

SISTEM KEPEMIMPINAN DI BIDANG EKONOMI.

Kepemimpinan dibidang ekonomi dimaksudkan adalah kepemimpinan di bidang usaha. Manusia tidak lain dari individu yang mandiri, di mana segala usaha ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan tercapainya kebahagiaan individu.

Usaha dalam pengertian bekerja adalah merupakan aktivitas sosial yang memberikan isi, makna dan kesenangan pada diri manusia.

"Situasi bekerja dalam masyarakat modern yang sangat kompleks di masa sekarang ini senantiasa membutuhkan kerjasama dan kerja kooperatif untuk membangun karya-karya besar". (Dra. Kartini Kartono, 1983 : 23).

Dalam situasi kerja sedemikian ini selalu dibutuhkan pemimpin dan kepemimpinan, demi efektivitas dan efisiensi kerja. Akibat interaksi manusia dalam usaha bersama, menimbulkan kelompok organisasi (*organisation group*) yang bergerak di bidang perekonomian. "Tanpa kelompok manusia tidak mempunyai arti apa-apa, oleh karena itu segala usaha harus ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup kelompok atau bahkan masyarakat." (S. Pamudji; 1981 – 32).

Semua masyarakat telah menyusun pola-pola untuk pemenuhan kebutuhan dasar ekonominya. Makanan, pakaian, perumahan dan lain-lainnya mutlak harus diusahakan. Aktivitas-aktivitas untuk melaksanakannya dapat berbeda, misalnya kepemimpinan dalam suatu organisasi ada yang menganut sistem pembagian tugas menurut jenis pekerjaan dan ada pula kepemimpinan yang menganut sistem sentralisasi kerja.

Dalam hal kepemimpinan di bidang ekonomi, sistem kepemimpinan di Daerah Sulawesi Tenggara banyak dipengaruhi oleh tradisi masyarakat di samping falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar politik nasional bangsa Indonesia.

Khususnya dalam komunitas suku Tolaki yang bermukim di wi-

layah pedesaan Kabupaten Kendari, berkembang dua unsur kepemimpinan di bidang ekonomi, yaitu unsur kepemimpinan perekonomian yang berstatus formal dan unsur kepemimpinan perekonomian yang berstatus informal.

Kepemimpinan bidang ekonomi yang terdapat di pedesaan adalah merupakan perwujudan tradisi kerjasama masyarakat yang telah terbina sejak dahulu. Kepemimpinan informal tidak lain dari kepemimpinan dalam kelompok-kelompok kerja baik yang bertujuan untuk kepentingan bersama, maupun untuk kepentingan perorangan (individual stress).

KEPEMIMPINAN INFORMAL.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa organisasi/lembaga perekonomian informal yang ada di pedesaan, tidak lain dari usaha-usaha perorangan yang dilakukan secara bersama untuk kepentingan masing-masing individu.

Sebagai usaha perorangan yang dilakukan dalam bentuk kelompok, tidaklah terdapat susunan pengurus yang rapih dengan pembagian tugas yang terperinci.

Kepemimpinan dalam organisasi semacam ini terjadi dengan sendirinya tanpa ketentuan/prosedur tertentu.

Persyaratan kepemimpinan dalam kelompok-kelompok usaha di Desa/Kelurahan tidak sekompleks dengan persyaratan pimpinan dalam organisasi formal atau organisasi informal lainnya. Hak dan kewajiban seorang pemimpin dalam organisasi serupa ini, tidak lebih dari hak seorang pimpinan dalam kegiatan pembersihan kota yang sekedar mengatur jalannya pekerjaan gotong-royong seketika itu. Setelah selesai pekerjaan, selesai pula tugasnya selaku pimpinan dalam kegiatan tersebut. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin hanya bersifat sementara. Misalnya pada Kelompok Arisan Kerja (*bobalu*), pemimpin kerja berada di tangan pemilik kebun yang sedang dikerjakan bersama. Setelah giliran kerja itu beralih kepada orang lain, maka beralih pulalah pimpinan kerja itu kepada orang lain.

Dalam organisasi penggergajian/pertukangan kayu, terdapat semacam pimpinan dalam kelompok kerja tersebut. Namun seorang anggota dari kelompok pertukangan itu tidak terikat dengan kedudukannya sebagai anggota, karena pada waktu yang sama ia dapat

menjadi pemimpin sementara pimpinan kelompoknya menjalankan kepemimpinan dalam usahanya itu.

Contoh lain misalnya kelompok *paue* (perotan) kebersamaan mereka dalam kegiatan pengumpulan rotan tidak merupakan suatu organisasi, karena masing-masing dari mereka itu mengatur dirinya sendiri meskipun mereka melakukan kegiatan yang sama, pada waktu dan lokasi yang sama serta dengan tujuan yang sama.

Organisasi-organisasi perekonomian masyarakat pedesaan seperti yang disebutkan di atas hanya merupakan pola interaksi antar individu yang kemudian menimbulkan unsur pimpinan yang sifatnya hanya sementara. Kepemimpinannya tidak berada dalam batas wewenang tertentu. Bahkan hampir tidak terlihat adanya batas-batas atau perbedaan hak antara pemimpin dan yang dipimpin.

Pengangkatan seseorang sebagai Pemimpin dalam suatu kelompok tidak melalui suatu prosedur. Ada yang menjadi pemimpin secara otomatis karena gilirannya seperti pada arisan kerja; ada pula yang menjadi pemimpin melalui pengakuan secara spontan dari anggota-anggotanya misalnya pimpinan dalam borongan kerja.

PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG EKONOMI DALAM MASYARAKAT.

Yang dimaksud pengaruh dalam permasalahan ini ialah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu melalui proses tertentu dan dalam ruang lingkup tertentu.

” sesuatu perubahan yang terjadi dalam hidup manusia dapat ditimbulkan oleh pengaruh alamiah atau karena perbuatan manusia itu sendiri dalam ruang lingkup kehidupannya.” (Drs. M.T. Wadjo, 1975 : 7).

Sedang pengertian fungsi kepemimpinan di sini ialah batas-batas wewenang, tugas, hak dan kewajiban seseorang pemimpin dalam usaha mempengaruhi dan menggerakkan organisasinya.

Dalam urian tentang pengaruh dan fungsi kepemimpinan Bidang Ekonomi, akan digambarkan sejauh mana peranan kepemimpinan bidang ekonomi dalam usaha mempengaruhi pola perekonomian masyarakat.

Dalam kenyataan-kenyataan pada pertumbuhan perekonomian masyarakat baik dalam keadaannya yang bersahaja, maupun dalam menuju ke tingkat perekonomian yang lebih maju, telah dikembangkan

kan beberapa pola perekonomian yang bermula dari pola perekonomian tradisional hingga pada pola perekonomian modern sekarang ini.

Untuk menentukan adanya pengaruh kepemimpinan perekonomian dalam kehidupan masyarakat, perlu adanya perbandingan antara pola perekonomian tradisional sebagai dasar dengan pola perekonomian yang dialami sekarang ini sebagai dampak modernisasi perekonomian masyarakat sekarang ini.

Sudah tentu terjemahan pengaruh sebagai suatu proses perubahan, akan memperhatikan adanya dampak positif dan dampak negatif dalam kenyataan.

Sudah dijelaskan dalam uraian terdahulu, bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara sejak dahulu kala telah mengenal kehidupan berkelompok. Mereka telah melakukan kerja-sama dalam mengisi kebutuhan hidup mereka dan menunjuk salah seorang yang dituakan sebagai pemimpin kelompoknya. Dengan penuh kesadaran, para anggota kelompok tunduk dan mentaati ketentuan dan pengaturan pimpinan. Namun mereka tidak pernah mengetahui bahwa kerja-sama dalam suatu kelompok di bawah pimpinan seorang yang mereka anut, itu adalah suatu organisasi. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat tidak tertulis. Pengangkatan seorang pemimpin dalam masyarakat tidak melalui prosedur yang formil, namun demikian ketaatan masyarakat terhadap pemimpin serta aturan-aturan yang diamanatkan oleh pemimpinnya tetap ditaati sepenuhnya.

Sekarang ini kehidupan masyarakat serba diatur oleh organisasi. Aturan-aturan kemasyarakatan ditetapkan secara formil. Pemimpin-pemimpin organisasi sosial diangkat melalui seleksi persyaratan yang ketat. Sarana penunjang cukup tersedia. Namun di sana sini masih terdapat beberapa organisasi yang berjalan pincang atau tidak berfungsi sama sekali terhadap kehidupan masyarakat. Mengapa demikian dan dimana letak kelemahannya. Di sinilah tergambar adanya dampak negatif dan dampak positif dalam kepemimpinan sekarang ini.

BAB VI

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Tidak suatu kelompok ataupun individu yang tidak beragama yang dibiarkan untuk hidup sebagai warga negara di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 29 ayat (1), dinyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara yang ber Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sedang Pancasila itu sendiri digali dari bumi Indonesia, yaitu melalui adat-istiadat, tradisi, kepercayaan dan peradaban bangsa Indonesia itu sendiri.

Pernyataan seperti tersebut di atas memperingatkan kepada kita bahwa sejak dahulu nenek moyang bangsa Indonesia baik yang berada di Ibukota Negara yang ramai maupun pada masyarakat pedesaan di pedalaman yang terpencil, telah menganut kepercayaan terhadap alam gaib, sesuai konsepsi masyarakat setempat.

Masyarakat Tolaki di Daerah Sulawesi Tenggara, khususnya yang berada di pedalaman Daerah Kabupaten Kendari sejak dahulu telah mempunyai pemikiran-pemikiran atau konsepsi-konsepsi perihal alam gaib atau supernatural.

Di dalam masyarakat Tolaki terdapat lembaga-lembaga keagamaan yang dianggap sebagai susunan pola-pola kepercayaan dan tingkahlaku yang bersangkutan dengan hubungan antara manusia dan alam gaib.

Organisasi-organisasi keagamaan di Daerah Sulawesi Tenggara ada yang mempunyai susunan petugas-petugas yang bertingkat, ditentukan baik secara demokratis maupun secara otokratis atau penunjukan dari atas. Ada juga yang tidak mempunyai susunan pengurus tertentu tetapi kepemimpinannya berlangsung dengan baik di dalam masyarakat. Kedua bentuk organisasi itu dapat dikebahui dengan jelas dalam uraian di bawah ini.

ORGANISASI DALAM KEGIATAN AGAMA.

Organisasi dalam kegiatan agama dimaksudkan adalah lembaga-lembaga keagamaan yang merupakan wadah yang mempersatukan

pendapat, pandangan maupun tingkah-laku sejumlah individu dalam aktivitas perwujudan kepercayaannya. Organisasi keagamaan boleh juga diartikan sebagai bentuk kelompok yang lapangan kegiatannya berorientasi pada ketentuan-ketentuan agama atau yang mengarah kepada perubahan mental manusia sebagai umat yang berkepribadian.

ORGANISASI FORMAL.

Yang termasuk dalam kelompok organisasi formal ialah lembaga-lembaga keagamaan yang diberi kedudukan dan sanksi resmi, mempunyai susunan petugas yang bertingkat serta legalitas dari pimpinan resmi yang berada di atasnya.

1. Organisasi Pegawai Mesjid.

Organisasi pegawai mesjid di Desa/Kelurahan merupakan salah satu organisasi yang termasuk dalam kriteria organisasi formal di bidang keagamaan. Organisasi tersebut mempunyai susunan pengurus, pembagian tugas serta sejumlah ketentuan organisasi.

Organisasi Pegawai Mesjid termasuk salah satu organisasi tertua di desa yang tetap berkembang dalam masyarakat pedesaan hingga sekarang ini. Organisasi seperti ini terdapat di semua desa dalam wilayah Sulawesi Tenggara, sebab kurang lebih 93% penduduknya terdiri dari penganut agama Islam secara turun temurun. Bahkan di beberapa desa seperti di Desa Benua dan beberapa desa lainnya, tidak terdapat sama sekali adanya penganut agama lain selain Islam. Oleh karena itu ada beberapa desa yang padat penduduknya memiliki lebih dari satu buah mesjid sebagai tempat peribadatan warga masyarakatnya.

a. *Kepengurusan.*

Organisasi Pegawai Mesjid yang sering juga disebut masyarakat dengan istilah Pegawai Syarat di desa, mempunyai susunan pengurus tertentu dan seragam bentuknya di semua desa, khususnya di desa-desa yang terletak di pedalaman Daerah Kabupaten Kendari.

Di dalam organisasi ini terdapat 4 unsur pemimpin yaitu :

- unsur Imam;

- unsur Khatib;
- unsur Bilal, dan
- unsur Doja.

Dalam hal-hal tertentu, personal pengurus ini dapat ditambah menjadi lebih dari satu orang untuk unsur Khatib, Bilal atau Doja. Kenyataannya diketemukan di beberapa desa adanya Organisasi Ta'mirul Mesjid yang pengurusnya lebih dari 4 orang, di mana di dalam kepengurusan itu terdapat unsur pembantu Khatib, pembantu Bilal dan pembantu Doja.

Sebaliknya di Kelurahan Inalahi, pengurus organisasi Pegawai Mesjidnya hanya terdiri dari tiga orang karena jabatan Khatib dan Bilal dirangkap oleh seorang. Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :

- Imam Mesjid
- Khatib dan Bilal
- Doja

Perangkapan jabatan seperti ini dapat saja terjadi di mana-mana, kecuali pada jabatan Imam dan Doja, tidak dapat dirangkap oleh salah seorang pejabat (Khatib atau Bilal). Kedudukan Imam adalah merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasinya, sedang fungsi Doja adalah sebagai pembantu/pesuruh dalam organisasi tersebut.

b. Keanggotaan.

Keanggotaan dalam organisasi ini meliputi keseluruhan warga desa yang menganut agama Islam. Bagi umat Islam sholat 5 waktu dalam sehari semalam adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pada setiap waktunya, baik secara berjamaah maupun dengan cara perorangan. Dalam sholat berjamaah inilah terjalinnya hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Di satu pihak Imam Mesjid bertindak sebagai Pemimpin sholat, sedang di lain pihak para jamaah berstatus sebagai yang dipimpin (anggota) jamaah.

Para jamaah secara sadar akan statusnya serta mengakui kepemimpinan dari pengurus organisasi Pegawai Mesjid dalam kegiatan tersebut. Demikian pula dalam kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang umumnya ditangani oleh para Pegawai Mesjid setempat.

c. *Pusat Kegiatan.*

Sebagian besar daripada kegiatan keagamaan di desa dipusatkan di mesjid. Kegiatan sholat bersama selalu diadakan di mesjid, sedangkan sholat perorangan dilakukan di rumah masing-masing.

Pada zaman dahulu, mesjid sering pula dipergunakan sebagai tempat penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan, misalnya :

- penyelesaian sengketa;
- pelaksanaan peringatan Hari-hari Besar Islam;
- pelaksanaan pernikahan atau perceraian;
- dan lain-lain kegiatan keagamaan (Inf. : 36).

Oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, mesjid sering dijadikan sebagai tempat penggalangan anak-anak remaja atau penyampaian gagasan dan perintah-perintah yang bersifat umum. Diskusi-diskusi keagamaan serta da'wah Islamiah merupakan acara-acara pokok dalam kegiatan sholat bersama di mesjid terutama pada bulan ramadhan.

d. *Kegiatan.*

Kegiatan pokok para Pegawai Mesjid sebagai pengurus Organisasi Pegawai Mesjid di desa adalah menyelenggarakan dan memimpin sholat bersama (berjamaah).

Di samping itu Pegawai Mesjid juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, seperti ;

- 1). Melayani masyarakat dalam penyelenggaraan hajatnya yang berupa doa syukuran, doa keselamatan, pemotongan rambut (*mepokui*) dan tolak bala.
- 2). Menyelenggarakan upacara pemakaman jenazah seseorang yang dimulai dari pekerjaan memandikan, mengafani, menyembahyangi, mengiringkan doa permohonan keselamatan, hingga pembacaan takhlil;
- 3). Melayani masyarakat yang beragama Islam dalam persembahan fitrah ataupun zakat harta;
- 4). Memelihara kebersihan mesjid sebagai pusat peribadatan umat Islam;

- 5). Dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan.

e. *Tujuan.*

Tujuan utama organisasi ini ialah untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya di bidang keagamaan. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai organisasi ini adalah sebagai berikut :

- 1). Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pewadahan kegiatan bersama dalam keagamaan;
- 2). Menjamin terciptanya ketertiban masyarakat di dalam menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
- 3). Menjadi panutan di tengah masyarakat beragama.

Demikian keluhuran daripada tujuan organisasi keagamaan ini sehingga dari sekian organisasi kemasyarakatan yang pernah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pedesaan, ternyata organisasi Pegawai Mesjid tidak pernah tergeser kedudukannya oleh revolusi apapun dalam kehidupan masyarakat.

2. Organisasi Pegawai Syarat .

Organisasi dimaksud, hampir sama fungsi, peranan dan kedudukannya dengan organisasi Pegawai Mesjid yang sudah diuraikan di atas. Perbedaannya hanya pada peristilahan jabatan serta beberapa tugas tertentu yang menurut ketentuannya tidak dapat dilaksanakan oleh pengurus mesjid. Unsur jabatan yang termasuk dalam organisasi ini adalah :

- Imam Desa, dan
- P3NTCR

Kedua unsur pejabat di bidang agama ini sebenarnya adalah merupakan perangkat dari Pemerintah Desa yang dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa termasuk sebagai unsur pelaksana organisasi keagamaan.

a. *Kepengurusan.*

Kepengurusan dalam organisasi Pegawai Syarat ini bersifat tunggal, di mana Imam Desa berdiri sendiri dengan sistem kepemimpinannya sendiri, demikian pula halnya P3NTCR yang merupakan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan

yang bertugas penuh di desa dengan pola kepemimpinannya sendiri.

Di beberapa desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Kendari, jabatan Imam Desa dirangkap oleh imam Mesjid, sedang di Desa Benua Kecamatan Wawotobi sebagai wilayah penelitian Team kedua unsur pemimpin ini berdiri sendiri dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Imam Desa Benua dijabat oleh *Bere* sedang Imam Mesjidnya ialah Galu.

Berbeda halnya dengan P3NTCR, di mana jabatan ini dipegang oleh pejabat tertentu yang tidak boleh dirangkap oleh unsur pejabat pimpinan agama lainnya.

Di Desa Benua jabatan P3NTCR dijabat oleh salah seorang penduduk desa yang telah berpengalaman dalam organisasi keagamaan, yaitu *Bitatu*. Seding di Kelurahan Inalahi P3NTCR-nya dijabat oleh *M. Nasir*. Dalam organisasi ini tidak terdapat susunan pengurus yang teratur rapih di mana terdapat unsur-unsur pejabat lain sebagai pembantu pimpinan.

b. *Keanggotaan.*

Keanggotaan organisasi ini sama halnya dengan keanggotaan organisasi Pegawai Mesjid, yaitu meliputi keseluruhan warga desa yang beragama Islam Meskipun aktivitas P3NTCR hanya berlangsung sewaktu-waktu, namun pada waktu-waktu tertentu itulah justru kepemimpinan P3NTCR itu sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat yang berkepentingan. Karena itu masing-masing anggota masyarakat di desa menyadari dengan sendirinya kedudukan mereka sebagai anggota yang mutlak dalam organisasi Pegawai Syarat atau pada organisasi Pegawai Mesjid.

c. *Pusat Kegiatan.*

Pusat kegiatan organisasi Pegawai Syarat ini ialah di desa/kelurahan, yaitu di Kantor Kepala Desa, di mesjid atau di rumah-rumah penduduk.

Imam Desa mempunyai banyak kegiatan yang di pusatkan di mesjid atau di rumah-rumah, sedang P3NTCR lebih banyak bertugas di kantor daripada di luar kantor. Secara

resminya, administrasi P3NTCR dilaksanakan secara rutin di Kantor Kepala Desa/Kelurahan, sedang operasionalnya berlangsung di luar kantor yaitu di rumah-rumah penduduk.

d. *Kegiatan.*

Kegiatan organisasi Pegawai Syarat ini secara umum berorientasi dalam kegiatan keagamaan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat di desa setempat. Imam Desa merupakan aparat Pemerintah Desa/Kelurahan yang menangani urusan-urusan keagamaan di desa. Kecuali urusan mesjid dan yang bertalian dengan penyelenggaraan sholat berjamaah di mesjid, adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Pegawai Mesjid.

Kegiatan P3NTCR lebih kompleks daripada tugas Imam Desa, sebab P3NTCR di samping melaksanakan kegiatan operasional yang meliputi; urusan pernikahan, perceraian (talak) dan ruju, P3NTCR juga menyelenggarakan kegiatan administrasi yang terdiri dari administrasi pernikahan dan perceraian serta pelaporan kepada pimpinan di atasnya.

e. *Tujuan.*

Organisasi ini bertujuan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan urusan keagamaan di desa. Pegawai Syarat adalah pemegang dan pengemban aturan-aturan agama yang bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat sebagai umat beragama. Organisasi ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan sosial yang sebaik-baiknya kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran beragama kepada pemeluk-pemeluknya.

3. Organisasi Remaja Mesjid.

Organisasi ini merupakan suatu perkumpulan para remaja di desa/kelurahan yang aktivitasnya berorientasi pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

Perkumpulan remaja mesjid dibentuk berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/Ins/188/1978. Dalam waktu yang relatif singkat organisasi

ini telah terbentuk di hampir semua desa/kelurahan dalam wilayah Sulawesi Tenggara.

Di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi, organisasi ini terbentuk atas inisiatif para remaja di desa Pemerintah Desa/Kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial dan Pengurus Mesjid setempat.

a. *Kepengurusan.*

Kepengurusan dalam organisasi ini terdiri dari unsur; Ketua, Sekretaris, Bendahara dan unsur Seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan/jenis kegiatan.

Di Desa Benua, susunan pengurus Organisasi/Perkumpulan Remaja Mesjid-nya terdiri dari :

- 1). Ketua :
- 2). Sekretaris :
- 3). Bendahara :
- 4). Seksi-seksi :
 - a). Pembinaan Pendidikan/ Peribadatan :
 - b). Ketrampilan dan Kepemimpinan :
 - c). Seksi Olah Raga dan Rekreasi :
 - d). Kesenian dan Amal Sosial. :

Di Kelurahan Inalahi, susunan pengurusnya terdiri dari :

- 1). Ketua :
- 2). Sekretaris :
- 3). Bendahara :
- 4). Seksi-seksi :
 - a). Seksi Pembangunan :
 - b). Seksi Pengerahan Massa :
 - c). Seksi Dana/Usaha :

Di dalam kepengurusan Organisasi Remaja Mesjid di desa-desa terdapat variasi pada unsur seksinya. Pembentukan seksi pada organisasi ini senantiasa disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai serta kebutuhan organisasi itu sendiri.

b. *Keanggotaan.*

Meskipun dalam nama organisasi ini seakan-akan ada penonjolan kelompok remaja, namun kenyataannya tidak terdapat semacam pembatasan yang ketat dalam keanggotaan baik sebagai anggota pengurus, maupun sebagai anggota biasa.

Kenyataan bahwa di beberapa desa/kelurahan seperti di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi, pengurus maupun anggota-anggotanya tidak hanya terdiri dari anak-anak remaja, tetapi sebahagiannya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.

c. *Pusat Kegiatan.*

Di dalam aktivitas sehari-hari, organisasi Remaja Mesjid melakukan kegiatan administrasinya di rumah Ketua atau Sekretaris. Kegiatan operasional dilakukan di mesjid, di Balai Pertemuan Desa atau di rumah anggota-anggotanya.

d. *Kegiatan.*

Sebagai suatu organisasi keagamaan yang digerakkan oleh anak-anak remaja atau sejumlah tokoh masyarakat yang berjiwa muda serta semangat yang dinamis, maka organisasi Remaja Mesjid di desa/kelurahan lebih banyak bergerak di bidang pembinaan dan pengkaderan anggota. Antara lain kegiatannya adalah sebagai berikut :

- 1). Menyelenggarakan administrasi organisasi yang meliputi;
 - surat-menyurat
 - registrasi anggota.
- 2). Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan kaderisasi anggota, melalui:
 - rapat-rapat anggota
 - diskusi pembangunan dan keagamaan.
- 3). Menyelenggarakan peringatan Hari-hari Besar Islam bekerja sama dengan PHBI, seperti:
 - Nuzulul Qur'an
 - Maulid Nabi Besar Muhammad SAW
 - Isyra dan Mi'raj.

- 4). Bekerja-sama dengan organisasi AMPI, Dharma Wanita dan Pegawai Mesjid didalam menyelenggarakan Lomba Seni Baca Al-Qur'an, Lomba Da'wah Islamiah dan lain-lain.
- 5). Menyelenggarakan buka bersama di mesjid dalam bulan Ramadhan.

e. *Tujuan.*

Tujuan umum daripada organisasi ini ialah untuk menggalang anak-anak remaja dalam berpartisipasi aktif terhadap pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan.

Tujuan khususnya ialah :

- 1). Mengembangkan kreasi-kreasi aktif para remaja desa sebagai kader pemimpin bangsa di masa depan;
- 2). Meningkatkan penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan UUD. 1945 melalui syariat Islam;
- 3). Mendorong masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara sadar dan penuh tanggung jawab;
- 4). Menggalakkan usaha-usaha pengembangan ilmu dan amaliah sebagai konsekwensi keimanannya.

ORGANISASI INFORMAL

Di samping organisasi-organisasi formal keagamaan seperti yang disebutkan di atas, terdapat pula beberapa organisasi keagamaan tradisional yang dibentuk dan diselenggarakan sendiri oleh pemimpin-pemimpinnya, tanpa legalitas dari Pemerintah Desa atau organisasi di atasnya.

Organisasi informal yang berbentuk kelompok Pengajian Al-Qur'an pada saat kematian seseorang, kelompok berbuka puasa dan Badan Amil Zakat, telah lama dikenal dalam masyarakat dan hingga sekarang ini masih tetap berkembang di dalam kehidupan masyarakat khususnya bagi yang beragama Islam.

a. *Kepengurusan.*

Kepengurusan dari beberapa organisasi/perkumpulan/badan kegiatan keagamaan yang berstatus informal di atas, umumnya bersifat temporer (sementara), kecuali kepengurusan dalam

kelompok pengajian yang merupakan suatu Perguruan Baca Al-Qur'an di desa/kelurahan biasanya berlangsung cukup lama tanpa periodisasi kepengurusannya.

Kelompok pengajian Al-Qur'an di tempat kematian biasanya hanya dipimpin oleh seorang dari Pegawai Mesjid Desa dengan tidak menggunakan unsur Wakil, Sekretaris atau Bendahara, kecuali beberapa anggota yang sifatnya tidak tetap atau terikat dalam masa keanggotaan tertentu.

Kelompok berbuka puasa diselenggarakan oleh suatu panitia kecil di bawah koordinasi organisasi Remaja Mesjid. Sifat kepengurusannya hanya sementara, yaitu sekali setahun (dalam bulan ramadhan). Demikian pula halnya dengan Badan Amil Zakat yang selama ini merupakan bagian dari kegiatan Imam Desa bekerja-sama dengan Pegawai Mesjid dan Organisasi Remaja Mesjid setempat.

Pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Kepengurusannya pun bersifat sementara, sebab hanya berlaku sejak masa mulainya penerimaan zakat hingga setelah selesai penyalurannya kepada kelompok maupun individu yang berhak memperolehnya.



*Kelompok Pengajian Al-CHAERAT
Kelurahan Inalahi.*

Khusus kelompok/peguruan baca Al-Qur'an, di Desa Benua terdapat dua kelompok, masing-masing :

- Kelompok I
- Kelompok II

Di Kelurahan Inalahi, terdapat juga Kelompok Pengajian yang dibina oleh organisasi Remaja Mesjid setempat.

Kepemimpinan dalam kelompok pengajian semacam ini, hanya berada di tangan seorang Guru Mengaji. Di dalam kepengurusannya tidak terdapat unsur-unsur pengurus lainnya seperti Sekretaris, Bendahara ataupun Seksi-seksi, kecuali satu atau dua orang Guru Pembantu. Di samping kelompok pengajian yang terorganisir seperti ini, terdapat pula kelompok pengajian perorangan, di mana di dalamnya terdapat seorang Guru selaku pemimpin dan seorang murid sebagai anggota.

b. *Keanggotaan.*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa keanggotaan pada organisasi-organisasi informal keagamaan itu tidak bersifat tetap, kecuali pada organisasi/kelompok pengajian hingga sekarang ini tercatat sebagai berikut :

- 1). Kelompok pengajian Benua I 60 orang.
- 2). Kelompok pengajian Benua II 20 orang.
- 3). Kelompok pengajian Al - Chaerat Kelurahan Inalhai 45 orang.

Anggota daripada kelompok pengajian ini terdiri dari anak-anak remaja putra/putri. Keanggotaan mereka itu berlangsung hingga mereka telah dapat menamatkan pelajaran baca Al-Qur'an di perguruanannya masing-masing.

c. *Pusat Kegiatan.*

Sebagian dari kegiatan organisasi-organisasi tersebut di atas dipusatkan di mesjid desa, sedang sebagiannya lagi dilangsungkan di rumah pimpinannya atau di rumah masing-masing anggota.

Kegiatan Panitia Hari-hari Besar Islam (PHBI), dipusatkan di mesjid desa, sedang pengajian yang berhubungan dengan kematian diselenggarakan di rumah keluarga yang berduka. Khusus penyelenggaraan perguruan mengaji umumnya dipusatkan di rumah pimpinan kelompok pengajian itu (di rumah Guru).

d. *Kegiatan.*

- 1). Kegiatan panitia Amil Zakat adalah melayani penerimaan zakat fitrah/harta masyarakat setempat serta mengatur pembagian dan penyalurannya kepada kelompok atau individu yang berhak menerima zakat itu.
- 2). Kegiatan panitia berbuka puasa hanya mengatur giliran dari setiap anggota dermawan serta menyelenggarakan penyajiannya setiap waktu berbuka puasa secara bersama-sama di mesjid.
- 3). Kelompok pengajian dalam kematian melaksanakan kegiatan pembacaan Al-Qur'an di rumah keluarga yang berduka dalam beberapa waktu (malam) yang ditetapkan oleh keluarga yang berduka.
- 4). Khusus kelompok/perguruan mengaji di desa/kelurahan, menyelenggarakan pendidikan membaca Al-Qur'an kepada anak-anak remaja mulai dari pengejaan huruf sampai kepada pembacaan ayat-ayat secara mahir.

Kegiatan pengajian Al-Qur'an di tempat kematian biasanya dilakukan bersama oleh Pegawai Mesjid dan anggota-anggota dari perguruan mengaji sehingga dalam keadaannya yang demikian ini hampir tidak nampak/tidak diketahui siapa yang memimpin dan siapa pula yang dipimpin.

e. *Tujuan.*

Tujuan umum daripada organisasi-organisasi informal yang telah diuraikan di atas, ialah untuk meningkatkan pelayanan keagamaan dalam masyarakat, khususnya kepada warga desa yang beragama Islam. Sedang tujuan khususnya sangat tergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing organisasi, seperti pengajian di tempat kematian bertujuan untuk menghibur keluarga yang berduka baik pada waktu jenazah terbaring di pembaringan, maupun sesudah pemakamannya.

SISTEM KEPEMIMPINAN DI BIDANG AGAMA.

Umumnya khalayak di zaman dahulu menilai kepemimpinan di bidang agama lebih mulia daripada unsur pimpinan lainnya dalam masyarakat (Inf. : 36).

Apabila kita mengkaji Sejarah Kepemimpinan di Daerah Sulawesi

Tenggara, dalam beberapa ratus tahun yang lalu, maka kita akan sependapat dalam kesimpulan bahwa kepemimpinan dalam agama/kepercayaan dahulu, adalah salah satu sumber dari kepemimpinan sekarang ini.

Rundulamo (Nggabo), adalah lambang kepemimpinan agama di zaman Kerajaan Konawe (Kerajaan Tolaki) di zaman prasejarah Daerah Sulawesi Tenggara. Kesaktian yang dimilikinya membuat berita akan namanya menggemuruh di seluruh persada kerajaan yang dipimpinnya. Dengan konsep-konsep ilmu dan pemikirannya yang berhubungan dengan alam gaib, ia mampu menyembuhkan penyakit yang sementara menyikat habis manusia di daerah itu. Ia tiada lebih dari seorang Dukun sakti yang cakap, berani dan berwibawa. Dalam struktur pemerintahan yang dibentuknya, *Rundulamo* menempatkan *Mbuakoy* dan *Mbuoway* selaku pembantu utamanya dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Dalam kepemimpinan sekarang inipun, unsur pimpinan di bidang agama selalu mendapat tempat dan terbaca dalam struktur organisasi baik di tingkat Pusat, maupun di tingkat Daerah dan Desa.

Negara Indonesia adalah negara yang berKe Tuhanan Yang Maha Esa. Karena itu salah satu persyaratan pokok bagi seseorang untuk diangkat sebagai pemimpin, haruslah yang beragama. Bahkan tidak ada tempat sama sekali di bumi Indonesia bagi seseorang yang tidak beragama.

a. *Syarat-syarat Kepemimpinan.*

Baik kepemimpinan dalam organisasi formal, maupun kepemimpinan dalam organisasi informal, seorang pemimpin di bidang keagamaan seharusnya memiliki persyaratan sebagai berikut :

- 1). Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2). Berjiwa Pancasila dan tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan maupun tindakan yang melawan hukum, Undang-undang ataupun ketentuan Pemerintah.
- 3). Memiliki sejumlah pengetahuan tentang keagamaan, serta mampu menjadi panutan dalam masyarakat.
- 4). Jujur, cerdas dan berwibawa.
- 5). Mempunyai hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah serta organisasi lainnya di desa.

- 6). Mampu mengorbankan rasa maupun harta untuk kepentingan umum.

Pengorbanan rasa dan harta adalah merupakan salah satu konsekwensi daripada kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan. Tidak ada seorangpun di antara pemimpin keagamaan di desa, yang digaji oleh pemerintah sedang terdapat banyak problema di desa yang terkadang membutuhkan dana. Dalam keadaan yang demikian ini, Pemimpin sebagai penanggung jawab organisasi terkadang harus mengorbankan hartanya di samping pengorbanan rasa yang tidak terbilang nilainya.

Oleh karena itu di samping persyaratan kepemimpinan yang disebutkan di atas, perlu pula didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1). Seorang pemimpin seharusnya memiliki kemampuan ekonomi yang kuat (Inf. : 28).
- 2). Mempunyai kedudukan yang tinggi dalam tingkatan sosial kemasyarakatan sebagai kekuatan psikologi untuk mempengaruhi warga masyarakat setempat.

b. *Hak dan Kewajiban.*

Pada dasarnya hak dan kewajiban Pemimpin organisasi itu sama. Perbedaannya hanya terdapat pada bidang kegiatan di masing-masing organisasi, sebab hampir semua bentuk kegiatan masyarakat di pedesaan telah diwadahi oleh suatu organisasi di mana prinsip-prinsip organisasi itu pada dasarnya adalah sama, yaitu membina kerja-sama yang baik dan tertib antara anggota untuk mencapai tujuan tertentu.

Di dalam proses interaksi antar umat beragama, serta usaha masyarakat untuk mendapatkan tuntunan hidup beragama itu, Pemimpin organisasi mempunyai peranan tertentu yang merupakan hak dan kewajibannya, yaitu :

- 1). Pemimpin organisasi ini berhak menyelenggarakan administrasi organisasi serta mendayagunakan segenap aparat dan anggota-anggota organisasinya.
- 2). Pemimpin organisasi berhak merencanakan dan menetapkan program kegiatan organisasi berdasarkan hasil musyawarah anggota;

- 3). Unsur pembantu pimpinan, seperti Khatib, Bilal dan Doja berhak untuk memberikan pertimbangan atas kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpinnya.
- 4). Dalam keadaan tertentu, unsur pembantu pimpinan berhak untuk mewakili pimpinannya misalnya Bila Imam Mesjid dalam keadaan sakit atau tidak berada di tempat, maka Khatib dapat bertindak sebagai Imam dalam batas-batas wewenang tertentu;
- 5). Khusus pejabat P3NTCR di desa, berhak memungut biaya administrasi dari pernikahan seseorang.

Di samping hak-hak pemimpin seperti yang disebutkan di atas, pimpinan organisasi keagamaan ini mempunyai pula sejumlah tanggung jawab baik terhadap organisasi, maupun terhadap masyarakat sebagai pendukung organisasi tersebut .

Di dalam usaha pembinaan organisasi, pemimpin organisasi wajib :

- 1). Membantu pemerintah di dalam pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan;
- 2). Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan baik oleh aparat organisasi, maupun kepada segenap masyarakat setempat;
- 3). Mengadakan hubungan koordinatif maupun informatif dengan pemerintah, pimpinan organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Terhadap masyarakat, Pemimpin organisasi di bidang keagamaan mengemban tanggung jawab yang sangat menentukan citra umat beragama, yaitu :

- 1). Meningkatkan pengabdian organisasi terhadap pembangunan mental masyarakat;
- 2). Membina persatuan dan kesatuan umat beragama melalui kepemimpinan agama serta pengamalan ajaran/syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
- 3). Melestarikan kebudayaan Islam serta membendung arus kebudayaan luar yang mengandung eksese-eksese negatif terhadap syiar Islam di pedesaan;
- 4). Mengkoordinir kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan rukun-rukun Islam sebagai eksistensi keimanan dan kepercayaan

yaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Khusus dalam organisasi Pegawai Mesjid (Ta'mirul Mesjid), terdapat pembagian tugas yang tegas bagi setiap unsur pengurusnya.

Imam mesjid selain tugasnya mengkoordinir usaha-usaha pengembangan organisasinya, juga bertugas sebagai pemimpin yang diimami oleh para anggota di dalam pelaksanaan sholat bersama (berjamaah).

Khatib, adalah unsur pejabat (pembantu pimpinan) yang disertai tugas pokok yaitu sebagai Pembaca Khotbah pada sholat Jum'at yang dilaksanakan di mesjid sekali dalam seminggu.

Bilal, bertugas sebagai Muadzin dalam setiap penyelenggaraan sholat bersama di mesjid.

Doja, adalah merupakan pembantu (pesuruh) dalam organisasi Ta'mirul Mesjid. Tugas pokoknya ialah membersihkan mesjid di setiap hari serta memberikan isyarat waktu sholat melalui pukulan beduknya.

c. *Atribut/Symbol.*

Pada zaman dahulu atribut/symbol dari seorang Imam Mesjid di pedesaan, ditandai dengan jumbah dan tongkat yang dipergunakan setiap hari. Namun sekarang ini pemakaian tongkat hanya oleh seorang Doja di saat mengunjungi rumah-rumah para umat Islam pada waktu menjelang pelaksanaan sholat Jum'at di setiap minggu.

Di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi serta desa desa lainnya di pedalaman Kabupaten Kendari, pengenalan pemimpin dan unsur-unsur pejabat di bidang keagamaan, hanya melalui gelar/ nama panggilan pada masing-masing pejabat, yaitu :

- Imam Mesjid atau Imam Desa dipanggil *Pua Ima* yang berarti pak Imam;
- Khatib dipanggil dengan sebutan *Okate (Pua Kate)*;
- Bilal dipanggil dengan sebutan Bilala, sedang
- Doja umumnya dipanggil dengan nama *Ododa (Pua Doda)*.

Secara umum, atribut/symbol daripada organisasi Agama Islam ini ialah adanya mejid di desa-desa. Unsur pimpinan organisasi lainnya seperti Imam Desa, P3NTCR dan Guru mengaji

juga dapat dibedakan dalam panggilan mereka sehari-hari. Imam Desa dipanggil dengan sebutan *Ima Desa*, P3NTPCR dipanggil dengan sebutan P3, sedang Guru mengaji dipanggil dengan sebutan *Guru*. Antara Guru mengaji dengan Guru sekolah terdapat perbedaan sebutan sebagai pengenalnya. Guru mengaji disebut Guru, sedang Guru sekolah dipanggil dengan sebutan *Tuangguru*.

d. *Prosedur Pengangkatan.*

Prosedur pengangkatan pemimpin organisasi di bidang keagamaan menempuh beberapa cara yaitu cara pemilihan tradisional (pemilihan langsung dan terbuka), cara penunjukan langsung dari atas dan cara otomatis (terangkat dengan sendirinya).

Pengangkatan pemimpin dan pengurus Ta'mirul Mesjid sebagai Pegawai Mesjid di desa/kelurahan, dipilih langsung oleh masyarakat tanpa rahasia ataupun ketentuan tertentu, kecuali sebagai hasil musyawarah yang ditentukan dengan suara terbanyak serta pendapat dan saran pemerintah.

Untuk pemimpin organisasi Pegawai Syarat, diangkat berdasarkan penunjukan langsung dari pemerintah. Imam Desa ditunjuk oleh Camat atas saran Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa, sedang P3NTPCR ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas usul Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.

Berbeda halnya dengan prosedur pengangkatan Pemimpin organisasi Pengajian Al-Qur'an, di mana seorang Guru mengaji langsung menjadi pemimpin pada organisasi yang dibentuknya sendiri.

Ia menjadi pemimpin dalam organisasi tanpa melalui prosedur pemilihan ataupun penunjukan.

PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG AGAMA DALAM MASYARAKAT

Kepemimpinan di bidang agama telah berlangsung lebih awal dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Tenggara dibanding dengan unsur-unsur kepemimpinan lainnya yang kini berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya.

Kepemimpinan di bidang agama yang sekarang ini berperan dalam pembangunan bangsa pada galibnya adalah merupakan perkembangan organisasi-organisasi keagamaan tradisional sebagai suatu proses penyesuaian kebutuhan masyarakat di setiap zamannya.

Dalam pandangan secara keseluruhan, terlihat adanya keanekaragaman organisasi keagamaan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang beraneka suku bangsanya. Namun secara regional terlihat adanya keseragaman bentuk-bentuk organisasi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masing-masing suku bangsa.

Masyarakat Tolaki yang berdiam di wilayah pedesaan Kabupaten Kendari, ternyata memiliki bentuk-bentuk kepercayaan maupun organisasi keagamaan yang sama, karena orang-orang Tolaki di mana saja berada pada dasarnya mempunyai konsepsi yang sama tentang alam gaib. Kalaupun terdapat sedikit perbedaan misalnya dalam hal struktur organisasinya, itu hanya merupakan variasi yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang sedikit berbeda, atau potensi masyarakat yang kurang berimbang.

Sejak dahulu masyarakat Tolaki di pedesaan seperti yang bermukim di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi, telah merasakan pentingnya organisasi di bidang keagamaan. Bahkan oleh beberapa tokoh masyarakat di desa itu berpendapat bahwa semua organisasi kemasyarakatan itu sebaiknya menjiwai kepemimpinan keagamaan. Seorang Pemimpin yang di dalam dirinya tidak bersemi bibit-bibit ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak akan berhasil mensejahterakan anggota maupun masyarakatnya (Inf. : 27).

Di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi terlihat dengan nyata adanya pengaruh kepemimpinan agama dalam setiap kehidupan masyarakatnya.

Di lapangan pekerjaan sosial misalnya pada pembangunan mesjid, pembuatan jalan, pembuatan sumur umum, permintaan sumbangan sosial, penyelenggaraan pemakaman atau pesta penguburan keseluruhannya dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai amal. Kegiatan sosial yang demikian ini tidak didasarkan pada usaha mendapatkan uang (gaji/upah) atau karena takut akan atasan/pemerintah. Hal ini ternyata dalam fakta bahwa sebagian dari pembangunan di desa/kelurahan tersebut diselenggarakan dengan swadaya masyarakat.

Dalam hal hiburan/kesenian masyarakat kenyataannya bentuk-bentuk kesenian tradisional masyarakat di Desa Benua dan Kelurahan

Inalahi lebih banyak berorientasi dalam unsur-unsur agama/kepercayaan masyarakatnya. Unsur-unsur budaya modern yang bertentangan dengan konsep-konsep keimanannya terbendung rapat dan tidak dapat berbaur dengan kebudayaan tradisional yang masih murni.

Adanya organisasi-organisasi keagamaan berperan aktif dalam masyarakat, citra agama Islam tetap terpelihara.

Di Desa Benua baru-baru ini ditemukan suatu kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan lapangan perekonomian (pertanian) penduduk, yaitu suatu upacara sembahyang bersama di areal pertanian penduduk dengan tujuan memohon keampunan dari Tuhan Maha Pengasih serta curahan rahmat dari pada-Nya, agar tanah mereka yang sudah tidak produktif dapat menghasilkan panen yang melimpah (Inf. : 9).

Dalam hal adat istiadat masyarakat di pedesaan, ternyata hampir keseluruhan upacara-upacara adat yang diselenggarakan di desa-desa senantiasa berorientasi pada falsafah agama, misalnya :

- 1). Upacara syukuran karena berhasil dalam salah satu usaha (lulus ujian, tiba dari perjalanan atau sembuh dari pengobatan);
- 2). Pesta tahunan yang diselenggarakan setiap tahun sesudah panen;
- 3). Upacara *metandanguni* (peringatan hari ketujuh kelahiran seorang bayi);
- 4). Upacara *mepokui* (potong rambut) bayi ataupun balita;
- 5). Mandi syafar dalam bulan syafar;
- 6). Peringatan Hari-hari Besar Islam, dan lain-lain.

Dari beberapa kenyataan kehidupan masyarakat di atas, terbaca-lah dengan jelas betapa fungsi dan peranan kepemimpinan di bidang agama. Aktivitas-aktivitas sosial masyarakat di pedesaan sebagian besarnya disponsori oleh organisasi-organisasi keagamaan yang ada di desa/kelurahan.

Pengaruh-pengaruh keagamaan senantiasa mewarnai sikap, tingkah-laku dan konsep-konsep pemikiran masyarakat di dalam menghadapi segala permasalahan hidupnya.

Adanya organisasi Pegawai Mesjid, Remaja Mesjid, Amil Zakat, Badan Pengajian dan lain-lainnya, telah berhasil meningkatkan ketaqwaan masyarakat terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

BAB VII

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Sesungguhnya manusia itu dilahirkan bersama fitrahnya, yaitu rasa, akal dan pikiran yang kelak membedakannya dengan makhluk lain yang tidak punya akal dan pikiran (hewan). Kesempurnaan yang dibawa lahir oleh manusia seperti yang dinyatakan oleh Tuhan dalam firmanNya, baru merupakan konsep-konsep yang memerlukan pengembangan oleh manusia di sekelilingnya.

Seorang bayi lahir di tengah keluarga (ayah dan ibunya), tidak bedanya dengan sehelai kertas putih yang siap dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Maka sejak itu terjadilah proses pendidikan atas diri seorang bayi di mana ayah dan ibu merupakan pendidik yang pertama. Itulah yang kemudian dikenal sebagai pendidikan keluarga yang sifatnya non formal (pendidikan informal).

Akibat pembentukan lingkungan yaitu keluarga dan masyarakat, maka sering terjadi pola tingkah laku seorang berbeda dengan yang lain, sedang mereka itu dilahirkan dengan fitrah yang sama.

Dalam jangkauan yang lebih luas kita melihat adanya perbedaan yang menonjol antara kemajuan suatu bangsa dengan yang lain sebagai neraca tingkat kemajuan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing negara dan bangsa.

Namun bagaimanapun bersahajanya suatu masyarakat, di sana pasti ada pendidikan yang berlangsung, baik secara formal maupun secara informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung sekolah, sedang pendidikan informal ialah pendidikan yang berlangsung di luar sekolah baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat.

Pendidikan formal di Sulawesi Tenggara baru mulai dikenal sejak datangnya orang-orang Belanda di daerah itu. Sebelumnya itu hanya ada pendidikan informal di mana kepemimpinan pendidikan keluarga lebih dominan daripada kepemimpinan pendidikan di luar keluarga. Kenyataannya bahwa anak-anak yang dibesarkan di lingkungan istana lebih maju dan lebih tinggi tingkatan pengetahuannya dibanding dengan anak-anak dari rakyat jelata.

Di Daerah Kendari, secara resminya baru dikenal pendidikan

formal di sekitar tahun 1912, sementara di daerah lain telah menghasilkan sejumlah tokoh intelektual sebagai kader pemimpin dalam masyarakatnya. Salah satu usaha pemerintah di dalam memburu keterlambatan di daerah ini, ialah meningkatkan pendidikan di dalam masyarakat.

Kenyataannya bahwa hampir di semua desa/kelurahan dalam wilayah Sulawesi Tenggara terdapat sekolah-sekolah sebagai salah satu organisasi pendidikan formal baik berupa sekolah umum maupun sekolah kejuruan. Di samping itu terdapat pula organisasi-organisasi pendukung yang bergerak di bidang pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai upaya masyarakat setempat untuk memajukan pendidikan anak-anak mereka.

ORGANISASI DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN.

Organisasi dalam kegiatan pendidikan tidak hanya meliputi sekolah-sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal; tetapi juga mencakup keseluruhan organisasi intra maupun ekstra yang bergerak di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, menurut statusnya organisasi pendidikan di desa dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok organisasi yang berstatus formal dan kelompok organisasi informal.

ORGANISASI FORMAL.

1. Sekolah Dasar.

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan, Pemerintah Republik Indonesia telah membangun sekolah-sekolah dasar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu di setiap desa/kelurahan terdapat sekolah-sekolah dasar yang dibina oleh pemerintah. Bahkan ada beberapa desa/kelurahan yang memiliki lebih dari satu sekolah dasar, seperti yang ditemukan di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi.

Di Desa Benua terdapat 2 buah sekolah dasar yaitu sekolah dasar yang lama dan sekolah dasar yang baru yang dikenal sebagai Sekolah Dasar Inpres. Sekolah-sekolah itu ialah :

- 1). Sekolah Dasar Amonggedo (sekolah yang lama);
- 2). Sekolah Dasar Benua (SD. Inpres).

Di Kelurahan Inalahi juga terdapat 2 buah sekolah dasar, yaitu :

- 1). Sekolah Dasar No. 7 Wawotobi (SD. yang lama);
- 2). Sekolah Dasar Inpres Inalahi (SD. yang baru).

Sekolah-sekolah tersebut di atas berstatus negeri dan dibina langsung oleh Departemen Dalam Negeri bekerja-sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

a. *Kepengurusan.*

Kepengurusan di dalam sekolah terbagi pula atas dua bahagian, yaitu kepengurusan dalam bidang edukatif (staf pengajar) dan kepengurusan dalam bidang administratif (staf tata usaha).

Di dalam kepengurusan bidang edukatif terdapat unsur Kepala dan unsur Pembantu (Guru Kelas), sedang staf administratif sekolah terdiri dari Kepala Tata Usaha, Pelaksana dan Pembantu Pelaksana (pesuruh).

Sebagai gambaran kepengurusan dimaksud, di bawah ini dikemukakan susunan organisasi yang terdapat di masing-masing sekolah tersebut, sebagai berikut:

- 1). Sekolah Dasar Amonggedo.
 - Kepala Sekolah
 - Pembantu/Guru Kelas
 - Staf Tata Usaha.
- 2). Sekolah Dasar Inpres Benua.
 - Kepala Sekolah
 - Pembantu
- 3). Sekolah Dasar No. 7 Wawotobi.
 - Kepala Sekolah
 - Pembantu/Guru Kelas.
- 4). Sekolah Dasar Inpres Inalahi.
 - Kepala Sekolah
 - Pembantu/Guru Kelas.
 - Pesuruh Sekolah

b. *Kepengurusan*

Keanggotaan dalam organisasi/unit sekolah dasar, meliputi keseluruhan murid-murid di masing-masing sekolah. Tiap-tiap sekolah dasar memiliki 6 buah kelas, yaitu kelas I

sampai dengan kelas VI. Masing-masing kelas mempunyai anggota tertentu yang jumlahnya sangat tergantung pada potensi anak usia belajar di desa. Menurut ketentuan yang berlaku di desa sample, yang diterima menjadi murid di sekolah dasar ialah anak-anak yang sudah mencapai usia 7 tahun. Diperkirakan bahwa dalam usia sekitar 13/14 tahun, mereka sudah dapat menamatkan pendidikan di sekolah dasar dan selanjutnya beralih ke sekolah yang lebih tinggi (Sekolah Menengah Tingkat Pertama).

c. *Pusat Kegiatan.*

Semua kegiatan organisasi ini berlangsung di sekolah. Baik kegiatan administrasi, terlebih-lebih kegiatan belajar-mengajar senantiasa dipusatkan di sekolah. Kecuali kegiatan darmawisata, biasanya dilangsungkan di obyek-obyek bersejarah ataupun di tempat-tempat rekreasi yang ada di sekitar desa.

d. *Kegiatan*

Kepala Sekolah dalam kedudukannya sebagai Pemimpin organisasi/unit sekolah dasar, melakukan kegiatan administrasi kantor/personil dan kegiatan edukatif (mengajar). Pembantu/Guru kelas menyelenggarakan pelajaran di masing-masing kelas yang dipertanggungjawabkannya.

Kepala Tata Usaha sekolah menyelenggarakan kegiatan administrasi kantor, sedang Pesuruh Sekolah bertugas membersihkan sekolah dan juga menjaga keamanan sekolah pada waktu malam. Karena itu Pesuruh/Penjaga sekolah di desa-desa berdiam di rumah penjaga sekolah yang berada di lingkungan sekolah.

Dalam praktek sehari-hari, kegiatan administratif sekolah diselenggarakan oleh Kepala Sekolah, sebab pada umumnya Sekolah-sekolah Dasar di pedesaan belum mempunyai staf tata usaha, kecuali seorang pesuruh sebagai penjaga sekolah.

e. *Tujuan.*

Adanya Sekolah Dasar di desa-desa bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas mungkin serta semudah-mudahnya bagi masyarakat yang berada di pedesaan untuk

mendapatkan pelajaran melalui pendidikan formal. Betapa pemerintah memikirkan pentingnya pendidikan itu sebagai suatu kebutuhan utama dalam pembangunan bangsa, sehingga pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan itu merupakan salah satu penekanan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta batang tubuh UUD. 1945 itu sendiri.

2. Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), adalah lanjutan dari pendidikan sekolah dasar. Di desa-desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kendari sering ditemukan dua jenis Sekolah Menengah Tingkat Pertama yaitu; Sekolah Menengah Umum (SMP) yang dibina oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekolah Menengah Agama Islam (Madrasah Tzanawiyah) yang dibina oleh Departemen Agama.

Di Desa Benua pada beberapa tahun terakhir ini, telah didirikan sebuah SMP, sehingga anak-anak dari desa tersebut yang biasanya pergi melanjutkan pendidikannya ke Ibukota Kecamatan (SMP Negeri Wawotobi) atau ke sekolah yang lebih dekat (SMP Neg. Pondidaha) di Desa Amesiu, tidak perlu lagi meninggalkan kampung halamannya.

Demikian pula di Kelurahan Inalahi, di sana ada sebuah Sekolah Menengah Agama (Madrasah Tzanawiyah), yang sama tingkatannya dengan SMP.

a. *Kepengurusan.*

Kepengurusan dalam unit organisasi Sekolah Menengah Tingkat Pertama, terdiri dari :

- Pengurus bidang edukatif (Staf Pengajar/Dewan Guru)
- Pengurus bidang administratif (Staf Tata Usaha).

Staf Pengajar/Dewan Guru, meliputi :

- 1). Kepala Sekolah
- 2). Wakil Kepala Sekolah
- 3). Guru Bidang Studi.

Staf Tata Usaha terdiri dari :

- 1). Kepala Tata Usaha
- 2). Staf Tata Usaha, dan
- 3). Pesuruh.

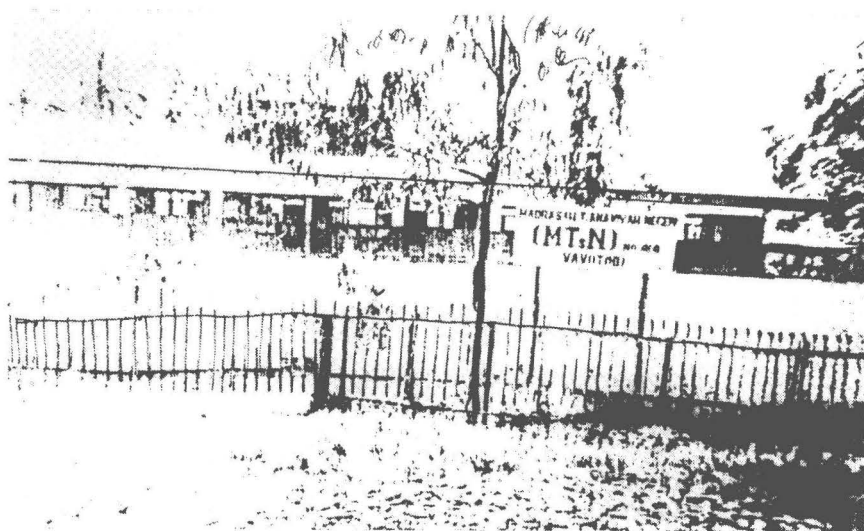
Sebagai gambaran kepengurusan unit organisasi Sekolah Menengah Tingkat Pertama, di bawah ini dikemukakan susunan kepengurusan Madrasah Tzanawiyah Negeri Wawotobi di Inalahi, sebagai berikut:

- a). Kepala Sekolah
- b). Wakil Kepala Sekolah
- c). Guru Tetap/Bidang Studi
- d). Kepala Tata Usaha
- c). Staf Tata Usaha.

Pimpinan umum daripada unit organisasi sekolah ini ialah Kepala Sekolah. Dalam kedudukannya itu Kepala Sekolah mempertanggungjawabkan keseluruhan kegiatan sekolah, baik kegiatan belajar mengajar, maupun kegiatan administratif.

b. *Kenaggotaan.*

Kenagotaan dalam unit organisasi Sekolah Menengah Tingkat Pertama meliputi keseluruhan Pelajar di sekolah itu.



Gedung Madrasah Tzanawiah Negeri Wawotobi di Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi.

c. *Pusat Kegiatan.*

Keseluruhan kegiatan daripada unit organisasi sekolah dipusatkan di sekolah. Dalam suatu Sekolah Menengah Tingkat Pertama, terdapat ruangan kantor, ruangan belajar dan ruangan praktikum (laboratorium). Bahkan ada sekolah yang dilengkapi dengan ruangan perpustakaan.

Pada SMP Lahumbuti di Desa Benua dan Madrasah Tzanawiyah di Kelurahan Inalahi, belum selengkap dengan keadaan formasi ruangan kegiatan yang digambarkan di atas. Oleh karena itu seluruh kegiatan unit organisasi di kedua Sekolah Menengah Tingkat Pertama yang disebutkan di atas, diselenggarakan di sekolah tersebut.

d. *Kegiatan.*

Telah disebutkan di atas bahwa kegiatan unit organisasi SMP dan Madrasah Tzanawiyah adalah meliputi; kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administratif.

Kepala Sekolah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai fungsi, peranan dan tanggung jawabnya selaku Pemimpin organisasi sekolah, yaitu merencana, mengelola, mengawasi dan menilai serta melaporkan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan administratif sekolah yang dipimpinnya.

Guru bidang studi menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar sesuai bidang studi yang dikuasainya. Sedang Kepala Tata Usaha dan staf Tata Usaha menyelenggarakan kegiatan administratif sekolah.

Pelajar-pelajar selaku anggota organisasi dalam kegiatan belajar-mengajar ini melakukan pula kegiatan-kegiatan kependidikan yang meliputi;

- Kegiatan belajar
- Kegiatan praktek
- Darmawisata, rekreasi dan lain-lain.

e. *Tujuan.*

Selain tujuan untuk memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak bagi masyarakat, Sekolah Menengah Tingkat Pertama secara khusus berusaha membina mengembangkan bakat-bakat khusus yang dimiliki oleh

masing-masing pelajar, demi pembentukan masa depan yang lebih tegas dan cemerlang.

3. Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan.

Organisasi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan yang disingkat BP-3, adalah salah satu wadah yang menghimpun usaha bersama orang tua murid dan Guru untuk menggalakkan dan meningkatkan pelaksanaan belajar-mengajar di sekolah.

Dahulu organisasi BP-3 ini dinamakan organisasi Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG). Meskipun peristilahannya berbeda, namun sasaran dan tujuan yang ingin dicapai adalah sama, yaitu menjalin kerja sama yang harmonis dan bersifat kekeluargaan antara Orang Tua Murid dan Guru dalam menunjang keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka.

a. *Kepengurusan.*

Sesuai dengan Instruksi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 17/O/1974, tentang pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP-3) di masing-masing sekolah, maka susunan dan masa jabatan Pengurus BP-3, adalah ditentukan sebagai berikut:

- 1). Jumlah anggota pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Jika dipandang perlu, maka pengurusnya dapat ditambah menurut kebutuhan organisasi dan dibagi dalam bentuk seksi;
 - 2). Personil pengurus terdiri dari Orang Tua Murid, Wali Murid, tokoh-tokoh masyarakat;
 - 3). Kepala Sekolah karena jabatannya, diangkat sebagai penasihat pengurus;
 - 4). Ketua, Sekretaris dan Bendahara adalah merupakan pengurus harian dalam organisasi tersebut;
 - 5). Pengurus dipilih dan disahkan oleh para anggota BP-3 di masing-masing sekolah;
 - 6). Masa jabatan kepengurusan berlangsung selama satu tahun.
- Organisasi BP-3 ini ada di setiap sekolah, baik Sekolah

Dasar, maupun Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Atas.

b. *Keanggotaan*

Mengenai keanggotaan dalam organisasi Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah, diatur pula sesuai ketentuan dalam Instruksi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu, bahwa anggota-anggota daripada organisasi BP-3 itu terdiri dari:

- 1). Orang Tua Murid atau Wali Murid,
- 2). Personil dari sekolah yang bersangkutan, dan
- 3). Tokoh masyarakat serta warga masyarakat setempat.

Keanggotaan orang tua murid di dalam organisasi BP-3, adalah merupakan keharusan, yaitu setiap penanggung murid atau siswa di satu sekolah secara otomatis harus menjadi anggota organisasi BP-3 di sekolah tersebut.

c. *Pusat Kegiatan.*

Sebagai suatu organisasi pendukung yang dalam kegiatan pokoknya merupakan partner daripada organisasi sekolah dan pemerintah dalam membina dan mengembangkan sekolah, maka kegiatan-kegiatan BP-3 pada umumnya dipusatkan di sekolah, karena justru sekolah itulah yang merupakan sasaran dan sekaligus sebagai obyek kegiatan daripada organisasi tersebut.

Pusat-pusat kegiatan BP-3 di Desa Benua ialah di SD. Negeri Amonggedo, SD. Inpres Benua dan SMP. Lahumbuti. Sedang di Kelurahan Inalahi, pusat kegiatan organisasi BP-3 ialah di SD. Negeri No. 7 Wawotobi, SD. Inpres Inalahi dan Madrasah Tzanawiyah Negeri Wawotobi di Inalahi.

d. *Kegiatan.*

Kegiatan organisasi Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan meliputi kegiatan administratif dan kegiatan operasional.

Kegiatan-kegiatan di bidang administratif antara lain:

- 1). Mengadakan registrasi anggota;

- 2). Menyusun program kerja organisasi;
- 3). Menyelenggarakan surat-menyurat ke dalam maupun keluar;
- 4). Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan/kegiatan selama periode kepengurusan.

Kegiatan yang sifatnya operasional ialah:

- a) Menyelenggarakan rapat-rapat baik antara pengurus, antara BP-3 dengan Guru-guru, atau rapat terbuka antara pengurus, anggota dan Dewan Guru yang dilaksanakan setiap akhir periode suatu kepengurusan;
- b). Memungut dan sukarela ataupun iuran anggota sesuai hasil musyawarah anggota;
- c). Menyelenggarakan perbaikan/perawatan gedung sekolah;
- d). Membantu pemerintah dalam usaha penambahan alat mobiler seperti lemari, kursi dan meja murid/guru.

Dalam hal-hal tertentu, BP-3 dapat memberikan informasi atau saran-saran pengembangan sekolah baik kepada para anggota maupun kepada Kepala Sekolah dan Pemerintah setempat.

e. *Tujuan.*

Sejak dahulu di mana sistem pendidikan di pedesaan masih menganut sistem kepemimpinan tradisional, pihak orang tua murid dan masyarakat secara keseluruhannya telah berperan sebagai motivator dan dinamisator dalam pembangunan pendidikan. Pembangunan gedung-gedung sekolah di pedesaan pada umumnya dilakukan dengan swadaya penuh masyarakat setempat.

Adanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP-3) selaku penjelmaan organisasi Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG) yang telah ada sebelumnya, adalah merupakan pewadahan/pengorganisasian potensi orang tua murid dan guru dalam satu ikatan kerja-sama untuk mencapai cita-cita bersama.

Tujuan yang ingin dicapai melalui organisasi ini adalah untuk terciptanya kerja-sama yang harmonis dari unsur-unsur pendidik yaitu; Guru selaku pendidik di sekolah dan orang tua selaku pendidik dalam lingkungan keluarga. Dengan ada-

nya organisasi yang mengikat antara unsur-unsur pendidikan itu, diharapkan penyelenggaraan pendidikan itu serta segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan senantiasa menjadi tanggung jawab bersama antara murid, guru, orang tua dan masyarakat.

ORGANISASI INFORMAL

Di beberapa lingkungan masyarakat dalam wilayah Sulawesi Tenggara, terdapat berbagai macam kegiatan bersama yang bergerak di bidang pendidikan. Kegiatan-kegiatan dimaksud diselenggarakan bersama baik dalam bentuk kelompok-kelompok belajar di dalam dan di luar sekolah, maupun dalam bentuk organisasi ekstern yang terdiri dari persatuan antara beberapa keluarga untuk menunjang pendidikan anak-anaknya.

Di antaranya terdapat di Desa Benua suatu organisasi yang para anggotanya menyebutkan Persatuan Orang Tua Murid, Pelajar Indonesia Amonggedo yang disingkat POMPIA. Organisasi ini didirikan sejak tahun 1957 atas inisiatif masyarakat Amonggedo (Sekarang Desa Benua) di bawah pimpinan H. Abdur Razak.

a. *Kepengurusan.*

Organisasi POMPIA sejak didirikannya, telah menganut pola organisasi yang berstruktur. Di dalam kepengurusannya terdapat unsur Ketua, Sekretaris/Penulis, Bendahara dan seksi-seksi, Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara.

Pengurus-pengurusnya ini terdiri dari warga desa setempat yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin organisasi tersebut.

b. *Keanggotaan*

Keanggotaan dalam organisasi POMPIA terdiri dari anggota biasa yaitu anggota yang mempunyai anak di bangku sekolah dan anggota luar biasa yaitu masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang tidak atau belum mempunyai anak yang bersekolah. Sistem keanggotaan cukup terbuka kepada setiap anggota masyarakat yang ingin masuk organisasi tersebut. Bagi Pelajar

atau Siswa yang telah menamatkan sekolahnya, secara otomatis harus menjadi anggota pada organisasi tersebut.

c. *Pusat Kegiatan.*

Kegiatan-kegiatan daripada organisasi ini bergerak di lingkungan masyarakat Benua terutama dalam diri anggota organisasi POMPIA. Pengelolaan organisasi tersebut dipusatkan di rumah Bendahara, yaitu Laanda yang pada waktu itu menjabat pimpinan Pemerintahan Desa (Kepala Desa).

d. *Kegiatan.*

Kegiatan organisasi ini secara umum bergerak dalam usaha mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan biaya kepada setiap Pelajar/Siswa yang berasal dari Desa Benua. Di samping itu para pengurus dalam hal ini Ketua, Sekretaris dan Bendahara, melakukan pula kegiatan administratif, yaitu:

- 1). Menyelenggarakan registrasi anggota;
- 2). Menginventarisir anak-anak sekolah menurut tingkat pendidikannya serta daerah tempat belajar;
- 3). Mengumpulkan uang pangkal dan iuran anggota;
- 4). Menyalurkan bantuan kepada anak-anak sekolah dengan prioritas kepada tingkat Pelajar/Siswa yang berada di luar daerah;
- 5). Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban organisasi kepada para anggota.

Salah satu hasil dari organisasi POMPIA ini ialah tersedianya tanah/kintal masyarakat Benua di Ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara yang selama beberapa tahun yang lalu telah dijadikan pemukiman para Pelajar/Siswa asal Desa Benua yang bersekolah di kota Kendari (Inf. : 26).

Hasil lain yang dapat ditonjolkan ialah bahwa beberapa orang putra kelahiran Desa Benua yang telah menyelesaikan pendidikannya, kini telah kembali mengabdikan dalam masyarakat.

e. *Tujuan.*

Tujuan umum organisasi POMPIA ialah membina dan mengembangkan persatuan di kalangan masyarakat Desa Benua serta menumbuhkan kesadaran berkoperasi dalam setiap usaha/kegiatan pembangunan.

Tujuan khususnya ialah membentuk kader-kader Pemimpin masyarakat serta memberikan bantuan kepada orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya secara individual.

Kenyataan di dalam masyarakat pedesaan yang pada umumnya tergolong pada kelompok masyarakat yang tidak mampu (ekonomi lemah), dapat menyelenggarakan pendidikan anak-anaknya melalui organisasi/perkumpulan seperti tersebut di atas.

Di beberapa desa ternyata ditemukan pula beberapa perkumpulan kecil yang hanya terdiri dari satu rumpun keluarga (ayah, ibu, paman dan kakek) dengan tujuan yang sama di atas, yaitu usaha bersama untuk membiayai pendidikan anak, kemenakan atau cucu mereka.

Ada pula semacam organisasi atau perkumpulan masyarakat yang sifatnya insidentil dan bergerak di bidang usaha menunjang pendidikan anak-anak mereka, yaitu kelompok les/sumbangan pendidikan.

Setiap orang tua yang anaknya telah tamat dari salah satu sekolah, mengadakan doa syukuran dengan mengundang segenap keluarga dan handai tolan untuk maksud mengumpulkan dana pembiayaan kelanjutan pendidikan anaknya. Masing-masing undangan memberikan sumbangannya yang dicatat oleh yang berkepentingan sebagai utang yang kelak akan dikembalikan.

SISTEM KEPEMIMPINAN DI BIDANG PENDIDIKAN.

Dari beberapa organisasi kependidikan yang telah dikemukakan di atas, dapatlah digolongkan ke dalam dua golongan kepemimpinan, yaitu:

- 1). Kepemimpinan pendidikan dalam persekolahan;
- 2). Kepemimpinan dalam organisasi ekstern di bidang pendidikan.

Kepemimpinan pendidikan dalam persekolahan dimaksudkan adalah kepemimpinan yang berlangsung di sekolah sebagai suatu aktivitas bersama dalam proses belajar-mengajar. Unsur-unsur pemimpin dalam organisasi pendidikan di sekolah terdiri dari Kepala Sekolah sebagai Pimpinan umum dalam sekolah dan Guru-guru selaku Pimpinan dalam kelas.

Sedang yang dimaksudkan dengan kepemimpinan dalam organisasi ektern di bidang pendidikan adalah kepemimpinan dalam organisasi penunjang penyelenggaraan pendidikan. Salah satu organisasi yang termasuk dalam kelompok ini ialah Organisasi Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP-3) yang terdapat di masing-masing sekolah.

KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI PERSEKOLAHAN.

Yang termasuk dalam organisasi persekolahan ini adalah Sekolah Dasar (S.D) dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (S.M.T.P.). Meskipun terdapat perbedaan tingkatan antara SD dengan SMTP atau perbedaan istilah antara SMP dengan Madrasah Tzanawiyah, namun dalam hal sistem kepemimpinannya sama-sama menganut sistem yang sama.

Dalam uraian ini hanya dibahas dua macam organisasi persekolahan, yaitu SD dan SMTP, karena ternyata dalam masyarakat pedesaan hanya ditemukan dua jenis tingkatan organisasi persekolahan. Bahkan itu pun hanya ditemukan di beberapa desa seperti di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi yang dijadikan sampel wilayah penelitian Team. Di desa-desa lain hanya terdapat satu Sekolah Dasar dengan jumlah murid yang sangat sedikit karena potensi anak usia belajar sangat terbatas.

a. *Syarat-syarat Kepemimpinan.*

Organisasi unit persekolahan di Kedua desa sampel tersebut di atas adalah berstatus formal. Baik pendirian sekolahnya, maupun pengangkatan personil penyelenggara pendidikan di masing-masing sekolah, diatur secara resmi oleh Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah. Syarat-syarat kepemimpinan di dalam organisasi persekolahan itu ialah:

- 1). Memiliki tingkatan pengetahuan yang sesuai dengan tingkat kepemimpinannya;
 - Kepala Sekolah Dasar seharusnya berijazah Sekolah Guru Atas (SGA/SPG/KPG).
 - Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama seharusnya memiliki ijazah Sarjana Muda Pendidikan atau sekurangnya berijazah Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP/Diploma Akta I).

- 2). Mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam pembangunan masyarakat dan bangsa utamanya di bidang pendidikan;
- 3). Tidak diragukan kesetiaannya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah;
- 4). Cakap, cerdas dan berwibawa;
- 5). Berjiwa pemimpin, kreatif dan dinamis;
- 6). Mampu mengkoordinir, mengawasi, menilai dan memberikan petunjuk serta dorongan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya;
- 7). Dan lain-lain sebagainya.

Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu menjadi panutan masyarakat, menjadi pendorong atau penggerak aktivitas masyarakat dan mengawasi/menilai secara positif dan obyektif pelaksanaan tugas-tugas anggotanya, seperti yang digambarkan dalam falsafah kepemimpinan Jawa Kuno, yaitu "Ing ngarso sung tulodo, Ing madya manguk karso, Tutwuri handayani"

b. *Hak dan Kewajiban.*

Kepala Sekolah selaku Pemimpin organisasi unit persekolahan mempunyai hak-hak tertentu, yaitu:

- 1). memimpin dan mewakili sekolahnya dalam aktivitas ke dalam dan ke luar;
- 2). Merencanakan dan menetapkan Program Kegiatan administrasi maupun teknis pada sekolah yang dipimpinnya;
- 3). Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Guru-guru dan staf Tata Usaha di sekolahnya;
- 4). Mengusulkan mutasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kenaikan pangkat/ruang/golongan/gaji berkala bagi staf pembantunya;
- 5). Memperoleh penghasilan berupa gaji, tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan jabatannya itu.

Guru kelas dalam kedudukannya sebagai Pemimpin kelas dan

juga sebagai Pegawai Negeri Sipil, mempunyai hak-hak tertentu, yaitu:

- 1). Mengatur kelas menurut ketentuan yang berlaku di sekolah;
- 2). Menilai dan menentukan kenaikan kelas seorang murid-murid yang berada di bawah asuhannya;
- 3). Mendapatkan kenaikan pangkat, golongan, ruang gaji dan kenaikan gaji berkala;
- 4). Memajukan usul dan saran pengembangan organisasi ataupun kebijakan pimpinan sekolah.

Di samping hak-hak kepemimpinan yang disebutkan di atas, terdapat pula beberapa kewajiban yang harus diemban oleh seorang Kepala Sekolah /Guru pada salah satu unit sekolah.

Kewajiban seorang Kepala Sekolah di dalam kepemimpinannya adalah sebagai berikut:

- 1). Kepala Sekolah wajib menyelenggarakan/mengkoordinir kegiatan pelaksanaan Program Pendidikan dan administrasi sekolah;
- 2). Mengadakan hubungan konsultatif secara vertikal kepada atasannya dan hubungan koordinatif kepada segenap bawahannya;
- 3). Wajib bekerja-sama dengan Pemerintah dan organisasi sosial dalam masyarakat, terutama dengan organisasi BP-3 di sekolahnya;
- 4). Membimbing, mengawasi, menegur dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada setiap aparatnya;
- 5). Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekolah kepada atasannya;
- 6). Memperhatikan kebutuhan, keinginan dan nasib bawahannya.

Sedang seorang Guru dalam kedudukannya sebagai bawahan dari Kepala Sekolah dan sebagai Pimpinan pada salah satu kelas, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1). Sebagai bawahan, Guru wajib tunduk dan mentaati segala ketentuan maupun kebijakan pimpinan;
- 2). Sebagai Pemimpin Kelas, guru wajib menyelenggarakan, mem-

berikan pelajaran, pembinaan serta pembentukan pribadi murid/pelajar yang berada di bawah asuhannya.

c. *Atribut/Symbol.*

Di dalam lingkungan masyarakat Tolaki, seorang Kepala Sekolah sering dipanggil dengan sebutan *Kapala Sikola*, sedang Guru Sekolah digelar *Tuangguru*. Sering juga peristilahan ini dikacaukan dengan sebutan secara merata kepada aparat persekolahan dengan istilah *Tuangguru*. Baik Kepala Sekolah, maupun Guru Sekolah sering dipanggil dengan sebutan yang sama yaitu *Tuangguru*.

Contohnya, seorang pejabat echelon III pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Tenggara, seperti Husen A. Chalik, BA, Kepala Bidang PSK karena berasal dari jabatan Guru/Kepala Sekolah, maka oleh masyarakat pedesaan Kecamatan Wawotobi masih memanggilnya dengan sebutan *Tuangguru Husen*.

Tanda-tanda lain yang merupakan perlambang kepemimpinan di bidang pendidikan ini hampir-hampir tidak kelihatan lagi, kecuali pada bentuk dan warna pakaian seragam (safari abu-abu) dan sebuah simbol Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lencana yang dipergunakan oleh seluruh aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanpa perbedaan pangkat, fungsi ataupun jabatan seseorang.

d. *Prosedur Pengangkatan.*

Prosedur pengangkatan seorang pemimpin di bidang pendidikan adalah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah khususnya kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang dipromosikan untuk menjabat Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan kepemimpinan bidang pendidikan seperti yang telah disebutkan di atas. Penilaian atas Pelaksanaan pekerjaan seseorang sangat menentukan keberhasilan seseorang untuk diangkat sebagai pemimpin dalam salah satu unit persekolahan.

Pegawai yang dipromosikan itu diusulkan oleh atasan langsungnya kepada unit organisasi yang lebih tinggi untuk kemudian mendapatkan persetujuan dan legalitas dari atasan yang berwenang untuk itu.

Setelah berhasil diangkat sebagai pejabat maka sebelum me-

laksanakan tugas kepemimpinannya, terlebih dahulu dilantik di bawah sumpah jabatan menurut agama dan keyakinannya.

KEPEMIMPINAN ORGANISASI EKSTERN PENDIDIKAN.

Telah diuraikan di atas bahwa salah satu organisasi ekstern yang bergerak di bidang pendidikan ialah organisasi Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan yang disingkat BP-3. Organisasi tersebut adalah merupakan suatu badan yang mengikat persatuan segenap unsur pendidikan yang terdiri dari Orang Tua Murid dan Guru serta masyarakat dan pemerintah setempat.

a. *Syarat-syarat Kepemimpinan.*

Pemimpin organisasi BP-3 seharusnya dari Orang Tua Murid. Sangat jarang diketemukan adanya seorang Kepala Sekolah yang sekaligus menjadi Ketua BP-3 di sekolahnya. Syarat-syarat kepemimpinan dalam organisasi BP-3 ini adalah sebagai berikut :

- 1). Menjadi anggota BP-3 di sekolah tersebut;
- 2). Mempunyai keunggulan dari anggota-anggota lainnya;
- 3). Mampu bekerja-sama dengan Pemerintah, Dewan Guru dan para anggota BP-3;
- 4). Menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan sekolah di mana anaknya mendapatkan pendidikan;
- 5). Cakap, jujur dan berwibawa.

Di samping persyaratan-persyaratan tersebut di atas, faktor jabatan dan kedudukan sosial dalam masyarakat seseorang merupakan faktor pendukung kepemimpinan seorang pemimpin.

b. *Hak dan Kewajiban.*

Pemimpin organisasi BP-3 di sekolah, mempunyai hak-hak tertentu, yaitu:

- 1). Merencanakan dan menetapkan Program kegiatan organisasi BP-3 setempat;
- 2). Mengadakan pungutan/usaha pengumpulan dana melalui uang pangkal dan iuran anggota BP-3 sesuai ketentuan hasil musyawarah anggota;
- 3). Menyetujui atau menolak usul Kepala Sekolah untuk pungutan dana melalui murid/pelajar di sekolah;

- 4). Memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas segala rencana pengembangan sekolah.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh Ketua BP-3 selaku pimpinan organisasi, di atas jabatannya itu tersebut pula beberapa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Ketua/Pimpinan organisasi tersebut, yaitu:

- 1). Ketua BP-3 wajib mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah tangga organisasi;
- 2). Membina kerja-sama yang sebaik-baiknya dengan Kepala Sekolah selaku pimpinan unit organisasi sekolah dalam usaha pengembangan sekolah;
- 3). Menyelenggarakan usaha perbaikan sekolah sebagai sarana pendidikan formal di desa.
- 4). Membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tanpa mencampuri urusan teknis pengajaran yang termasuk wewenang Kepala Sekolah, guru dan Instansi pembina pendidikan;
- 5). Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada para orang tua murid selaku anggota BP-3, tentang kegiatan teknis dan pengelolaan keuangan BP-3 selama masa jabatannya.

c. *Atribut/Symbol.*

Khusus pada kepemimpinan organisasi BP-3 di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi, tidak terdapat suatu simbol yang dapat memberikan tanda-tanda atas kepemimpinannya.

Pimpinan organisasi ini dipanggil dengan sebutan Ketua BP-3, namun istilah/gelar ini tidak lazim dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari, kecuali dalam lingkungan organisasi itu sendiri.

d. *Prosedur Pengangkatan.*

Pengangkatan pemimpin organisasi Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP-3) di desa, adalah melalui prosedur pemilihan secara langsung, bebas dan rahasia. Anggota yang diajukan sebagai calon pemimpin adalah anggota-anggota BP-3 di sekolah itu sendiri.

Unsur-unsur pengurus yang diangkat melalui pemilihan ada-

lah unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Unsur seksi dan anggota ditunjuk langsung oleh team yang terdiri dari Ketua/Sekretaris terpilih, Kepala Sekolah dan unsur pemerintah.

Bagi seorang calon yang terpilih sebagai pemimpin organisasi, langsung saja diangkat dan disahkan oleh para anggota. Sejak itu kepemimpinannya mulai berlaku dan mendapat pengakuan dari segenap anggotanya.

PENGARUH DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN BIDANG PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Manusia semula lahir di tengah-tengah keluarganya (ayah/ibu) mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, mendapatkan pelayanan dan penjagaan yang sebaik-baiknya, serta diasuh menurut tradisi keluarganya itu. Maka sejak itulah terjadilah kontak pendidikan secara langsung dari seorang ayah/ibu sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Setelah anak mulai mengenal lingkungannya maka mulailah terasa baginya betapa perlunya pendidikan itu, karenanya ia mulai berkeinginan untuk mengetahui bahkan mempelajari kenyataan-kenyataan yang dilihatnya. Sejak itu ia berkeinginan makan, berbicara, melakukan sesuatu dengan gerakan sekalipun anak itu sendiri belum berdaya kecuali menggantungkan keinginannya kepada inang pengasuhnya. Demikianlah pendidikan itu berlangsung terus menerus hingga anak/manusia itu menyadari apa arti, fungsi dan peranan pendidikan itu atas dirinya sebagai individu ataupun sebagai anaggota masyarakat.

Pendidikan semacam ini adalah pendidikan yang sifatnya informal di mana ayah dan ibu serta manusia di sekitarnya sebagai bagian dari organisasi masyarakat berperan sebagai guru/pendidik. Kepemimpinan ayah, ibu dan masyarakat itulah yang berfungsi sebagai prasarana pembentukan watak, mental dan kepribadian seseorang.

Dalam keadaan yang demikian itu situasi dan kondisi lingkungan mendominir segala tingkah-laku maupun kepribadian seseorang, sehingga melekatlah pada diri seseorang sifat-sifat maupun kepribadian lingkungan masyarakatnya.

Situasi dan kondisi masing-masing lingkungan masyarakat itu berbeda-beda. Ada lingkungan masyarakat pendidikan yang penuh dengan kondisi pengetahuan dan perkembangan budi luhur. Ada

lingkungan masyarakat agamawan dengan kondisi masyarakatnya yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta penuh pengabdian terhadap sesama umat manusia. Adapula lingkungan masyarakat petani, nelayan, peternak bahkan masyarakat penjahat, yang masing-masing mempunyai kondisi masyarakat yang berbeda.

Dalam studi sosiologi cultural, sebagian Tokoh Sosiologi berpendapat bahwa kepribadian manusia sebagai unsur sosial (an sociale) senantiasa diwarnai oleh lingkungan masyarakatnya. Seorang anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga penjahat, akan mempunyai tabiat kasar serta sifat dan perbuatan jahat. Akan tetapi seorang anak dari keluarga penjahat yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga pendidik atau Ulama, kelak akan menjadi orang yang baik dan benci akan kejahatan.

Pendapat yang demikian ini berorientasi kepada peranan masyarakat yang berfungsi sebagai wadah pembentukan pribadi manusia. Bahwa Kepemimpinan pendidikan itu dapat mempengaruhi bahkan merubah dan membentuk kepribadian bangsa yang berilmu, berbudi luhur, beragama, bermental Pancasila.

Di dalam aktivitas sosial sehari-hari, orang-orang yang berilmu/berpendidikan senantiasa mendapatkan kedudukan yang baik dalam masyarakat. Oleh karena itu semakin manusia itu dewasa berbuat atau berpikir, semakin ia menyadari betapa fungsi kepemimpinan bidang pendidikan itu yang dapat mempengaruhi atau mengubah sama sekali keadaan masyarakat yang primitif menjadi masyarakat modern penuh teknologi.

Di dalam dunia pendidikan, dikenal adanya tiga pusat pendidikan, yaitu:

- keluarga
- sekolah, dan
- masyarakat.

Adapun pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat, telah dijelaskan di atas. Setiap manusia yang lahir di tengah-tengah keluarga/masyarakat, pasti telah memperoleh pendidikan dari lingkungannya, meskipun di dalam pergaulan sehari-hari masih sering terdapat istilah salah didik, tidak dididik dan tidak berpendidikan.

Seorang yang berperilaku kasar dikatakan salah didik atau tidak dididik. Interpretasi ini berorientasi kepada pendidikan lingkungan utamanya keluarga. Akan tetapi apabila ada seorang pemimpin yang

tidak becus menjalankan tugasnya, atau seorang anggota masyarakat yang selalu menentang konsep-konsep pembangunan yang baik untuk umum, maka kepadanya dikatakan tidak/kurang berpendidikan. Interpretasi masyarakat dalam hal ini adalah pendidikan sekolah.

Oleh karena itu di samping pendidikan lingkungan yang telah diperoleh sejak lahir, masyarakat di mana saja juga memerlukan pendidikan sekolah. Masyarakat modern sekarang ini menyadari bahwa banyak hal di dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dibaca ataupun diolah dengan pengetahuan yang hanya diperoleh dari lingkungan keluarga/masyarakat. Banyak rahasia alam yang perlu dikupas dengan pisau pengetahuan yang hanya diperoleh di sekolah. Oleh karena itu kepemimpinan di bidang persekolahan mempunyai fungsi sebagai pembentuk masa depan bangsa. Hanya bangsa yang berilmu pengetahuan yang dapat membaca rahasia kekayaan alam di sekitar manusia.

Dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan formal bagi masyarakat, maka pemerintah telah berusaha mendirikan sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan formal di mana masyarakat di pedesaan mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih kompleks.

Khususnya di Desa Benua, masyarakat setempat telah mengenal pendidikan formal sejak tahun 1936, yaitu dengan nama Sekolah Dusun. Bekas-bekas murid keluaran sekolah tersebut sekarang ini telah banyak yang menjadi pemimpin terutama di bidang pendidikan.

Sekarang ini hampir di semua desa/kelurahan dalam wilayah Sulawesi Tenggara telah terdapat organisasi unit persekolahan, sehingga masyarakat di pedesaan dengan mudah dapat menyekolahkan anak-anaknya.

Bahkan di beberapa desa/kelurahan telah ditemukan adanya Sekolah Menengah Tingkat Pertama sebagai lanjutan dari pendidikan dasar, sehingga kemungkinan untuk putus sekolah bagi anak-anak di desa sudah dapat dikurangi.

Meskipun Sekolah Dasar baru merupakan awal dari proses pendidikan formal, namun dengan fungsinya sebagai wadah

pembentukan pengetahuan dasar telah dapat memberikan modal dasar bagi masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin di dalam membangun dirinya serta berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat di pedesaan, bahwa kepemimpinan bidang pendidikan sangat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat.

Sejak adanya lembaga pendidikan formal di desa, jumlah penduduk yang buta huruf semakin mengecil. Masyarakat telah dapat berpikir secara rasional dan meninggalkan pemikiran-pemikiran tradisional yang berorientasi pada adat dan tradisi yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan zaman.

BAB VIII

BEBERAPA ANALISA

PENGARUH KEBUDAYAAN TERHADAP SISTEM KEPEMIMPINAN DI PEDESAAN.

Kebudayaan adalah cara hidup yang dibina oleh suatu masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, pembentukan pola organisasi kemasyarakatan, pengelolaan lingkungan hidup serta berbagai macam kebutuhan individu maupun kelompok.

Sehubungan dengan hidup kebersamaan manusia di dalam kelompoknya yang memaksa manusia untuk berorganisasi, terbentuklah konsensus tentang beberapa nilai secara turun temurun yang memungkinkan setiap individu tetap hidup bertahan dalam kelompoknya.

Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yaitu suatu bangsa yang terbentuk di atas berbagai suku bangsa dalam ciri khasnya masing-masing. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia, menimbulkan pula aneka ragam kebudayaan masyarakatnya.

"Kebudayaan adalah penjumlahan atau akumulasi semua obyek materiil (benda), pada organisasi kemasyarakatan, cara tingkah-laku, pengetahuan, kepercayaan dan lain-lain aktivitas yang dikembangkan dalam pergaulan manusia". (Soekandar Wiriaatmadja M.A, 1983 : 17).

Masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya masyarakat Tolaki di daerah Kendari yang terdiri dari petani-petani turun-temurun, mempunyai orientasi kebudayaan di bidang usaha/ekonomi. Pokok pangkal terbentuknya kebudayaan suku Tolaki baik yang berada di Daerah Kabupaten Kolaka, ialah bahwa setiap individu mempunyai tugas untuk hidup dan mengadakan pengelolaan lingkungan hidupnya, sesuai dengan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Maka dapatlah diketahui bahwa asal-usul kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara ialah economic organization (pengorganisasian ekonomi) dengan tugas individu untuk memenuhi kebutuhan organisme hidupnya.

Setiap usaha masyarakat dilakukan secara bersama (gotong-royong), meskipun pada hasilnya merupakan pencapaian tujuan individu ataupun kelompok. Di dalam aktivitas bersama itulah timbul-

nya kepemimpinan dalam masyarakat yang sangat ditentukan oleh tradisi atau kebudayaan lingkungannya.

Di dalam masyarakat pedesaan Sulawesi Tenggara khususnya di lingkungan komunitas suku Tolaki, faktor tradisi dan kebudayaan daerahnya sangat mempengaruhi sistem kepemimpinan yang berlangsung di pedesaan. Kharisma atau kedudukan sosial seorang pemimpin merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam setiap organisasi kemasyarakatan di desa. Sebagian masyarakat menanggapi bahwa sebaiknya setiap pimpinan di desa diangkat dari keluarga/turunan pemerintah di samping memperhatikan sejumlah keunggulan yang dimiliki sebagai modal kekuatan kepemimpinannya. Demikianlah kenyataannya bahwa antara lingkungan, kebudayaan dan kepemimpinan di pedesaan, merupakan suatu rangkaian sebab-akibat yang saling mempengaruhi. Kebudayaan dibentuk oleh lingkungan, sedang pola dan sistem kepemimpinan di desa dibentuk oleh kebudayaan lingkungannya. Sebaliknya kepemimpinan itu merupakan usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan dengan mengelola lingkungan hidup di mana kepemimpinan itu berlangsung.

Pimpinan masyarakat di pedesaan sekarang ini terdiri dari kepemimpinan formal (formal leader) dan kepemimpinan tradisional/informal (informal leader). Baik pemimpin formal maupun pemimpin informal senantiasa terjalin kerjasama yang harmonis dalam segala kegiatan maupun kemasyarakatan.

Untuk terwujudnya keharmonisan, keseimbangan, keselarasan dan ketenteraman dalam kehidupan sangat diperlukan usaha-usaha pengendalian sosial. Sehubungan dengan itu, maka nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan masyarakat setempat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia seharusnya dijadikan pedoman dan landasan berpikir dan bertindak baik oleh pemimpin maupun bagi segenap anggota masyarakat. Pertentangan-pertentangan kepentingan antar individu maupun golongan sebaiknya diselesaikan melalui jalur keluarga (adat istiadat setempat) kemudian menempuh jalur formal (perundang-undangan) yang berlaku secara nasional. Sistem kepemimpinan yang demikian ini hingga sekarang masih dianut oleh masyarakat Sulawesi Tenggara, meskipun telah terjadi pergeseran-pergeseran nilai adat istiadat dan kebudayaan masyarakat sebagai akibat perkembangan teknologi mutakhir sekarang ini.

Adanya peralatan-peralatan pertanian yang modern, senantiasa

mempersempit ruang kegiatan dan peranan kepemimpinan di bidang usaha/perekonomian. Semakin lancarnya perhubungan dan tersedianya sarana perhubungan antara desa dan kota, semakin terbuka pula bagi masyarakat di pedesaan untuk memperluas pengalaman serta menimba pengetahuan yang sedikit tidaknya membawa perubahan-perubahan sikap maupun pola berpikir dan berusaha bagi masyarakat.

Demikian pula dengan masuknya berbagai macam sarana komunikasi di desa, seperti radio, televisi, koran dan buku-buku perpustakaan desa, mempengaruhi pula sistem komunikasi dalam masyarakat. Penyampaian sesuatu program ataupun perintah terhadap masyarakat cukup melalui radio, televisi, surat-menyurat dan lain-lain komunikasi yang lebih praktis sekalipun oleh adat dan kebiasaan setempat dianggap kurang baik atau menyimpang dari norma-norma adat masyarakat setempat. Akhirnya dengan masuknya nilai-nilai budaya baru akan mengakibatkan pergeseran-pergeseran nilai kebudayaan dalam masyarakat pedesaan. Bahkan tidak mustahil akan terjadi depresi kebudayaan, di mana pada suatu masa yang tertentu unsur-unsur kebudayaan lama akan tergeser sama sekali dan digantikan oleh unsur-unsur kebudayaan baru.

B. SISTEM KEPEMIMPINAN DI PEDESAAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI POLITIK NASIONAL.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, masyarakat Indonesia telah berada dalam taraf kehidupan makmur, aman tenteram dan damai. Kedamaian yang diciptakan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat di zaman kerajaan, tumbuh di hati masyarakat atas dasar kebersamaan cita-cita, kebersamaan dalam usaha dan prinsip-prinsip kekeluargaan yang murni.

Kepala Desa atau dengan istilah-istilah lainnya dalam bidang pemerintahan di desa memimpin pemerintahan atas dasar kepercayaan masyarakat yang didukung kharisma, kewibawaan, kejujuran dan keikhlasan berkorban untuk kepentingan segenap masyarakatnya. Partisipasi dan solidaritas masyarakat terhadap pemimpin-pemimpinnya cukup tinggi.

Di Daerah Sulawesi Tenggara, pengangkatan pemimpin-pemimpin formal di pedesaan adalah berdasarkan atas mufakat masyarakat. Tanpa legalitas pemerintah di atasnya (pemerintahan sebelum periode kemerdekaan) Kepala Desa/Kepala Kampung/Puu Tobu,

diakui oleh masyarakat sebagai panutan yang wajib diikuti. Demikianlah kenyataannya yang masih terlihat sekarang ini bahwa pemimpin-pemimpin formal yang diangkat atas keinginan masyarakat lebih berhasil menjalankan kepemimpinannya dibanding dengan pemimpin-pemimpin yang diangkat langsung oleh pemerintah di atasnya tanpa ditunjang oleh unsur adat istiadat setempat.

Sistem pemerintahan desa pada masa yang lalu, sangat tradisional sehingga sampai di masa kemerdekaan dan pembangunan nasional dewasa ini sistem tersebut masih banyak dipraktekkan terutama dalam pembangunan masyarakat desa. Keadaan desa pada waktu itu memperlihatkan suatu kehidupan sosial yang stabil. Akan tetapi keadaan ekonomi masyarakat serta lembaga-lembaga perekonomian di desa masih sangat sederhana, sehingga generasi masa lalu kurang mewariskan hasil pembangunan fisik yang dapat memperingati jejak sejarah kehidupan mereka.

Kedatangan orang-orang Belanda dan Jepang sebagai bangsa penjajah telah menanamkan sistem pemerintahan yang baru sampai di pedesaan yang pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pemerintahan Belanda. Keadaan itu sangat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat di mana tradisi, adat istiadat dan kepribadian masyarakat hampir kehilangan jejak. Politik adu domba oleh pemerintah Belanda menanamkan perpecahan di kalangan masyarakat terutama antara pemimpin-pemimpin masyarakat di pedesaan.

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia untuk menata kembali organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Di Daerah Sulawesi Tenggara khususnya pada masyarakat Tolaki di lokasi penelitian ini telah banyak membawa perubahan terutama dalam sistem pemerintahannya yang telah menganut sistem feodal di zaman penjajahan Belanda kini berganti dengan sistem demokrasi. Pengangkatan Kepala Desa dan pemimpin-pemimpin formal lainnya di desa tidak lagi di dasarkan atas keturunan (sistem pewarisan) tetapi dengan melalui prosedur pemilihan secara langsung, bebas dan rahasia oleh masyarakat setempat.

Dengan diterapkannya sistem Administrasi Politik Nasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka sistem pemerintahan di pedesaan mengalami perubahan-perubahan baik dalam hal struktur orga-

nisasi maupun pada prosedur pengangkatan dan sistem kepemimpinanannya.

Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1979, maka kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan desa terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan unsur staf sekretariat yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Di samping itu dibentuk pula organisasi/ lembaga pendukung pemerintahan di desa, yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Organisasi-organisasi formal lainnya dibentuk di desa berdasarkan kebutuhan masyarakat serta sesuai perundang-undangan yang berlaku yang mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia.

Meskipun sebagian besar dari aspek kehidupan masyarakat telah diatur dan dikendalikan oleh organisasi formal yang rapih, namun dengan sistem administrasi politik nasional ini belum dapat berhasil sepenuhnya mengendalikan keinginan-keinginan masyarakat yang sangat kompleks itu.

Pada prinsipnya, sistem Administrasi Politik Nasional dengan berbagai ragam produknya cukup baik dan sesuai dengan tuntutan pembangunan sekarang ini, akan tetapi karena penyelenggaraannya yang terkadang mengesampingkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, maka oleh sebagian masyarakat di pedesaan sering-sering menunjukkan gejala protesnya terhadap gagasan-gagasan ideal yang diproyeksikan di pedesaan.

Penanaman bibit padi unggul yang oleh tradisi masyarakat dianggap bukan waktunya, terkadang tidak mendapat sambutan dari masyarakat di pedesaan meskipun mereka itu adalah petani-petani yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan yang dapat menghidupi keluarganya. Di samping itu sistem perkreditan dari lembaga-lembaga yang bersangkutan, oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu hal yang sangat mengikat.

Di segi politik pemerintahan, masyarakat beranggapan bahwa praktek pengangkatan seorang pemimpin di pedesaan yang tidak memperhatikan faktor kedudukan sosial pemimpin yang bersangkutan adalah kurang wajar. Apalagi kalau prosedur pengangkatannya itu melalui penunjukkan langsung dari atas dengan tidak memperhatikan keinginan tokoh-tokoh masyarakat sebagai panutan warga masyarakat setempat. Kenyataannya bahwa dengan sistem yang demikian itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga

terjadilah pergantian pimpinan yang terlalu sering, atau kepemimpinannya yang tidak didukung oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu meskipun sistem Administrasi Politik Nasional telah diterapkan di seluruh daerah pedesaan Indonesia, namun di beberapa desa terutama di wilayah penelitian ini, sistem kepemimpinannya masih didominasi oleh unsur-unsur kepemimpinan tradisional. Kenyataannya bahwa pendekatan kultural lebih berhasil daripada pendekatan formal, sebab segala aktivitas sosial di pedesaan selalu diatur secara kekeluargaan dan berdasarkan atas tradisi masyarakat setempat.

C. SISTEM KEPEMIMPINAN DI PEDESAAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berusaha menggalakkan pembangunan di segala bidang. Hal ini disadari bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur hingga kini belum tercapai. Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (PENASBODO) yang pernah dicanangkan oleh Pemerintah Orde Lama, hanya mampu membangun gedung-gedung bertingkat di ibukota sementara rakyat di pedesaan hidup menderita kemiskinan, kebodohan dan kemelaratan.

Sistem pembangunan mercusuar zaman Orde Lama bukannya menciptakan kemakmuran rakyat, tetapi justru menciptakan kemelaratan yang hampir saja berakhir dengan kehancuran. Suasana perdamaian yang didambakan oleh masyarakat berubah menjadi suasana pertentangan yang hangat yang mengarah kepada hukum rimba, di

Pada zaman itu pembangunan di Daerah Sulawesi Tenggara melangkah surut sekitar keadaan 20 tahun sebelumnya. Khususnya masyarakat pedesaan di Kabupaten Kendari pada sekitar tahun 1955 – 1963 mengalami krisis yang luar biasa. Penduduk pedesaan hidup di pengungsian setelah rumah-rumah mereka dibakar habis oleh gerombolan DI/TII. Ibukota Kecamatan Wawotobi dibumi-hanguskan oleh pasukan Kaharmuzakar pada tahun 1957. Masyarakatnya mengungsi di pegunungan tanpa bekal kehidupan. Sarana pendidikan dan perekonomian dihancurkan. Pemimpin-pemimpin masyarakat ditawan atau dibunuh tanpa alasan kecuali dengan tujuan melumpuhkan kekuatan masyarakat. Sementara masyarakat bergelut

dengan kebodohan, pernyataan bebas buta huruf diproklamirkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga kaburlah sasaran pembangunan di pedesaan. Hanya satu-satunya milik masyarakat yang masih utuh, yaitu nilai-nilai budaya dalam segala aspeknya yang tetap terbawa di manapun mereka berada.

Bertolak dari krisis masyarakat inilah yang memuncak di tangan Komunis Indonesia (PKI), Orde Baru membangun kekuatannya sebagai penyelamat bangsa yang lagi terbawa arus kehancuran.

Program Pembangunan Lima Tahun (PELITA) disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dapat dibaca dari sejumlah pengalaman yang telah dialami oleh bangsa Indonesia selama beberapa periode pemerintahan yang telah berlangsung di bumi Indonesia.

Dari pengalaman-pengalaman itu, dapatlah ditentukan salah satu arah pembangunan yang diprioritaskan, yaitu Pembangunan Bangsa Indonesia Seutuhnya.

Pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, Kebudayaan dan pertahanan keamanan dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah pedesaan di mana sebagian besar dari masyarakat Indonesia berada di pedesaan.

Dengan dicanangkannya Pembangunan Nasional di desa-desa, yang bersasaran pada pembangunan fisik dan mental masyarakat, maka sekaligus telah membawa perubahan-perubahan yang besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Di bidang politik pemerintahan, dengan adanya sistem Administrasi Politik Nasional telah memperbaiki struktur organisasi pemerintahan/kemasyarakatan dengan penegasan hak, kewajiban, fungsi dan peranan masing-masing personil/organisasi.

Kepemimpinan di bidang pendidikan ditingkatkan melalui usaha pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan gedung-gedung sekolah Inpres di desa-desa sekaligus menyentuh kebutuhan masyarakat di pedesaan. Anak-anak dari keluarga petani yang tidak berkemampuan, sekaligus dapat memperoleh pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Bagi masyarakat dari golongan orang dewasa tidak hanya menerima kebodohan secara pasrah tetapi dapat memperoleh kesempatan belajar melalui kursus-kursus yang diselenggarakan di desa.

Kepemimpinan di bidang ekonomi juga mengambil peranan dalam pembinaan perekonomian masyarakat baik dalam organisasi

perekonomian formal, maupun melalui perkumpulan-perkumpulan/ lembaga perekonomian informal.

Pembangunan di bidang kebudayaan yang meliputi adat istiadat, kesenian dan tradisi masyarakat lainnya, mendapat pembinaan melalui kelompok-kelompok kesenian dan lembaga-lembaga adat yang merupakan perangkat pemerintahan desa.

Jelasnya bahwa Pembangunan Nasional yang dituangkan melalui Pelita I, II dan III ini telah membentuk sekaligus organisasi-organisasi dalam masyarakat selaku penyelenggara pembangunan dalam masyarakat pedesaan. Azas pembangunan dalam Pelita ini adalah Pancasila yang dituangkan dalam GBHN serta Program Pembangunan di masing-masing daerah.

Khususnya di Daerah Sulawesi Tenggara dalam pemerataan pembangunan serta hasil-hasil dari pembangunan itu, oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara telah mencanangkan suatu program pembangunan yang disebut GERSAMATA yaitu Gerakan Desa Makmur Merata.

Tujuan dari program ini ialah untuk menciptakan kemakmuran rakyat secara merata. Karena itu maka pemerintah di desa wajib membina dan mengembangkan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan di desa sebagai penyelenggara pembangunan. Di samping itu pemimpin-pemimpin masyarakat perlu membangkitkan semangat partisipasi dan potensi-potensi masyarakat yang telah ada di masing-masing desa.

Adat istiadat dan kepribadian masyarakat di pedesaan perlu dikembangkan demi terciptanya keselarasan pembangunan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang menjadi pegangan masyarakat pedesaan sejak dahulu kala.

Adalah suatu kenyataan di desa bahwa kepemimpinan di desa yang tidak sejalan atau bertentangan dengan norma-norma adat/ kepribadian masyarakat setempat senantiasa mendapatkan tantangan langsung ataupun tidak langsung dari masyarakat. Inilah yang merupakan krikil dalam kepemimpinan maupun pembangunan yang diselenggarakan di desa.

BAB IX

P E N U T U P

Syukur Alhamdulillah dengan petunjuk Tuhan SWT, serta ketekunan dan kerja keras segenap anggota Team Peneliti dalam mengumpulkan, mengolah dan merangkaikan aneka ragam data kepemimpinan di pedesaan yang diperoleh dari berbagai sumber, maka tersusunlah naskah ini dalam judulnya "Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Sulawesi Tenggara"

Di dalam proses inventarisasi dan dokumentasi aspek kepemimpinan ini, terdapat berbagai hal yang merupakan rangkaian pengalaman dan pengetahuan tentang Sistem Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Khususnya di Desa Benua dan Kelurahan Inalahi selaku wilayah sample dari sekian desa di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dari pengalaman/pengetahuan tersebut dapatlah disimpulkan dalam beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Bahwa desa-desa di wilayah Sulawesi Tenggara telah mengalami beberapa kali perobahan politik pemerintahannya, yaitu periode pemerintahan raja-raja, periode pemerintahan penjajah dan periode pemerintahan Republik Indonesia.
2. Kepemimpinan yang berlangsung dalam masyarakat pedesaan sejak dahulu hingga sekarang ini adalah kepemimpinan formal (formal leader) dan kepemimpinan informal (informal leader).
3. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan, banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan kebudayaan masyarakat setempat sehingga setiap pemimpin di desa perlu mengetahui segala aspek kehidupan masyarakat yang dipimpinnya.
4. Faktor kepemimpinan dan pemimpin sangat menentukan arah dan hasil akhir dari pembangunan di pedesaan.
5. Sebagian besar masyarakat Indonesia berada di wilayah pede-

saan sehingga Pembangunan Nasional mutlak harus dipusatkan di desa.

Dalam usaha pembangunan Bangsa Indonesia seutuhnya yang sasarannya meliputi keseluruhan warga negara Indonesia, maka melalui naskah ini disarankan sebagai berikut :

B. SARAN-SARAN

1. Agar unsur-unsur kepemimpinan informal di pedesaan dapat dibina, dikembangkan dan didayagunakan oleh pemerintah sebagai sarana dan wahana pembangunan di desa.
2. Untuk suksesnya pembangunan masyarakat di pedesaan, sebaiknya pemerintah memanfaatkan organisasi sosial di desa dengan melimpahkan sebagian hak dan kewajibannya untuk mengatur dan mengelola pembangunan rumah tangganya.
3. Penyampaian gagasan/program pembangunan di desa akan lebih berhasil apabila melalui jalur formal dan jalur informal (pendekatan kultural dan pendekatan keluarga).
4. Pemimpin-pemimpin formal di desa sebaiknya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat setempat.
5. Agar diciptakan satunya kata dan perbuatan di dalam setiap aktivitas pembangunan di desa.

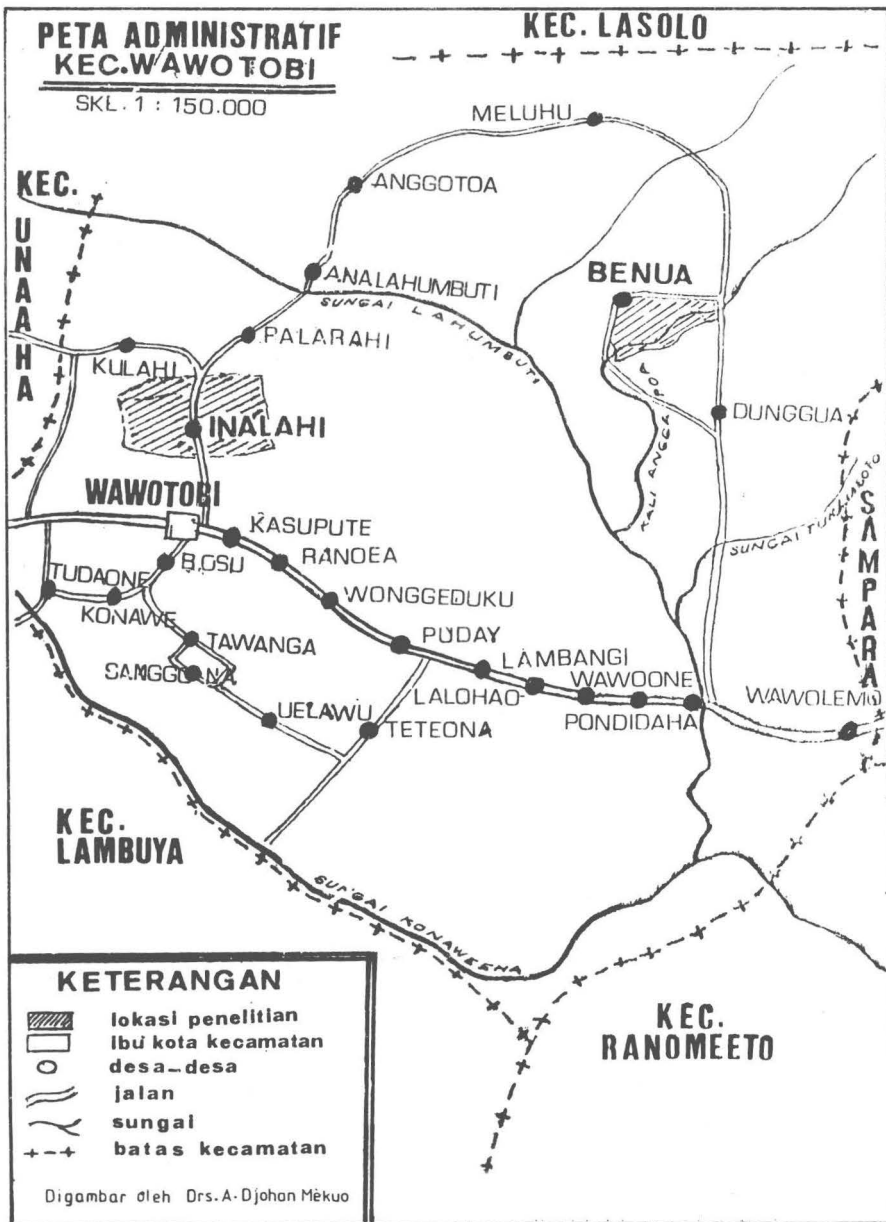
PETA ADMINISTRATIF PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Skala : 1 : 2.350 000.-



PETA ADMINISTRATIF **KEC. WAWOTOBI**

SKL. 1 : 150.000



BIBLIOGRAFI

1. Anderson dan Parker : *Society Its Organization and Operation*, New York, 1964
2. Astrid S. Susanto, Dr. phil. : *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Binacipta, Bandung
3. Bayu Surianingrat, Drs. : *Organisasi Pemerintahan Wilayah/ Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
4. Fairchil, Hendry Pratt : *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, Little Field Adams & Co, Paterson, New York, 1960
5. Kartono, Kartini, Dra. : *Pemimpin dan Kepemimpinan*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1983
6. Lakebo, Berthyn, Drs. : *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sulawesi Tenggara*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara, 1980/1981
7. Pamudji, MPA, Drs. S : *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
8. Scott, William G, : *Organozation Theory*, Richard D. Irwin, Inc, Home Wood, 11 Linois, 1976.
9. Siagian, Sondang P, Ph. D, : *Peranan Staf dan Management*, Gunung Agung, Jakarta, 1976
10. Soeparmo R. : *Mengenal Desa*, PT. Intermasa, Jakarta 1977

11. Stofdill, Ralph M. : *Hand book of Leader Ship*, The Free Press, New York, Collier Mac Million Publisher, London, 1974
12. Sumber Saparin, Dra, Ny. : *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Chalia Indonesia, Jakarta, 1977
13. Wancik Saleh, SH, K : *UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU. No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Chalia Indonesia, Jakarta, 1979
14. Wiriaatmadja, Soekandar, MA. : *Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan*, CV. Jasaguna, Jakarta, 1983

DAFTAR INFORMAN

1. N a m a : ABURAERAH TAWA
Umur : 30 tahun
Pendidikan : S.M.A.
Pekerjaan : Kepala Kelurahan Inalahi
Alamat sekarang : Kelurahan Inalahi
2. N a m a : ABD. HALIF
Umur : 38 tahun
Pendidikan : S.M.A.
Pekerjaan : Pegawai Kantor Kecamatan Wawotobi
Alamat sekarang : Desa Kulahi
3. N a m a : A H Y A
Umur : 67 tahun
Pendidikan : Sekolah Desa 3 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat sekarang : Desa Inolobu
4. N a m a : A J E N G
Umur : 34 tahun
Pendidikan : S.M.P.
Pekerjaan : Staf Kelurahan Inalahi
Alamat sekarang : Kelurahan Inalahi
5. N a m a : BITATU
Umur : 40 tahun
Pendidikan : Sekolah Rakyat
Pekerjaan : P3NTCR Desa Benua
Alamat sekarang : Desa Benua
6. N a m a : BUDUALA
Umur : 50 tahun
Pendidikan : Sekolah Rakyat

- Pekerjaan : Tani
 Alamat sekarang : Desa Benua
7. N a m a : BUNDUWULA
 Umur : 65 tahun
 Pendidikan : Sekolah Desa Kelas V
 Pekerjaan : Pensiunan Kepala Desa
 Alamat sekarang : Desa Kulahi
8. N a m a : DAKUNDE
 Umur : 56 tahun
 Pendidikan : S.G.A.
 Pekerjaan : Penilik Kebudayaan Kandep Dikbud
 Kec. Wawotobi
 Alamat sekarang : Desa Palarahi
9. N a m a : DJAINAL RAMA, BA
 Umur : 43 tahun
 Pendidikan : Sarmud APDN
 Pekerjaan : Peg. Kantor Daerah Tk. II Kabupaten
 Kendari
 Alamat sekarang : Desa Benua
- 10; N a m a : JASWAN, BA
 Umur : 37 tahun
 Pendidikan : Sarmud IAIN
 Pekerjaan : Guru Sanawiyah Neg. Wawotobi
 Alamat sekarang : Desa Kulahi
11. N a m a : HAKEK
 Umur : 49 tahun
 Pendidikan : S.G.B.
 Pekerjaan : Bekas Guru SD
 Alamat sekarang : Desa Dunggua

12. N a m a : K O E
 Umur : 55 tahun
 Pendidikan : Sekolah Rakyat 3 tahun
 Pekerjaan : Penghulu adat Desa Benua
 Alamat sekarang : Desa Benua
13. N a m a : KONGGOASA
 Umur : 60 tahun
 Pendidikan :
 Pekerjaan : Bekas Sekwilda Tk. I Propinsi Sulawesi
 Tenggara
 Alamat sekarang : Kendari
14. N a m a : L A A N D A
 Umur : 65 tahun
 Pendidikan : Sekolah Desa
 Pekerjaan : Bekas Kepala Desa Amonggedo
 Alamat sekarang : Desa Benua
15. N a m a : LAHARIMU
 Umur : 60 tahun
 Pendidikan : Sekolah Desa
 Pekerjaan : Pegawai Mesjid Desa Dunggua
 Alamat sekarang : Desa Dunggua
16. N a m a : LAMBATO
 Umur : 59 tahun
 Pendidikan : Sekolah Desa Kelas V
 Pekerjaan : Tani
 Alamat sekarang : Desa Inolobu
17. N a m a : LAROPE
 Umur : 107 tahun
 Pendidikan : Kursus Buta Huruf
 Pekerjaan : Tani
 Alamat sekarang : Kelurahan Wawotobi

18. N a m a : LAUMEWA
 Umur : 55 tahun
 Pendidikan : Sekolah Polisi Kehutanan
 Pekerjaan : Pegawai Kehutanan
 Alamat sekarang : Desa Dunggua.
19. N a m a : M. ARIFIN M
 Umur : 35 tahun
 Pendidikan : S.M.P.
 Pekerjaan : Sekretaris Kelurahan Inalahi
 Alamat sekarang : Kelurahan Inalahi
20. N a m a : MEKUO
 Umur : 61 tahun
 Pendidikan : Sekolah Desa
 Pekerjaan : Bekas P3NTCR Desa Amonggedo
 Alamat sekarang : Desa Benua
21. N a m a : PAGANDA
 Umur : 60 tahun
 Pendidikan : Sekolah Desa
 Pekerjaan : Tani
 Alamat sekarang : Desa Benua
22. N a m a : PAMADA
 Umur : 61 tahun
 Pendidikan : Sekolah Desa
 Pekerjaan : Tani
 Alamat sekarang : Desa Benua
23. N a m a : POLINGAI
 Umur : 42 tahun
 Pendidikan : Sekolah Rakyat
 Pekerjaan : Kepala Desa Benua
 Alamat sekarang : Desa Benua

24. N a m a : PONGAE
 Umur : 63 tahun
 Pendidikan : Sekolah Desa
 Pekerjaan : Ketua LKMD Benua
 Alamat sekarang : Desa Benua
25. N a m a : POSIMBI
 Umur : 61 tahun
 Pendidikan : Sekolah Desa Kelas V
 Pekerjaan : Tani (Bekas Kepala Kampung Kulahi)
 Alamat sekarang : Desa Kulahi
26. N a m a : RAHMAELI
 Umur : 43 tahun
 Pendidikan : S.G.B.
 Pekerjaan : Bekas Guru SD/Bekas Kepala Desa Benua
 Alamat sekarang : Desa Benua
27. N a m a : SAIDI
 Umur : 54 tahun
 Pendidikan : P.G.A.
 Pekerjaan : Kepala Kantor Agama Kecamatan Wawotobi
 Alamat sekarang : Desa Palarahi
28. N a m a : SALAM
 Umur : 40 tahun
 Pendidikan : S.M.P.
 Pekerjaan : — Peg. Kantor Kec. Wawotobi
 — Bekas Kep. Desa Inalahi
 Alamat sekarang : Desa Kulahi
29. N a m a : SALIMIN
 Umur : 29 tahun

- | | | |
|-----------------|---|------------------------|
| Pendidikan | : | SMP |
| Pekerjaan | : | Peg. Kelurahan Inalahi |
| Alamat sekarang | : | Kelurahan Inalahi |
30. N a m a : SAPEONA
- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| Umur | : | 54 tahun |
| Pendidikan | : | S.M.P. |
| Pekerjaan | : | Peg. SMA Negeri Wawotobi |
| Alamat sekarang | : | Kelurahan Inalahi |
31. N a m a : SARIYA
- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| Umur | : | 57 tahun |
| Pendidikan | : | Sekolah Desa |
| Pekerjaan | : | Tani |
| Alamat sekarang | : | Desa Dunggua |
32. N a m a : SIYSA
- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| Umur | : | 80 tahun |
| Pendidikan | : | Sekolah Desa Kelas III |
| Pekerjaan | : | Pensiunan Peg. Pertanian |
| Alamat sekarang | : | Desa Inolobu |
33. N a m a : SUMANDA
- | | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| Umur | : | 59 tahun |
| Pendidikan | : | Sekolah Desa |
| Pekerjaan | : | Pensiunan Peg. Kehutanan |
| Alamat sekarang | : | Desa Benua |
34. N a m a : TALIGANA
- | | | |
|-----------------|---|------------------|
| Umur | : | 56 tahun |
| Pendidikan | : | Kepala SD. Benua |
| Pekerjaan | : | K.P.G. |
| Alamat sekarang | : | Desa N |
35. N a m a : TAMOREKA
- | | | |
|------|---|----------|
| Umur | : | 49 tahun |
|------|---|----------|

Pendidikan : S.M.P.
Pekerjaan : Kepala Desa Dunggua
Alamat sekarang : Desa Benua

36. N a m a : WUNDULAWA
Umur : 101 tahun
Pendidikan : Kursus PBH
Pekerjaan : Staf Proyek Pemugaran Bekas Imam/
P3NTER Desa Amonggedo
Alamat sekarang : Kendari

INDEKS

A

Ama	47, 50
Andolaki	28
Anggo	59
Ata	44

B

Baisa	50
Bobalu	113, 135
Bungkulaki	28

D

Doda	177
------	-----

E

Ela	50
-----	----

G

Gandaria	91
----------	----

H

Hine	50
------	----

I

Ina	50
Inggomiu	49
Inggoo	49
Inalahi	17
Inolobu	37

K

Kalosara	48
Kambo	66
Kapala Kambo	23
Kapita Mayoro	34
Kiniku lambu	20
Konggoasa	35

L

Laanda	41
Lakiana	50
Lako mbaapaa	28

M

Mepambahora	51
Mepolahadere	51
Mepokui	162
Metanggali	48
Metetenggare osu	28
Metobu	21
Mbuakoy	39, 65
Mbuoway	39, 65
Mbuwalaka	46
Mbusehe	65
Mondau	21, 51
Mondeteki	48
Mondeo pesuko	49
Mombokondetoro	49
Monbesara	49
Mosehe	55
Mowindahako	49

N

Napo	62
Naina	50

O

Ododa	177
-------	-----

P

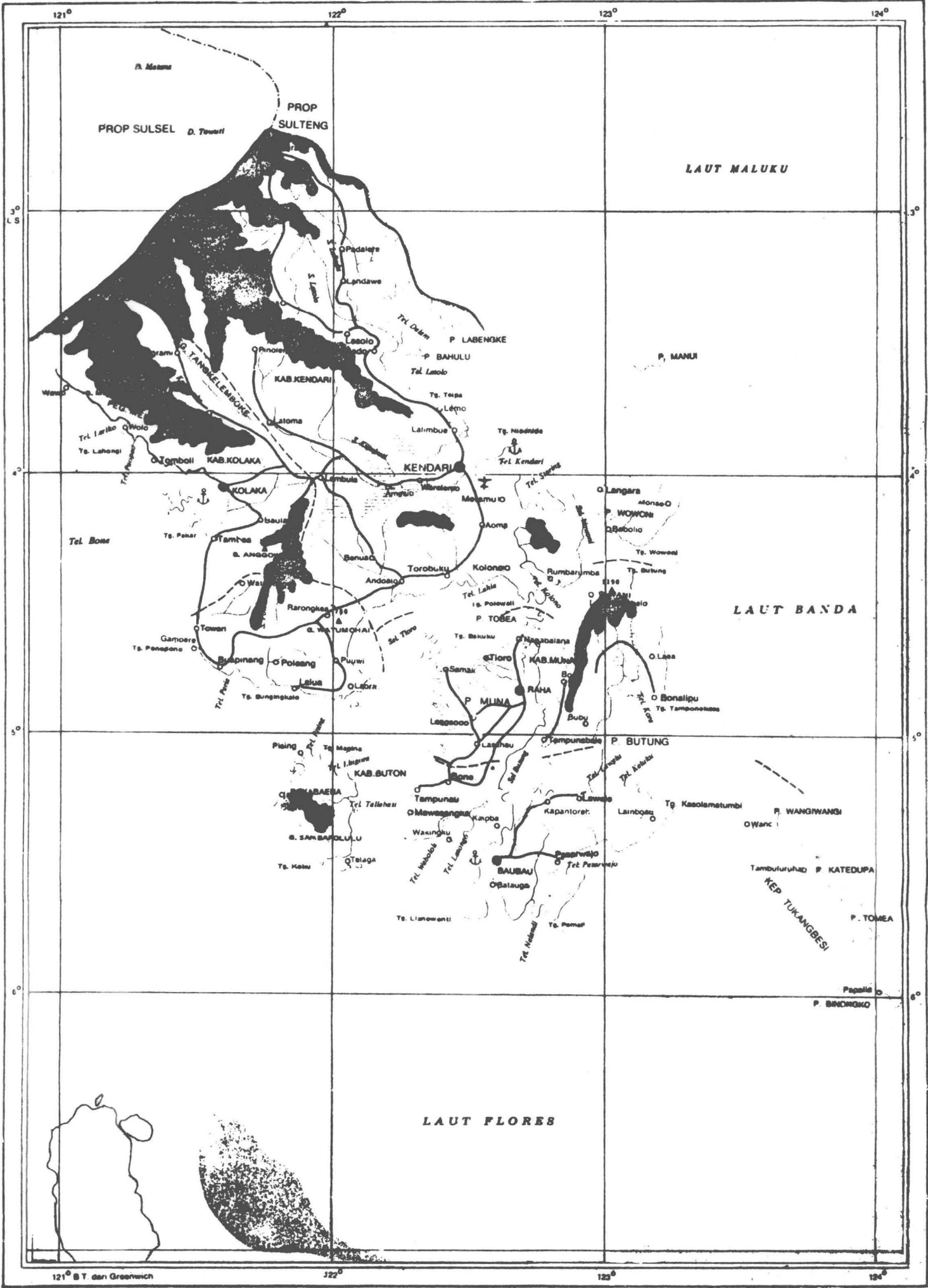
Pagaragadi	138
Palupai	142
Paue	153
Puadoda	177
Pua Ima	147
Posudo	64
Puu Tobu	62

R	
Rapu	47
Rumuruala	28
Rundulamo	1

S	
Sangiangginoburu	55
Sangia Mbuu	55
Sanggoleombae	55
Sapati	64
Sumaku	142
Sumopu	53

T	
Taawu	54
Tamalaki	39
Tie	47
To Benua	35
Tobu	21, 33
Tolea	39
Tolaki	1
Tebawo	17
Tuangguru	178
W	
Walaka	60
Wonua	34

PROPINSI SULAWESI TENGGARA



Tidak diperdagangkan untuk umum